



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

2021 LAPORAN KINERJA



Pembinaan



Integrasi



Strategis



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Badan Informasi Geospasial

Tahun 2021



PENYUSUN

Laporan Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik 2021

Penanggung Jawab

Antonius Bambang Wijanarto
Khafid
Lien Rosalina

Tim Penyusun

Anggoro Cahyo Fitrianto
Ninuk Christina Anggraeni
Saidah Istiqomah
Devita Remala Sari
Diah Retno Minarni
Dwi Maryanto
Ferrari Pinem
Furqoni Arief
Iman Sadesmesli
Izzuddin Abdul Aziz
Niendyawati
Nita Maulia
Noor Adhi Sakti
Rahmat Nugroho Proboncono
Rian Pribadi
Setiyani
Sri Hartini
Wahyu Lazuardi
Wulan Yustia Sahroni
Yusuf Wibisono



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT), Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menjadi tolok ukur pencapaian Deputi Bidang IGT sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan dan aktual.

LAKIN ini disusun berdasarkan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran. Kondisi tersebut untuk mendapatkan gambaran riil pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang IGT Tahun Anggaran 2021.

Deputi Bidang IGT memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran tersebut diimplementasikan melalui pembinaan dan pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta penyelenggaraan IGT strategis (IGT yang belum diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga) untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan berbasis informasi geospasial. Dukungan pembinaan penyelenggaraan IGT diwujudkan melalui implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta/KSP (*One Map Policy*), Satu Data Indonesia (SDI) dan percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang wilayah.

Untuk perbaikan yang berkelanjutan saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bahu membahu menyusun LAKIN ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja BIG di masa mendatang.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ABWijanarto'.

Dr. Antonius Bambang Wijanarto

Ringkasan Eksekutif



Tugas utama Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik adalah pembinaan dan pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik, serta penyelenggaraan IGT strategis yaitu IGT yang belum diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Deputi Bidang IGT berperan penting memastikan seluruh IGT sektoral pada Kementerian/Lembaga/Daerah mengacu pada satu referensi sesuai dengan amanat pemerintah tentang Kebijakan Satu Peta/KSP (*one map policy*). Untuk mewujudkan dan menjawab kebutuhan di atas maka Deputi Bidang IGT melalui Rencana Strategis melakukan langkah strategis dan terukur sehingga tercapai hasil yang maksimal.

Penyusunan LAKIN Deputi Bidang IGT 2021 menginformasikan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Tahun 2021 yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) BIG 2020–2024, Rencana Strategis Deputi Bidang IGT 2020–2024. LAKIN ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang IGT kepada Kepala BIG terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang dilakukan Deputi Bidang IGT pada Tahun 2020 telah mendukung pencapaian visi dan misi BIG yaitu “Menjadi Integrator Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Sebagai Landasan Pembangunan Indonesia”.

Deputi Bidang IGT pada tahun 2021 mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. **36,137,323,000,-** setelah di refocusing menjadi Rp. **22,432,323,000,-** Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyusun 2 (dua) target pada sasaran program Deputi Bidang IGT. Berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan Deputi Bidang IGT telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Berikut ini adalah capaian kinerja Deputi Bidang IGT Tahun 2021 :

Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu :

1. IKP01 Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional, memiliki target 52.49% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
2. IKP02 Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional, memiliki target 50.01% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya 100%.

Sebagai kesimpulan, Kedepatian Bidang IGT telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi sasaran program yang dicerminkan dari capaian kinerjanya 100% dan realisasi anggaran sebesar 91,65%.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	12
BAB 1 Pendahuluan	13
1.1. LATAR BELAKANG	8
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	9
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	10
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	11
1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	14
1.6. ISU STRATEGIS	16
Bab 2 Perencanaan Kinerja	19
2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	20
2.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIG 2020-2024	21
2.3. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG IGT 2020-2024	25
2.4. PERJANJIAN KINERJA	31
2.5. METODE PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA	32
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	37
2.1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IGT TAHUN 2021	38
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	48
3.3. REALISASI ANGGARAN	114
MONITORING DAN EVALUASI DEPUTI BIDANG IGT	118
KINERJA LAIN-LAIN	155
Bab 4 Penutup	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Kedepujian berdasar Perka BIG No. 8 Tahun 2020	11
Gambar 2. Struktur organisasi Kedepujian berdasar Renstra Deputi Bidang IGT Tahun 2020-2024	11
Gambar 3. SDM Kedepujian Bidang IGT berdasarkan jabatan	12
Gambar 4. SDM Kedepujian Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan	14
Gambar 5. Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	17
Gambar 6. Skema SDGs dan kebutuhan akan IGT	18
Gambar 7. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam struktur Rencana Strategis BIG 2020-2024	24
Gambar 8. PK Deputi Bidang IGT yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2020	27
Gambar 9. PK Deputi Bidang IGT yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021	28
Gambar 10. Peta Strategi Deputi Bidang IGT	29
Gambar 11. Diseminasi dan penyerahan hasil kegiatan Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang	53
Gambar 12. Spesifikasi IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit	56
Gambar 13. Flowchart SOP Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit	57
Gambar 14. Dokumen Kontrol Kualitas IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit	58
Gambar 15. Dokumen Pemetaan partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit	59
Gambar 16. Uji Implementasi Spesifikasi IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau	60
Gambar 17. Koordinasi Daring dengan KKP dan Identifikasi Kebutuhan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya	62
Gambar 18. Struktur Data IG Sebaran Potensi Perikanan Budidaya	63
Gambar 19. SOP dan Petunjuk Teknis IG Sebaran Potensi Perikanan Budidaya	64
Gambar 20, (a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, (b) <i>Groundtruth</i> , dan (c) Peta hasil re-deliniasi setelah <i>groundtruth</i>	65
Gambar 21. Hasil capaian pelaksanaan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (ILOK dan IUP)	66
Gambar 22. Surat Rekomendasi IGT Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (ILOK dan IUP)	67
Gambar 23. Pelaksanaan Konsinyasi Manajemen Kualitas Penyelenggaraan IG Lahan Garam	68
Gambar 24. Contoh Dokumen QC mulai proses interpretasi, pra survei, hingga supervisi lapangan	70
Gambar 25. Persiapan dan koordinasi	71
Gambar 26. Koordinasi dan Supervisi Penyusunan IG KKP	72
Gambar 27. Modul Penyusunan IG Kawasan Konservasi Perairan	73
Gambar 28. Dokumen Spesifikasi IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	75
Gambar 29. Flowchart SOP Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	76

Gambar 30. Dokumen Kontrol Kualitas IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	77
Gambar 31. Petunjuk Teknis Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Skala 1:250.000	78
Gambar 32. Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	79
Gambar 33. Dokumen Draf Spesifikasi Produk Data IGT Risiko Banjir dan Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Risiko Banjir versi 2	81
Gambar 34. Kegiatan Bimbingan teknis dan FGD kontrol kualitas	81
Gambar 35. Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi	83
Gambar 36. Dokumen Spesifikasi IGT Lahan Sawah Dilindungi	84
Gambar 37. Dokumen Form Kontrol Kualitas	85
Gambar 38. Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Edisi Sumatera Bagian Utara	90
Gambar 39. Indeks Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	90
Gambar 40. Atlas Geospasial Indonesia edisi Sejarah, Suku, dan Budaya Bangsa	92
Gambar 41. Aplikasi e-Atlas Nasional versi 3.0	92
Gambar 42. Diagram Alir Kegiatan Pembuatan Atlas Indikator TPB	93
Gambar 43. Peta Tematik TPB (Capaian indikator 1.2.1* tingkat provinsi)	94
Gambar 44. Peta Tematik TPB (Gap Analisis indikator 1.2.1* Provinsi Jawa Barat)	94
Gambar 45. Buku Atlas Indikator TPB Volume I Nasional dan Volume II Provinsi	95
Gambar 46. Kegiatan IGT Integrasi Spasial Statistik	98
Gambar 47. <i>Indonesian Geospatial Challenge 2021</i>	98
Gambar 48. Pemenang IGC 2021	99
Gambar 49. Peta Sebaran Distribusi Tenaga Kesehatan di Pulau Jawa	100
Gambar 50. Peta Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat di Pulau Jawa (Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat)	100
Gambar 51. Peta Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat di Pulau Jawa. (Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat)	101
Gambar 52. Peta Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ sederajat di Pulau Jawa (Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ sederajat)	101
Gambar 53. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kemendes PDDT	102
Gambar 54. Peta Prototype Neraca SDA-LH untuk Region Jawa	105
Gambar 55. Lingkup Kegiatan IGT Peringatan Dini Banjir TA 2021	106
Gambar 56. File hasil album digital Peta Sistem Lahan dan beberapa contoh hasil layouting untuk album digital <i>seamless</i>	108
Gambar 57. Contoh Hasil Kartu Data Sistem Lahan	109
Gambar 58. Contoh Draft Dokumen Pedoman Survei Lapangan Pemetaan Sistem Lahan 1:50.000	111
Gambar 59. Hasil pemetaan drone di 2 lokasi di Kabupaten Malaka.	112
Gambar 60. Peta Potensi Bencana Longsor di sebagian wilayah Kab. Sukabumi	113
Gambar 61. Area tambang yang dilakukan pemotretan udara	113

Gambar 62. Piagam Penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	156
Gambar 63. Capaian target renaksi Perpres 23/2021 sampai dengan Bulan Desember 2021	159

DAFTAR TABEL

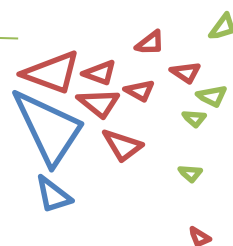
Tabel 1. SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan jabatan	12
Tabel 2. SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan tingkat pendidikan	13
Tabel 3. SDM Kedeputian Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan	13
Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program dan Target 2020-2024	29
Tabel 5. Isian Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT	31
Tabel 6. Capaian sasaran program Deputi Bidang IGT Tahun 2021	39
Tabel 7. Ringkasan Capaian Sasaran Program Deputi BIGT 2021	43
Tabel 8. Perbandingan Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT Tahun 2020 dan 2021	47
Tabel 9. Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)	49
Tabel 10. Sebaran lokasi 20 kabupaten Kegiatan Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang untuk RTRW	51
Tabel 11. Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)	86
Tabel 12. Pagu Alokasi Anggaran Deputi Bidang IGT Per Rincian Output Tahun 2021	114
Tabel 13. Realisasi Anggaran DBIGT per Rincian Output TA 2021	115
Tabel 14. Capaian Kinerja DIGT Triwulan I Tahun 2021	141
Tabel 15. Capaian Kinerja DIGT Triwulan II	150



Malaka, Nusa Tenggara Timur (Foto: DB IGT)

BAB 1

Pendahuluan



1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat tentang kewajiban pemimpin Kementerian Negara/Lembaga sebagai Entitas Akuntabilitas Unit Organisasi, untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Untuk menunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Badan Informasi Geospasial Tahun 2020, dan sekaligus sebagai bahan penilaian dan evaluasi atas kinerja Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT), maka LAKIN Deputy Bidang IGT Tahun 2021 ini disusun. LAKIN Deputy Bidang IGT Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Deputy Bidang IGT merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran dan beban kerja yang diamanahkan oleh pimpinan BIG kepada Deputy Bidang IGT. Laporan ini disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang IGT 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja DIGT 2021. LAKIN ini merupakan implementasi pelaporan riil dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat capaian kinerja DIGT pada tahun anggaran 2021.

Materi atau isi dari LAKIN Deputy Bidang IGT tahun 2021 ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan Deputy Bidang IGT tahun anggaran 2021, yang meliputi antara lain latar belakang, perencanaan kinerja, dan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Penyusunan LAKIN Deputy Bidang IGT 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang IGT kepada Kepala BIG terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. LAKIN Deputy Bidang IGT memuat pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dalam konteks ini, PK merupakan penjabaran visi dan misi Deputy Bidang IGT yang berisi penugasan dari

atasan kepada jajaran dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target.

Kebijakan pelaporan kinerja pemerintah tidak hanya menghasilkan *output* semata, tetapi juga harus mengarah pada *outcome* atau manfaat daripada *output* tersebut. Deputi Bidang IGT sudah mengantisipasi kondisi tersebut melalui perencanaan program yang matang, pemantauan pelaksanaan kegiatan yang ketat dan sistematis, serta penerapan/uji coba hasil produk untuk menguji nilai kemanfaatan produk. Program-program yang jelas *outcome* atau manfaatnya pada tahun sebelumnya, dilanjutkan pada tahun 2021 dengan terus memacu atau menambah nilai kebergunaannya. Capaian kinerja tahun sebelumnya yang bermanfaat langsung pada masyarakat, menjadi salah satu program penting Deputi Bidang IGT, sekaligus menjaga kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Deputi Bidang IGT menyadari bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan di atas tidak mudah karena program dan kegiatan juga harus mampu menjawab isu-isu strategis nasional seperti percepatan tata ruang wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut melalui kerja keras dan nyata oleh seluruh elemen sumberdaya manusia di Deputi Bidang IGT.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang IGT merupakan satu unit Eselon I dari tiga kedeputian dan satu sekretariat di BIG.

2. Tugas

Dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, beserta perubahannya Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2020, Deputi Bidang IGT mempunyai tugas dalam merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT).

3. Fungsi

Berdasarkan tugas tersebut, DIGT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial tematik;
- c. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan Informasi Geospasial meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik merupakan unit kerja eselon I di BIG. Untuk melaksanakan tugasnya didukung oleh dua pusat yaitu Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (Pusat PIT) dan Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Pusat PTR).)

1. Pusat PIT bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik.
2. Pusat PTR bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas.

Secara teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat PIT didukung oleh 3 (tiga) koordinator yaitu Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan IGT,

Koordinator Penyelenggaraan IGT Strategis, dan Koordinator IGT Bidang Kebencanaan dan beberapa jabatan fungsional. Sedangkan di Pusat PTRA didukung oleh 3 (tiga) koordinator yaitu Koordinator Pembinaan Pemetaan Tata Ruang, Koordinator Integrasi Informasi Geospasial Tematik Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, dan Koordinator Atlas. Dalam pelaksanaan kerja, dua pusat tersebut saling bekerjasama dan berkolaborasi satu sama lain.



Gambar 1. Struktur organisasi Kedeputian berdasar Perka BIG No. 8 Tahun 2020



Gambar 2. Struktur organisasi Kedeputian berdasar Renstra Deputi Bidang IGT Tahun 2020-2024

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

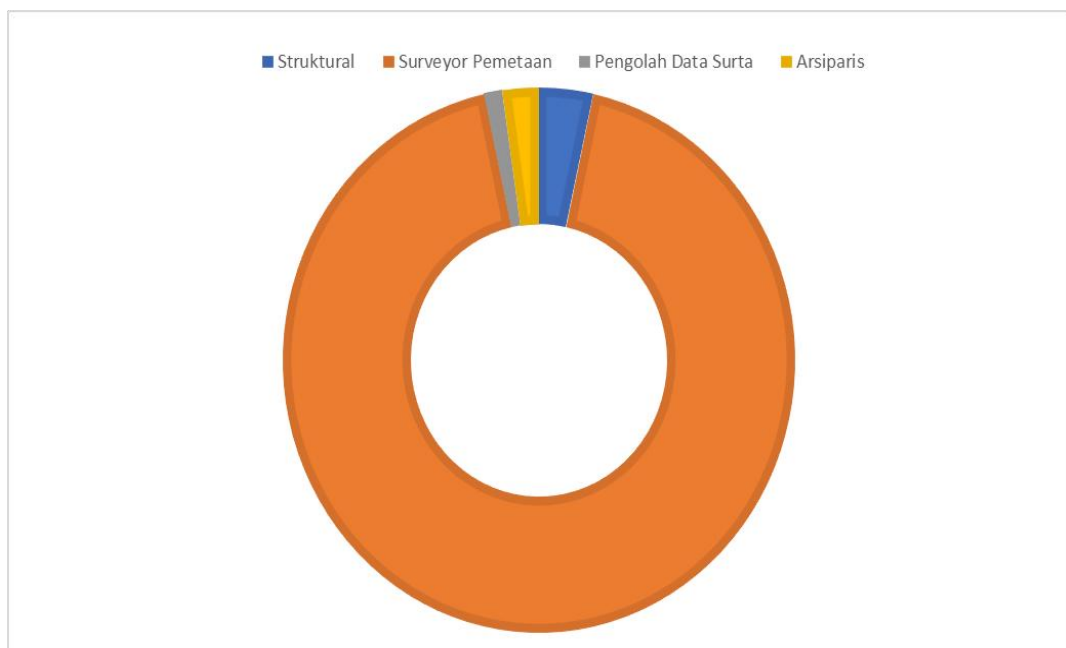
Sumber Daya Manusia (SDM) Kedeputian Bidang IGT secara keseluruhan per 31 Desember 2021 berjumlah 88 personil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 orang

menduduki jabatan struktural dengan perincian : Eselon I sebanyak 1 orang dan Eselon II sebanyak 2 orang. Sementara itu, sisanya sebanyak 85 personil lainnya mengikuti jenjang karir dan kepangkatan melalui jabatan fungsional tertentu sesuai rincian yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM Kedeputan Bidang IGT berdasarkan jabatan

Jabatan	Jumlah	%
1. Struktural	3	3,41
2. Surveyor Pemetaan	82	93,18
3. Pengolah Data Surta	1	1,14
4. Arsiparis	2	2,27
Jumlah	88	100,00

Sumber: Bag. Kepegawaian BIG, 31 Desember 2021



Sumber: Bag. Kepegawaian BIG, 31 Desember 2021

Gambar 3. SDM Kedeputan Bidang IGT berdasarkan jabatan

Komposisi pegawai di Deputi Bidang IGT berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang tercantum pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. SDM Kedepujian Bidang IGT berdasarkan tingkat pendidikan

Jabatan	Jumlah	%
1. Strata 3	6	6,82
2. Strata 2	26	29,55
3. Strata 1	47	53,41
4. Diploma	1	1,14
5. SMA	8	9,09
Jumlah	88	100,00

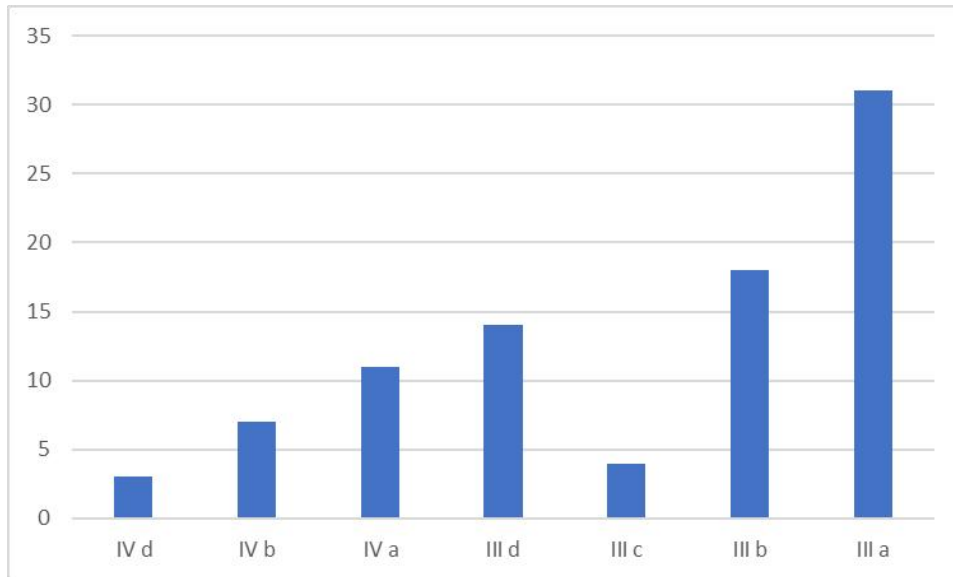
Sumber: Bag. Kepegawaian BIG, 31 Desember 2021

Rincian jumlah SDM DIGT berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. SDM Kedepujian Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan

Golongan/Ruang		Jumlah	%
Pembina Utama	IV d	3	3,41
Pembina Tingkat I	IV b	7	7,95
Pembina	IV a	11	12,50
Penata Tingkat I	III d	14	15,91
Penata	III c	4	4,55
Penata Muda Tingkat I	III b	18	20,45
Penata Muda	III a	31	35,23
Jumlah		88	100,00

Sumber: Bag. Kepegawaian BIG, 31 Desember 2021



Sumber: Bag. Kepegawaian BIG, 31 Desember 2021

Gambar 4. SDM Kedeputan Bidang IGT berdasarkan pangkat dan golongan

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Deputi Bidang IGT memiliki posisi strategis terkait perannya dalam pembinaan IGT. Setidaknya ada dua peraturan terkait posisi tersebut yaitu pertama, keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000, yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 21 Desember 2015. Dua aturan tersebut, semakin mempertegas posisi strategis Deputi Bidang IGT sebagai salah satu pengawal paket kebijakan tersebut. Posisi strategis Deputi Bidang IGT dapat dilihat juga dalam keterlibatannya dalam kegiatan verifikasi luas lahan sawah sebagai dukungan terhadap upaya perbaikan data produksi beras nasional sesuai dengan surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor B.361/Setwapres/D-2/KH.00.000/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang perbaikan data produksi beras nasional.

Inpres Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa BIG melakukan percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT) kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instruksi tersebut sangat jelas menjabarkan bahwa BIG, dalam hal ini Deputi Bidang IGT mendapat tugas strategis untuk mempercepat pengintegrasian IGT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa peta wajib dikonsultasikan kepada BIG, dalam hal ini DIGT. Kewajiban daerah dalam mengkonsultasikan kualitas peta rencana tata ruang, jelas menunjukkan posisi strategis DIGT sebagai penjamin kualitas peta rencana tata ruang yang akurat.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Perpres No. 23/2021) tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Perpres No. 23/2021 memuat target pemenuhan terhadap 158 IGT (85 Pemutakhiran IGT dan 73 Perwujudan IGT) yang diselenggarakan oleh 24 K/L dan melibatkan 34 Pemerintah Provinsi. Implementasi Perpres tersebut memiliki dampak besar terhadap perekonomian dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi dalam berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam. Penetapan Perpres tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. Di sisi lain, kegiatan tersebut dikawal bersama oleh Kantor Staf Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai komitmen bersama dalam upaya perbaikan tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.

Sesuai dengan amanat Rakornas IG tahun 2018, KSP. Deputi Bidang IGT memiliki posisi strategis terkait peta tematik skala besar, terutama peta tematik untuk mendukung penataan ruang khususnya Rencana Detail Tata Ruang dan pelestarian sumberdaya alam. Sebagai contoh nyata adalah terbitnya surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor B.361/Setwapres/D-2/KH.00.000/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang perbaikan data produksi beras nasional, merupakan perintah kepada BIG untuk menyediakan IGT yang dapat digunakan sebagai acuan untuk

verifikasi luas lahan baku sawah pada skala 1:10.000 – 1:5.000. Informasi tersebut akan digunakan untuk perbaikan data produksi beras nasional.

1.6. ISU STRATEGIS

Sebagai institusi yang bergerak dalam pembinaan dan pengintegrasian IGT, maka Deputy Bidang IGT memandang isu-isu nasional dan daerah terutama terkait keruangan dan sumberdaya alam sangat strategis dan semakin kompleks. Beberapa isu nasional dan daerah sering mencuat seperti permasalahan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), konflik pemanfaatan ruang, menurunnya kedaulatan/kemandirian pangan, dan peristiwa bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Deputy Bidang IGT melalui tugas dan fungsinya mempunyai peran strategis untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Konflik pemanfaatan ruang berakar pada ketidakpastian hukum atas ruang. Deputy Bidang IGT terus berupaya melakukan terobosan dan percepatan agar konflik tersebut dapat diminimalkan. Implementasi Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016) dan percepatan penyelesaian tata ruang pada semua tingkatan merupakan upaya taktis Deputy Bidang IGT agar konflik pemanfaatan ruang dapat diselesaikan.

Selain itu, kejadian bencana yang sering terjadi, baik bencana alam karena perubahan iklim dan faktor antropogenik, merupakan isu strategis yang berdampak luas pada masyarakat. Deputy Bidang IGT melakukan berbagai upaya strategis untuk membantu meminimalkan dampak bencana alam dengan melakukan pendataan berbasis spasial atau penyusunan peringatan dini banjir dan melakukan reaksi cepat langsung ke daerah bencana untuk memetakan dampak yang terjadi. Seperti yang dilakukan pada bencana banjir bandang akibat Siklon Seroja di Malaka, NTT. Isu-isu strategis tersebut bersifat destruktif dan berdampak luas pada masyarakat, yang harus diselesaikan oleh semua pihak, termasuk Deputy Bidang IGT.

Penurunan ketahanan/kedaulatan pangan tidak terlepas dari konflik pemanfaatan ruang terutama alih fungsi lahan produktif menjadi penggunaan lahan non pertanian terutama untuk permukiman dan industri. Indikator penurunan tersebut dapat dilihat dari semakin minimnya lahan produktif akibat perkembangan kota/kawasan terbangun. Terkait kondisi tersebut, Deputy Bidang IGT berperan serta dalam pembinaan dan pengintegrasian IGT tematik terkait ketersediaan lahan pangan dan membangun model spasial perubahan penggunaan lahan.

SDGs sebagai isu strategis internasional yang telah diadopsi secara nasional menjadi bagian penting dan tantangan Deputy Bidang IGT. SDGs memuat 4 pilar pembangunan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola. Empat pilar tersebut terbagi dalam 17 tujuan, 169 target dengan indikator terukur yang perlu diselesaikan semua K/L/daerah, swasta, dan masyarakat.

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan semakin mempertegas keterlibatan semua K/L/daerah untuk memenuhi target SDGs yang dicanangkan sampai tahun 2030. Bila dirunut lebih jauh, 17 tujuan SDGs merupakan aspek-aspek/bagian-bagian tematik seperti kemiskinan, pendidikan, kota dan permukiman berkelanjutan, ekosistem laut dan darat, dan tematik-tematik perikehidupan lainnya (Gambar 5). Kebutuhan akan IGT untuk mendukung tercapainya target SDGs, jelas merupakan tugas bersama termasuk peran penting Deputy Bidang IGT. Skema SDGs dan kebutuhan akan IGT tersaji dalam Gambar 6.



Gambar 5. Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

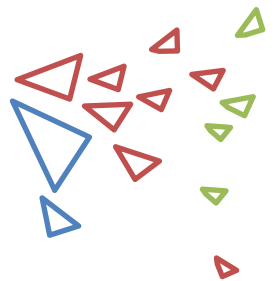


Gambar 6. Skema SDGs dan kebutuhan akan IGT



Merapi, Yogyakarta (Foto: DB IGT)

Bab 2 Perencanaan Kinerja



2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang ingin dicapai. Berikut adalah visi pembangunan nasional berdasar pada Nawacita Kedua tahun 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Strategi pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan tahun 2020-2024 dilakukan melalui 5 (lima) dimensi pembangunan nasional, yaitu:

- a. Dimensi pembangunan SDM, yang terdiri dari layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter;
- b. Dimensi pembangunan infrastruktur, yang terdiri dari infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagakerjaan, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk transformasi digital;
- c. Dimensi penyederhanaan regulasi, yang terdiri dari pendekatan Omnibus Law dan pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun;
- d. Dimensi penyederhanaan birokrasi yang terdiri dari penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan *E-Government*, dan reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan, dan kepelabuhan;

- e. Dimensi transformasi Ekonomi yang terdiri dari industrialisasi; pengembangan destinasi unggulan, dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Peran Informasi Geospasial menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antar wilayah, termasuk pembangunan desa, penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar bagi masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang difokuskan pada sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata. Peran tersebut diantaranya dapat diberikan dalam bentuk kontribusi Deputi Bidang IGT dalam mengisi dimensi pembangunan nasional yaitu:

- a. Deputi Bidang IGT telah berkontribusi dalam mengisi dimensi pembangunan manusia khususnya dalam memberikan pembinaan/pembekalan yang dibutuhkan oleh penyelenggara IGT lainnya berupa penyiapan kebijakan dan standar yang diperlukan, menjadi integrator dengan melaksanakan koordinasi antar K/L/P penyelenggaraan IGT, serta memberikan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan tata ruang wilayah baik provinsi, kabupaten/kota maupun RDTR. Pembinaan juga dilakukan kepada pengguna IG seperti pembinaan IG kepada peserta didik (sektor pendidikan) dan disabilitas netra.
- b. Deputi Bidang IGT telah berkontribusi dalam mengisi dimensi pembangunan sektor unggulan khususnya dalam bidang kedaulatan pangan, maritim dan kelautan maupun pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus, perencanaan tata ruang wilayah termasuk wilayah perbatasan/strategis.
- c. Deputi Bidang IGT telah berkontribusi dalam mengisi dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya penyediaan IG yang dibutuhkan dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional.

2.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIG 2020-2024

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi maka visi BIG adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Berhasil Guna dan Berdaya Guna dalam

Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Sesuai visinya, BIG harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pengguna dan mampu membuat terobosan kreatif sebagai upaya menjadi penggerak utama penyelenggaraan informasi geospasial. Secara khusus bagi Deputi Bidang IGT, kata “pembina” mengandung arti bahwa Deputi Bidang IGT BIG mampu memberikan pembinaan/pembekalan yang dibutuhkan oleh penyelenggara lain. Pembinaan berupa kebijakan, standar yang diperlukan serta menjadi integrator dengan melaksanakan koordinasi antar K/L/P penyelenggaraan IGT. Oleh karena itu salah satu misi BIG adalah menyediakan IGD dan mengintegrasikan IG wilayah nasional. Untuk menghindari tumpang tindih IGT diperlukan Kebijakan Satu Peta/KSP (*one map policy*).

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah dikawal oleh Deputi Bidang IGT sejak program ini diluncurkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi IG berjalan secara baik dalam mendukung pembangunan nasional berbasis kewilayahan. Selain itu KSP ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan nasional, seperti konflik lahan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemetaan tematik yang dilakukan di atas peta dasar yang sama (*superimpose*) serta integrasi peta tematik untuk mendukung pembangunan nasional merupakan upaya integrasi dan sinkronisasi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan KSP.

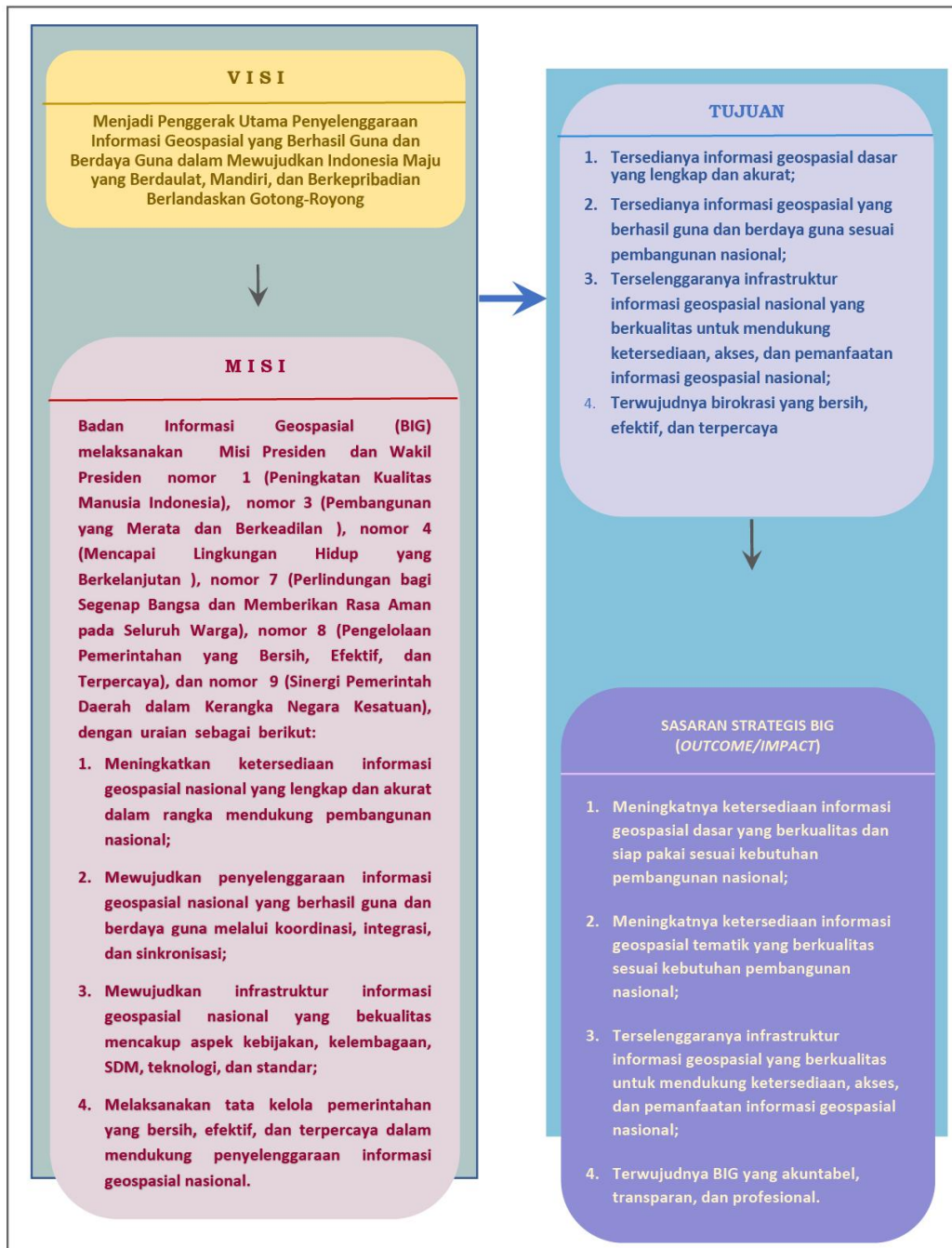
Dari visi dan misi BIG tersebut diatas, maka tujuan organisasi BIG adalah:

1. Tersedianya informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat.
2. Tersedianya informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional.
3. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

Dalam rangka mewujudkan strategi organisasi maka BIG menentukan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional.
2. Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional.
3. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional.
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Berikut adalah gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BIG tahun 2020-2024 yang disusun untuk menunjukkan tahapan pencapaian visi secara jelas sehingga apa yang harus dicapai BIG setiap tahun dapat terpetakan berdasarkan prioritas.



Sumber: Dokumen Renstra BIG 2020-2024

Gambar 7. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam struktur Rencana Strategis BIG 2020-2024

Berdasarkan *roadmap* strategi Badan Informasi Geospasial, pada Tahun 2019 Deputi Bidang IGT berperan penting dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

2.3. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG IGT 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kedeputan Bidang IGT 2020 – 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang ada di lingkup nasional serta arah kebijakan dan strategi yang ada di lingkup Badan Informasi Geospasial. Hal ini bertujuan agar arah kebijakan dan strategi Kedeputan Bidang IGT memiliki benang merah dan mengarah secara strategis.

2.3.1. Visi dan Misi

Visi Deputi Bidang IGT mengacu kepada Visi Badan Informasi Geospasial yang tertera pada Dokumen Renstra Badan Informasi Geospasial tahun 2020 – 2024, yaitu:

“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Berhasil Guna dan Berdaya Guna dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Visi Deputi Bidang IGT menjabarkan, selaras, dan mendukung visi BIG dan sesuai kebijakan nasional seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sebagai *leading sector* dalam IGT, maka visi Deputi Bidang IGT berdimensi nasional atau dalam konteks ini tidak sekadar untuk internal BIG tetapi untuk memenuhi kepentingan nasional terutama IG tematik. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Deputi Bidang IGT juga mengacu kepada Misi Badan Informasi Geospasial, yaitu:

“Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), nomor 4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya), dan nomor 9 (Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan), dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan ketersediaan informasi geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional;**
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;**
- 3. Mewujudkan infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, teknologi, dan standar;**

4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional.”

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka diperlukan program kerja di Deputi Bidang IGT sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara IGT agar mampu menghasilkan IGT yang memenuhi kriteria penyelenggaraan IGT yang terstandar dan dapat berbagi pakai;
2. Meningkatkan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan IGT yang berdaya guna dan berhasil guna untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan pelayanan prima dalam kerangka pelaksanaan capaian reformasi birokrasi.

2.3.2. Tujuan

Rencana Strategi Deputi Bidang IGT tahun 2021 masih mengacu pada Renstra DBIGT tahun 2020-2024. Tujuan Deputi Bidang IGT yang mengacu pada tujuan Badan Informasi Geospasial selama kurun waktu 2020 – 2024 adalah:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggara IGT agar mampu menghasilkan IGT yang memenuhi kriteria penyelenggaraan IGT yang terstandar dan dapat diberbagipakaikan.
2. Peningkatan kapasitas Pengguna IG dalam pemanfaatan IG yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pelayanan prima dalam kerangka pelaksanaan capaian reformasi birokrasi.

2.3.3. Sasaran Program

Sasaran program merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan strategi organisasi. Sasaran program Deputi Bidang IGT pada Tahun Anggaran 2021 sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan pada aplikasi *Balance Score Card* (BSC). Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan kinerja yang dilakukan antara pemberi amanah

dan penerima amanah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan adanya PK adalah sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan komitmen kinerja aparatur. PK juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian, penghargaan, sanksi dan dasar evaluasi kinerja aparatur.

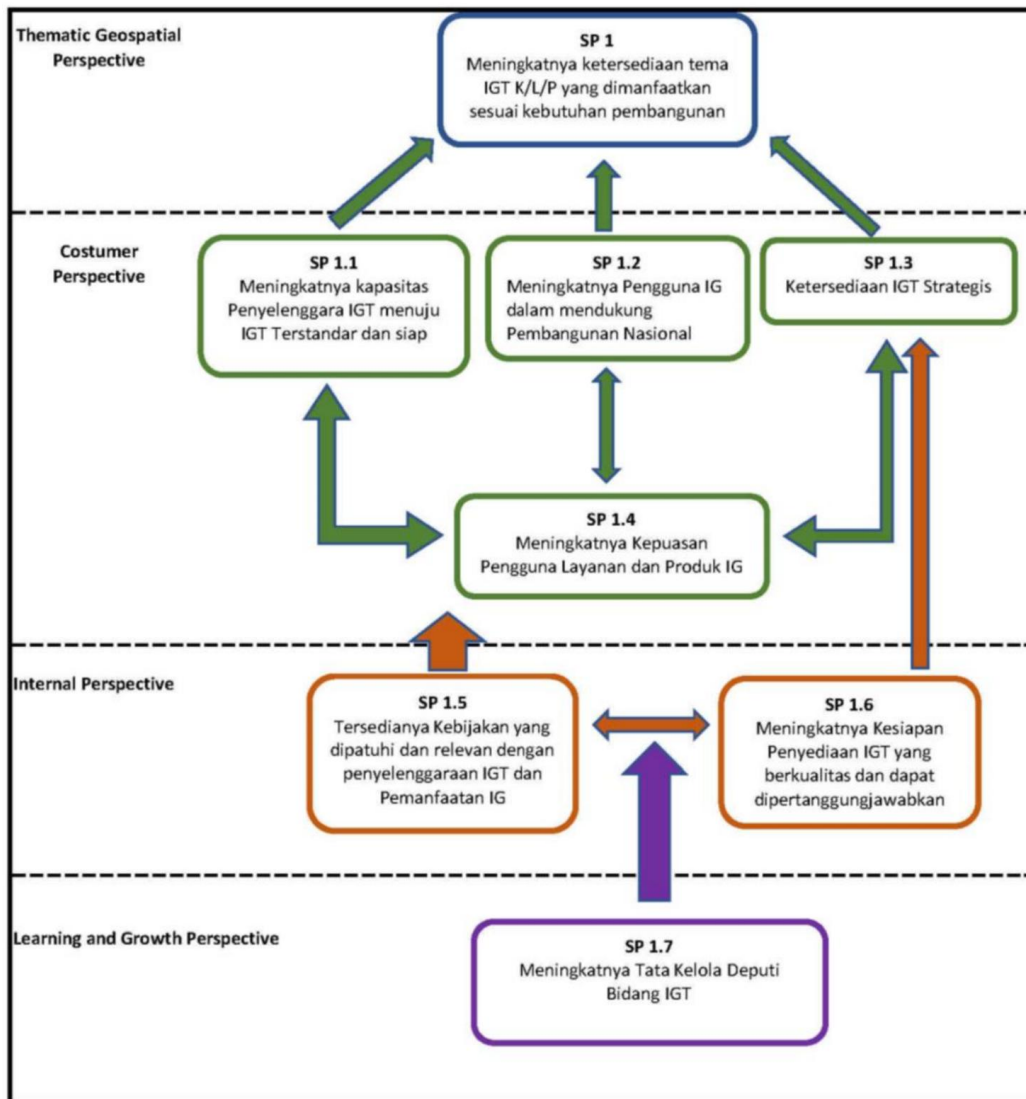
PK Deputy Bidang IGT tahun 2021 ditandatangani dua kali karena adanya pergantian pejabat dilingkungan BIG dan perubahan lain yang mempengaruhi kinerja. Secara umum Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Deputy BIGT Tahun 2021 tidak mengalami banyak perubahan, hanya saja anggaran untuk kedua pusat (PPIT dan PPTRA) mengalami perubahan karena program penghematan oleh pemerintah. Berikut PK Deputy BIGT Tahun 2021:

1. PK Deputy Bidang IGT yang telah ditandatangani bersama antara Plt. Kepala BIG dan Deputy Bidang IGT tanggal 15 Desember 2020.



Gambar 8. PK Deputy Bidang IGT yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2020

2. PK Deputy Bidang IGT yang ditandatangani antara Kepala BIG dengan Deputy Bidang IGT tanggal 16 Agustus 2021.



Sumber: Dokumen Renstra DBIGT 2020-2024

Gambar 10. Peta Strategi Deputy Bidang IGT

Untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang IGT diperlukan perencanaan kinerja. Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai perjanjian kinerja yang dituangkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai, Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) menetapkan 1 (satu) Sasaran Program untuk Tahun 2021. Sasaran program Deputy Bidang IGT merupakan turunan dari sasaran strategis Badan Informasi Geospasial. Sasaran program Deputy Bidang IGT ini tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program dan Target 2020-2024

Sasaran Program		IKP	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
SP 1	Meningkatnya ketersediaan tema IGT K/L/P yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) ketersediaan informasi geospasial tematik (IGT) yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional.	%	10	30	50	60	70
SP 1.1	Meningkatnya kapasitas Penyelenggara IGT menuju IGT Terstandar dan siap diberbagipakai	Persentase (%) status IGT terstandar dan siap diberbagipakai terhadap IGT Rencana Aksi	%	10	30	50	60	70
SP 1.2	Meningkatnya Pengguna IG dalam mendukung Pembangunan Nasional	Persentase (%) jumlah Pengguna IG terhadap jumlah K/L/D	%	10	30	50	60	70
SP 1.3	Ketersediaan IGT Strategis	Persentase (%) Jumlah IGT yang dimanfaatkan terhadap Produk DBIGT	%	40	60	70	80	90
SP 1.4	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan dan Produk IG	Indeks Kepuasan terhadap layanan pembinaan dan produk IG	Skala Likert	4	4	3.7	3.8	3.9
SP 1.5	Tersedianya Kebijakan yang dipatuhi dan relevan dengan penyelenggaraan IGT dan Pemanfaatan IG	Persentase (%) Kebijakan IGT yang dipatuhi dan relevan dengan penyelenggaraan IGT dan pemanfaatan IG terhadap Kebijakan yang dibuat	%	70	80	90	100	100
SP 1.6	Meningkatnya Kesiapan Penyediaan IGT yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase (%) pemenuhan tema/cakupan IGT yang dibutuhkan terhadap total kebutuhan IGT Nasional	%	60	60	60	60	60
SP 1.7	Meningkatnya Tata Kelola Deputi	Indeks Tata Kelola Unit	Indeks	7	7.5	8	8	9

Sasaran Program		IKP	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Bidang IGT	Deputi Bidang IGT						

Sumber: Dokumen Renstra DBIGT 2020-2024

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan yang ada di bawahnya untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) dan Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik pada tanggal 15 Desember 2020. Kemudian ada pencabutan PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. sehingga dilakukan revisi target Perjanjian Kinerja di pertengahan tahun berjalan.

Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tanggal 16 Agustus 2021.

Tabel 5. Isian Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target awal PK 15 Des 2020	Target revisi PK 16 Agustus 2021
1	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	8,36%	52.49%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target awal PK 15 Des 2020	Target revisi PK 16 Agustus 2021
		Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	45,10%	50.01%

Sumber: Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja DBIGT 2021

2.5. METODE PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA

Setiap sasaran program harus terukur melalui indikator yang jelas sehingga kinerja sebuah organisasi dapat akuntabel. Deputi Bidang IGT berusaha mencapai target sasaran dengan indikator yang terukur menggunakan rumus yang telah disepakati dan bisa dijalankan secara operasional.

Setiap Sasaran Program (SP) harus berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BIG. SP diukur melalui indikator kinerja program yang jelas sehingga kinerja sebuah organisasi dapat akuntabel. Deputi Bidang IGT berusaha mencapai target sasaran program dengan indikator yang terukur menggunakan rumus yang telah disepakati dan dapat dijalankan secara operasional.

1. Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)

Sasaran Program	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional
IKU atasan	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Program	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional

<p>Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang telah dibina meliputi IGT terstandar, IGT terbina, dan Rekomendasi Peta RTR. 2. Rekomendasi tema IGT terstandar adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BIG apabila penyelenggaraan IGT di walidata sudah sesuai dengan standar yang ada dengan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat standar penyelenggaraan IGT (standar proses dan standar output) - Telah dilaksanakan implementasi standar - Produk sesuai dengan dokumen standar 3. Perbandingan antara jumlah rekomendasi IGT Terstandar akumulatif dari tahun 2019 sampai tahun berjalan terhadap jumlah keseluruhan target Pembinaan IGT sesuai Peraturan Kepala BIG no 27 tahun 2019 dan peraturan terbaru 4. Jumlah tema IGT berdasarkan Peraturan Kepala BIG no 27 tahun 2019 dan peraturan terbaru 5. Rekomendasi IGT terstandar diperoleh melalui mekanisme pendampingan 6. Rekomendasi tema IGT terbina adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BIG apabila penyelenggaraan IGT di walidata sudah siap berbagipakai dengan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen kontrol kualitas - Terdapat metadata - Struktur data sesuai dengan KUGI 7. Perbandingan antara jumlah rekomendasi IGT Terbina akumulatif dari 2019 sampai tahun berjalan terhadap jumlah keseluruhan target Pembinaan IGTsesuai Peraturan Kepala BIG no 27 tahun 2019 dan peraturan terbaru. 8. Rekomendasi IGT terbina diperoleh melalui mekanisme pendampingan. 9. Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang rekomendasi peta dasar untuk penyusunan RTR yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. 10. Perbandingan antara jumlah rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan RTR akumulatif sampai tahun berjalan (sampai tahap C4) terhadap jumlah keseluruhan target Rekomendasi secara nasional (sampai tahap C4) 11. Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang diperoleh melalui mekanisme Asistensi dan Supervisi kepada pemerintah daerah 12. Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan RTR dihitung sampai tahap C4 (selesai peta dasar) Tahapan Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang:
------------------------	--

	<p>C1: Sumber data belum selesai, C2: Jenis Sumber Data Sesuai, C3:Selesai Koreksi Geometris, C4: Selesai Peta Dasar</p> <p>13. Total target Rekomendasi secara nasional (jumlah rencana tata ruang yang belum rekomendasi dengan baseline 2020= 1.138 dengan rincian: RTRW Nasional=1, RTRW P/K=232, RDTR= 881, KSP=10, KSN=13, KEK/KI= 1)</p> <p>Bobot untuk Pembinaan IGT 50% dan rekomendasi peta RTR 50% adalah karena keduanya memiliki beban yang sama.</p> <p>Bobot untuk IGT terstandar 50% dan IGT terbina 100% karena IGT terstandar merupakan tahap awal dari pembinaan hingga proses pembuatan standar, sedangkan IGT terbina hingga siap berbagi pakai.</p>
Formula/Cara Menghitung	50% Pembinaan IGT + 50% Rekomendasi Peta RTR = 50%*(Persentase(0.5* % IGT terstandar tahun berjalan + % IGT Terbina tahun berjalan) + 50%*(Persentase Rekomendasi Peta Rencana Tata Ruang Kumulatif)
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Penanggung jawab IKU	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik 2. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
Polarisasi	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	Triwulanan

2. Indikator Kinerja Program 02 (IKP02)

Sasaran Program	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional
IKU atasan	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Program	Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan informasi geospasial tematik strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional

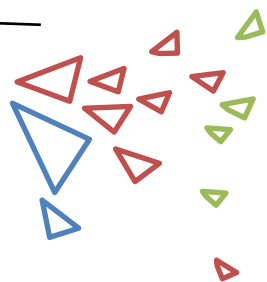
<p>Definisi</p>	<p>IGT strategis merupakan IGT yg diselenggarakan oleh BIG dalam rangka memenuhi penugasan dari pemerintah atau pimpinan. IGT Strategis yang diselenggarakan pada tahun Renstra 2020-2024 terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IGT Strategis yang terdiri dari 10 tema: <ol style="list-style-type: none"> a. IGT Sistem Lahan Skala 1:50.000 b. IGT Rawan Banjir, c. IGT Potensi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil, d. IGT Multirawan Terintegrasi, e. IGT Deformasi Terintegrasi, f. Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan (SRC), g. IGT Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS), h. IG Strategis Dinamika Sumberdaya, i. IGT Integrasi Spasial Statitik, j. IGT Neraca Spasial Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 2. Atlas terdiri dari 8 tema: <ol style="list-style-type: none"> a. Atlas Geospasial Indonesia : Wilayah, Fisik dan Lingkungan Alam (2020) b. Atlas Geospasial Indonesia : Sejarah, Suku dan Budaya Bangsa (2021) c. Atlas Geospasial Indonesia : Sosial Ekonomi dan Penduduk (2022) d. Atlas Geospasial Indonesia : Potensi dan Sumberdaya Alam (2023) e. Atlas Geospasial Indonesia : Keanekaragaman Hayati (2024) f. Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gununggapi g. Atlas Indikator TPB h. Atlas Taktual Indonesia <p>Bobot untuk IGT Strategis adalah 80% karena diperlukan analisis untuk mencapai outputnya. Bobot untuk Atlas adalah 20% karena menitikberatkan pada unsur kartografi dan <i>story telling</i>. Persentase cakupan wilayah IGT dihitung berdasarkan luasan cakupan wilayah per tema secara akumulasi pada tahun berjalan dibagi total target luasan cakupan wilayah per tema secara nasional.</p>
<p>Formula/Cara Menghitung</p>	<p>$80\% * (\% \text{ Capaian IGT Strategis}) + 20\% * (\% \text{ Capaian Atlas})$ atau $80\% * ((\% \text{ IGT Sistem Lahan Skala 1:50.000} + \% \text{ IGT Rawan Banjir} + \% \text{ IGT Potensi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil} + \% \text{ IGT Multirawan Terintegrasi} + \% \text{ IGT Deformasi Terintegrasi} + \% \text{ Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan (SRC)} + \% \text{ IGT EWS} + \% \text{ IG Strategis Dinamika Sumberdaya} + \% \text{ IGT$</p>

	<p>Integrasi Spasial Statitik + % IGT Neraca Spasial Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup)/10)</p> <p>+</p> <p>20% * ((% AGI Tema 1 + % AGI Tema 2 + % AGI Tema 3 + % AGI Tema 4 + % AGI Tema 5 + % Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi+ % Atlas Indikator TPB + % Atlas Taktual Indonesia)/8)</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Penanggung jawab IKU	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Sumber Data	Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
Polarisasi	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	Triwulanan



Pemotretan Udara (SRC) di Malaka, Nusa Tenggara Timur (Foto: DB IGT)

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas ini merupakan perwujudan kewajiban Deputi Bidang IGT untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk lebih meningkatkan kinerja Deputi Bidang IGT dimasa yang akan datang. Secara umum, bab ini akan membahas dua bagian yaitu capaian kinerja disertai evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi capaian anggaran.

2.1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IGT TAHUN 2021

Capaian kinerja diukur berdasarkan Manual Indikator Kinerja Program. Pada manual tersebut dijelaskan bagaimana mengukur capaian kinerja program Kedeputian Bidang IGT. Untuk setiap Sasaran Program (SP) dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target/sasaran dengan realisasi tahun 2021, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG IGT TAHUN 2021

Secara umum capaian kinerja Deputi Bidang IGT 2021 tergolong baik karena target setiap indikator kinerja sasaran program secara keseluruhan dapat terpenuhi. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran program yang merupakan gambaran telah berjalannya tugas dan fungsi Deputi Bidang IGT. Tabel 6 menunjukkan capaian kinerja Deputi Bidang IGT tahun 2021. Semua Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Tabel 6. Capaian sasaran program Deputi Bidang IGT Tahun 2021


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	52.49%	100%
		Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	50.01%	100%


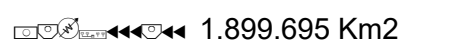
Untuk mendukung sasaran program di atas maka Deputi Bidang IGT telah menghasilkan output kegiatan yang diselenggarakan di lingkup Deputi Bidang IGT adalah sebagai berikut :

Output Kegiatan di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas


1. ABT.002. Kegiatan ini menghasilkan 20 (dua puluh) berita acara rekomendasi peta dasar dalam rangka penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
2. CBO.001. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) Buku Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi dengan cakupan 17.185 Km²
3. CBO.002. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) Buku Atlas Geospasial Indonesia dengan cakupan 1.899.695 Km².
4. CBO.003. Kegiatan ini menghasilkan 2 (dua) buku Atlas Indikator TPB Volume I Nasional dan Volume II Provinsi dengan cakupan 205.217 Km².

5. CBO.004. Atlas Taktual. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) Buku Atlas Taktual Nasional Indonesia dengan tema wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan cakupan 37.197 Km²

6. CBO.005.  133.157 Km²

 pedoman penyusunan neraca spasial penutup lahan nasional berdasarkan klasifikasi SEEA dan peta *prototype* neraca spasial penutup lahan nasional menggunakan klasifikasi SEEA  1.899.695 Km²

Output Kegiatan di Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

1. ABT.003  Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 1 rekomendasi kebijakan, yang mana telah dilakukan pembinaan terhadap: 1). Spesifikasi produk IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit yang mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi produk data; 2). Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit; 3). Dokumen Kontrol Kualitas Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit; 4). Dokumen Pemetaan partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit; dan 5). Uji Implementasi Spesifikasi IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau.
2. ABT.004 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar. Kegiatan ini menghasilkan output berupa 1 rekomendasi kebijakan.
3. ABT.005 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Terbina. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 2 rekomendasi kebijakan yaitu 1 rekomendasi IGT Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan 1 rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4. ABT.006 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 1 rekomendasi kebijakan, yang mana telah dilakukan pembinaan terhadap: 1). Spesifikasi produk IG Lahan Garam yang

mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi produk data; 2). Modul Penyelenggaraan IG Lahan Garam; 3). Dokumen SOP Penyelenggaraan IG Lahan Garam; 4). Bimbingan Teknis Penyelenggaraan IG Lahan Garam; 5). Uji implementasi Spesifikasi produk IG Lahan Garam; 6). Dokumen Kontrol Kualitas dan Dokumen Evaluasi Kualitas; 7). Bimbingan Teknis Kontrol Kualitas dan Penjaminan Kualitas IG Lahan Garam; 8). Bimbingan Teknis Penyusunan Metadata IG Lahan Garam; 9). Bimbingan Teknis Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik; dan 10). Pembinaan Penyelenggaraan IG Lahan Garam, dengan menerapkan kaidah Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia

5. ABT.007 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 1 rekomendasi kebijakan, yang mana telah dilakukan pembinaan terhadap: 1). Spesifikasi produk IG Kawasan Konservasi Perairan yang telah disahkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Kawasan Konservasi; 2). Workshop Penyusunan Peta Kawasan Konservasi Perairan; 3). Modul Perolehan Data dan Pengolahan Citra, Modul Perencanaan Kawasan Menggunakan Marzone, Modul Penyusunan Geodatabase, dan Modul Penyusunan *Layout* Peta Kawasan Konservasi; 4). Uji Implementasi Spesifikasi produk IG Kawasan Konservasi Perairan; dan 5). Dokumen Kontrol Kualitas dan Penjaminan Kualitas.
6. ABT.008 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 1 rekomendasi kebijakan, yang mana telah dilakukan pembinaan terhadap: 1). Spesifikasi produk IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi produk data; 2). Dokumen SOP Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan; 3). Dokumen Kontrol Kualitas; 4). Uji implementasi pengolahan data dan uji petik lapangan Spesifikasi produk IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan; 5). Penyusunan modul Petunjuk Teknis Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000; 6). Bimbingan Teknis Penyusunan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan 7). Dokumen Metadata IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.
7. ABT.009 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 1 rekomendasi kebijakan, yang mana telah dilakukan pembinaan terhadap: 1). Spesifikasi Produk IGT Risiko Banjir

sesuai SNI ISO 19131 Informasi Geospasial – Spesifikasi Produk Data; 2). Pembaharuan Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir; 3). Petunjuk Teknis Penyusunan Basis Data dan Metadata IGT Risiko Banjir; 4). Penyusunan dokumen kontrol kualitas IGT Risiko Banjir; dan 5). Uji implementasi standar IGT Risiko Banjir.

8. ABT.010 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa 1 rekomendasi kebijakan, yang mana telah dilakukan pembinaan terhadap: 1) Spesifikasi IGT Lahan Sawah Dilindungi yang mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi produk data; 2). Dokumen Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan Sawah yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Nomor 4 Tahun 2020; 3). Verifikasi Lahan Baku Sawah menjadi Lahan Sawah Terkoreksi dan Usulan Lahan Sawah Dilindungi pada 8 Provinsi (Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat); 4). Verifikasi Lahan Baku Sawah menggunakan citra SPOT 6/7 mosaik LAPAN (2021) menjadi Lahan Baku Sawah Terkoreksi pada 12 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau); dan 5). Verifikasi Lahan Baku Sawah menggunakan citra SPOT 6/7 mosaik LAPAN (2021) dan survei lapangan pada 13 Provinsi (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua).
9. CBO.007 IGT Peringatan Dini Banjir. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa IGT Peringatan Dini Banjir dengan cakupan wilayah 1.359,89 km² meliputi Kota Semarang (390,8 km²), Kota Samarinda (745,71 km²) dan Kota Bima (223,38 km²). *Output* yang dihasilkan melebihi 0,89 km² dari target awal yaitu 1.359 km².
10. CBO.008 Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000. Terdiri dari tiga kegiatan yang dilakukan yaitu 1) Pemetaan Sistem Lahan Skala 1:50.000 di empat provinsi (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur); 2) Penyusunan Struktur Basisdata Sistem Lahan 1:50.000; dan 3) Penyusunan Pedoman Survei Lapangan Sistem Lahan Skala 1:50.000. *Output* yang dihasilkan yaitu Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000 dengan cakupan wilayah 119.752 km².

11. CBO.009 Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu 1) Pemetaan potensi longsor di wilayah Cihanjuang, Kabupaten Sumedang (seluas 1,67 km²); 2) Pemetaan Monitoring Gumuk Pasir sebagai dasar Mitigasi Bencana Banjir dan Tsunami di Yogyakarta (seluas 5 km²); 3) Pemetaan Cepat Bencana Banjir di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai permintaan BNPB untuk melakukan pemetaan udara (seluas 16 km²); 4) Pemetaan analisis potensi bencana longsor di Kabupaten Sukabumi (seluas 3 km²); 5) Pemetaan wilayah terdampak Banjir di Jasinga, Kab. Bogor (seluas 0,5 km²); dan 6) Survey Validasi Lapangan dan Pemetaan Wilayah Tambang di Wilayah Gunung Merapi (seluas 0,5 km²).

Pelaksanaan dan capaian output di atas untuk mendukung sasaran program seperti dijabarkan dalam Tabel 7 Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT di halaman selanjutnya:

Tabel 7. Ringkasan Capaian Sasaran Program Deputi BIGT 2021

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Keterangan Output		Capaian kinerja sasaran program	keterangan
					Rincian Output	Volume output		
1	Meningkatnya ketersediaan tema informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	IKP01. Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibangun sesuai kebutuhan pembangunan nasional	52.49 %	PPTRA	ABT.001. Bantuan Teknis Rekomendasi Peta Rencana Detil Tata Ruang	100 Rekomendasi Kebijakan	-	RO telah dihapus
					ABT.002. Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang	20 Rekomendasi Kebijakan	100%	20 BA rekomendasi peta dasar untuk Penyusunan Peta Tata Ruang telah terealisasi 100%
				PPIT	ABT.003. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Keterangan Output		Capaian kinerja sasaran program	keterangan
					Rincian Output	Volume output		
					ABT.004. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.005. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Ijin Lokasi Terbina	2 Rekomendasi Kebijakan	100%	2 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.006. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.007. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.008. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.009. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.010. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Keterangan Output		Capaian kinerja sasaran program	keterangan
					Rincian Output	Volume output		
		IKP02. Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	50.01 %	PPTRA	CBO.001. Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	17.185 km ²	100%	1 (satu) Buku Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi dengan cakupan 17.185 km ²
					CBO.002. Atlas Geospasial Indonesia	1.899.695 km ²	100%	1 (satu) Buku Atlas Geospasial Indonesia dengan cakupan 1.899.695 km ² .
					CBO.003. Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	205.217 km ²	100%	2 (dua) buku Atlas Indikator TPB Volume I Nasional dan Volume II Provinsi dengan cakupan 205.217 km ² .
					CBO.004. Atlas Taktual Indonesia	37.197 km ²	100%	1 (satu) Buku Atlas Taktual Nasional Indonesia dengan tema wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan cakupan 37.197 km ²
					CBO.005. IGT Integrasi Spasial-Statistik	133.157 km ²	100%	prototype SDGs Level Desa dengan cakupan 133.157 km ²
					CBO.006. IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup	1.899.695 km ²	100%	pedoman penyusunan neraca spasial penutup lahan nasional

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Keterangan Output		Capaian kinerja sasaran program	keterangan
					Rincian Output	Volume output		
								berdasarkan klasifikasi SEEA dan peta prototype neraca spasial penutup lahan nasional menggunakan klasifikasi SEEA dengan cakupan 1.899.695 km ²
				PPIT	CBO.007. IGT Peringatan Dini Banjir	1.359,89 km ²	100,06%	IGT Peringatan Dini Banjir dengan cakupan wilayah 1.359,89 km ²
					CBO.008. Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000	119.752 km ²	100%	Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000 dengan cakupan wilayah 119.752 km ²
					CBO.009. Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	34,17km ²	113,9%	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan dengan cakupan wilayah 34,17 km ²

Sumber: Capaian Kegiatan DBIGT Tahun 2021

3.1.2. CAPAIAN KINERJA 2021 DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh capaian kinerja program Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tahun 2021 telah tercapai dengan baik. Sasaran Program Deputi BIGT juga telah berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kepala BIG. Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Renstra BIG tahun 2020-2024 belum menjadi dokumen sah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ataupun Perjanjian Kinerja, sehingga rencana BIG 2020 masih berpedoman Renstra BIG tahun 2015- 2019. Oleh karena itu, Rencana Strategi Deputi Bidang IGT tahun 2020 masih mengacu pada Renstra Deputi Bidang IGT tahun 2015-2019. Sedangkan Rencana Kerja atau Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra BIG tahun 2020-2024. Merujuk Renstra Deputi Bidang IGT tahun 2020-2024 maka sasaran program Deputi Bidang IGT tahun 2021 yaitu meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional sudah mencakup sasaran program renstra Deputi Bidang IGT tahun 2020 dimana masih menggunakan acuan Renstra Deputi Bidang IGT tahun 2015-2019. Perbedaan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Perjanjian Kinerja ini menyebabkan perbedaan penyusunan sasaran program dan indikator kinerja yang mengakibatkan capaian kinerja di tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disandingkan sebagai dasar perbandingan capaian sasaran program. Berikut tabel perbandingan capaian tahun 2020 dengan 2021.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Sasaran Program Deputi Bidang IGT Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kontribusi IGT dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan masyarakat.	Rasio pemenuhan IGT dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan daerah serta masyarakat terhadap total IGT yang dihasilkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya IGT yang terintegrasi dan dimanfaatkan dalam proses sinkronisasi KSP nasional.	Rasio IGT yang terintegrasi terhadap total target KSP	99%	99%	100%
		Rasio IGT yang masuk dalam proses sinkronisasi dalam KSP terhadap total IGT yang telah terintegrasi.	100%	100%	100%
3	Terwujudnya IGT yang andal dalam mendukung pembangunan nasional.	Indeks keandalan IGT	9 (Skala likert 1-10)	9 (Skala likert 1-10)	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
		Rasio peraturan penyelenggaraan IGT yang terimplementasi terhadap total penyelenggaraan IGT yang tersedia	85%	82%	96,25%

Sumber: Capaian Kegiatan Deputi Bidang IGT Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	52.49%	52.49%	100%
		Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	50.01%	50.01%	100%

Sumber: Capaian Kegiatan Deputi Bidang IGT Tahun 2021

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja sasaran program Deputi Bidang IGT dikaitkan dengan indikator kerjanya. Berikut diuraikan sasaran program yang disertai dengan capaian indikator kinerja sasaran program kegiatan Deputi Bidang IGT tahun 2021. Angka capaian akan disertai dengan contoh-contoh hasil yang telah dilaksanakan.

3.2.1. SASARAN PROGRAM



Meningkatnya ketersediaan tema informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional

ran

Program Deputi Bidang IGT pada Tahun 2021 ini adalah meningkatnya ketersediaan tema IGT sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu IKP01 Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan IKP02 Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan informasi geospasial tematik strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Sasaran Program di *cascading* ke kedua pusat yaitu PPIT dan PPTRA.

Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)

Indikator Kinerja Program 01 memiliki target 52.49%, dimana indikator kinerja program dinyatakan dengan persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional. IKP01 dapat terealisasi 52.49% sehingga capaian kinerja (realisasi/target) sebesar 100%.

Tabel 9. Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	%	52.49	52.49	100% (tercapai)

Perhitungan capaian kinerja diperoleh dengan cara :

$$\begin{aligned}
 \text{IKP01} &= 50\% \text{ Pembinaan IGT} + 50\% \text{ Rekomendasi Peta RTR} \\
 &= 50\% * (\text{Persentase}(0.5 * \% \text{ IGT terstandar tahun berjalan} + \% \text{ IGT Terbina tahun berjalan}) + 50\% * (\text{Persentase Rekomendasi Peta Rencana Tata Ruang Kumulatif})
 \end{aligned}$$

IGT Terstandar tahun berjalan = 2 rekomendasi dibagi 201 rekomendasi target keseluruhan secara nasional = 1%

IGT Terbina tahun berjalan = 9 rekomendasi dibagi 201 rekomendasi target keseluruhan secara nasional = 4.48%

Rekomendasi peta RTR pada tahun 2021 = 100%

Penghitungan 100% diperoleh dari 1.138 rekomendasi baseline tahun 2020 + 20 rekomendasi tahun 2021 dibagi 1.158 rekomendasi target keseluruhan nasional

Jadi target IKP01 = 50% ((0.5 *1%) + 4.48%) + (50% * 100%)

$$= 2.49\% + 50 \%$$

$$= 52,49\%$$

Definisi :

1. IGT yang telah dibina meliputi IGT terstandar, IGT terbina, dan Rekomendasi Peta RTR.

2. Rekomendasi tema IGT terstandar adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BIG apabila penyelenggaraan IGT di walidata sudah sesuai dengan standar yang ada dengan kriteria :
 - Terdapat standar penyelenggaraan IGT (standar proses dan standar output)
 - Telah dilaksanakan implementasi standar
 - Produk sesuai dengan dokumen standar
3. Perbandingan antara jumlah rekomendasi IGT Terstandar akumulatif dari tahun 2019 sampai tahun berjalan terhadap jumlah keseluruhan target Pembinaan IGT sesuai Peraturan Kepala BIG no 27 tahun 2019 dan peraturan terbaru
4. Jumlah tema IGT berdasarkan Peraturan Kepala BIG no 27 tahun 2019 dan peraturan terbaru
5. Rekomendasi IGT terstandar diperoleh melalui mekanisme pendampingan
6. Rekomendasi tema IGT terbina adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BIG apabila penyelenggaraan IGT di walidata sudah siap berbagipakai dengan kriteria:
 - Terdapat dokumen kontrol kualitas
 - Terdapat metadata
 - Struktur data sesuai dengan KUGI
7. Perbandingan antara jumlah rekomendasi IGT Terbina akumulatif dari 2019 sampai tahun berjalan terhadap jumlah keseluruhan target Pembinaan IGT sesuai Peraturan Kepala BIG no 27 tahun 2019 dan peraturan terbaru.
8. Rekomendasi IGT terbina diperoleh melalui mekanisme pendampingan.
9. Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang adalah rekomendasi peta dasar untuk penyusunan RTR yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.
10. Perbandingan antara jumlah rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan RTR akumulatif sampai tahun berjalan (sampai tahap C4) terhadap jumlah keseluruhan target Rekomendasi secara nasional (sampai tahap C4)
11. Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang diperoleh melalui mekanisme Asistensi dan Supervisi kepada pemerintah daerah
12. Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan RTR dihitung sampai tahap C4 (selesai peta dasar)
 Tahapan Rekomendasi Peta Dasar untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang: C1: Sumber data belum selesai, C2: Jenis Sumber Data Sesuai, C3: Selesai Koreksi Geometris, C4: Selesai Peta Dasar
13. Total target Rekomendasi secara nasional (jumlah rencana tata ruang yang belum rekomendasi dengan baseline 2020= 1.138 dengan rincian: RTRW Nasional=1, RTRW P/K=232, RDTR= 881, KSP=10, KSN=13, KEK/KI= 1)

 Bobot untuk Pembinaan IGT 50% dan rekomendasi peta RTR 50% adalah karena keduanya memiliki beban yang sama.

 Bobot untuk IGT terstandar 50% dan IGT terbina 100% karena IGT terstandar merupakan tahap awal dari pembinaan hingga proses pembuatan standar, sedangkan IGT terbina hingga siap berbagi pakai.

Kegiatan di PPTRA yang mendukung IKP01 yaitu :

ABT.002. ASISTENSI DAN SUPERVISI PETA RENCANA TATA RUANG

Untuk Kegiatan Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang dilakukan pemilihan lokasi pembinaan sebagai berikut :

Tabel 10. Sebaran lokasi 20 kabupaten Kegiatan Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang untuk RTRW

No	Kabupaten / Kota	Provinsi
1	Kabupaten Rejang Lebong	Provinsi Bengkulu
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu
3	Kabupaten Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
4	Kabupaten Maluku Tenggara	Provinsi Maluku
5	Kabupaten Nunukan	Provinsi Kalimantan Utara
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
7	Kabupaten Sabu Raijua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Kabupaten Mappi	Provinsi Papua
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan
10	Kabupaten Luwu	Provinsi Sulawesi Selatan
11	Kabupaten Biak Numfor	Provinsi Papua
12	Kabupaten Sidenreng Rappang	Provinsi Sulawesi Selatan
13	Kabupaten Kaimana	Provinsi Papua Barat
14	Kabupaten Bombana	Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Kabupaten Minahasa Tenggara	Provinsi Sulawesi Utara
16	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Provinsi Sulawesi Utara
17	Kabupaten Sikka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
18	Kabupaten Seluma	Provinsi Bengkulu
19	Kabupaten Nias Barat	Provinsi Sumatera Utara
20	Kabupaten Dairi	Provinsi Sumatera Utara

Tahapan pelaksanaan Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Asistensi dan Supervisi:

- a. Membentuk tim teknis pelaksanaan pekerjaan
 - b. Menyusun kerangka acuan kerja
 - c. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pekerjaan
 - d. Melakukan pemilihan lokasi prioritas asistensi dan supervisi
2. Koordinasi Pengumpulan Data Asistensi dan Supervisi:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga (LAPAN).
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan internal BIG terkait ketersediaan data yang diperlukan pada lokasi prioritas asistensi dan supervisi.
 - c. Membentuk tim pendampingan survei dan supervisi pengumpulan data.
 - d. Melakukan pendampingan survei/supervisi dan pengumpulan data (survei toponim dan survei perekaman data Geospasial) untuk melengkapi basisdata unsur peta dasar rencana tata ruangnya.
3. Asistensi dan Supervisi Peta RTR:

Melakukan asistensi dan supervisi peta dasar untuk RTRW Kabupaten skala 1:50.000.

i) Verifikasi sumber data

Sumber data yang digunakan dapat berupa peta RBI, foto udara, atau citra satelit sesuai kebutuhan skala output peta rencana tata ruang yang dibutuhkan. RTRW Kabupaten/Kota pada skala 1:50.000 dan 1:25.000 dapat menggunakan peta RBI atau citra satelit resolusi menengah.

ii) Verifikasi peta dasar

Peta dasar yang disusun sesuai dengan layer peta dasar dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2011.

4. Penerbitan Rekomendasi Peta RTR dan Pelaporan

Penerbitan rekomendasi peta dasar dalam rangka penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.

Penerbitan rekomendasi peta dasar dalam rangka penyusunan Peta Rencana Tata Ruang diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Diseminasi dan Penyerahan Hasil Kegiatan. Penyerahan hasil rekomendasi dilaksanakan bersama perwakilan dari 20 pemerintah daerah sebagai bentuk sosialisasi hasil kegiatan PTRR dan bukti bahwa hasil kegiatan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk tindak lanjut proses penyusunan peta RTRW.



Gambar 11. Diseminasi dan penyerahan hasil kegiatan Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

Hasil akhir pelaksanaan asistensi dan supervisi peta tata ruang Tahun Anggaran 2021 telah tercapai dengan terselesaikannya pembaharuan peta dasar di 20 lokasi kabupaten dalam bentuk rekomendasi peta dasar untuk Rencana Tata Ruang. Secara rinci capaian Berita Acara (BA) rekomendasi peta dasar adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	No BA Rekomendasi	Tgl Rekomendasi
1	Kabupaten Rejang Lebong	29.4/DGIG-PRT/IGD.02/10/2021	26 Oktober 2021
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	30.4/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	30 Desember 2021
3	Kabupaten Gorontalo Utara	27.3/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	27 Desember 2021
4	Kabupaten Maluku Tenggara	10.2/DGIG-PRT/IGD.02/11/2021	10 Oktober 2021
5	Kabupaten Nunukan	3.5/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	3 Desember 2021
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	29.5/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	29 Desember 2021
7	Kabupaten Sabu Raijua	29.4/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	29 Desember 2021
8	Kabupaten Mappi	27.7/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	27 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	No BA Rekomendasi	Tgl Rekomendasi
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	29.5/DGIG-PRT/IGD.02/10/2021	26 Oktober 2021
10	Kabupaten Luwu	30.1/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	30 Desember 2021
11	Kabupaten Biak Numfor	29.1/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	29 Desember 2021
12	Kabupaten Sidenreng Rappang	20.3/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	20 Desember 2021
13	Kabupaten Kaimana	30.5/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	30 Desember 2021
14	Kabupaten Bombana	30.7/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	30 Desember 2021
15	Kabupaten Minahasa Tenggara	27.2/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	27 Desember 2021
16	Kabupaten Kepulauan Sangihe	30.2/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	30 Desember 2021
17	Kabupaten Sikka	19.2/DGIG-PRT/IGD.02/11/2021	19 November 2021
18	Kabupaten Seluma	19.3/DGIG-PRT/IGD.02/11/2021	19 November 2021
19	Kabupaten Nias Barat	30.3/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	30 Desember 2021
20	Kabupaten Dairi	29.2/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021	29 Desember 2021

Diseminasi dan Penyerahan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyusunan Peta Dasar RTRW TA 2021 kepada Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021.

Dokumentasi Pembinaan kegiatan Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang untuk RTRW.



Kabupaten Gorontalo Utara



Kabupaten Sikka



Kabupaten Rejang Lebong



Kabupaten Nias Barat



Kabupaten Seluma



Kabupaten Bengkulu Selatan

Kegiatan di PPIT yang mendukung IKP01 yaitu :

ABT.003. IGT TUTUPAN KEBUN KELAPA SAWIT

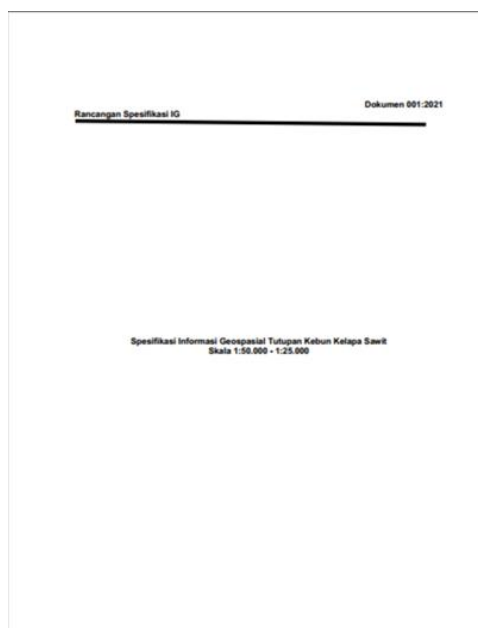
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 diterbitkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan terdapat lima komponen tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu (1) Melakukan Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur; (2)

Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun; (3) Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; (4) Menerapkan Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; dan (5) Melakukan Dukungan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar.

Dalam Inpres tersebut BIG berperan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kelapa sawit. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial untuk memenuhi program pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit yaitu: (1) Kompilasi dan Pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai K/L terkait perkebunan kelapa sawit; (2) Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif; dan (3) Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan.

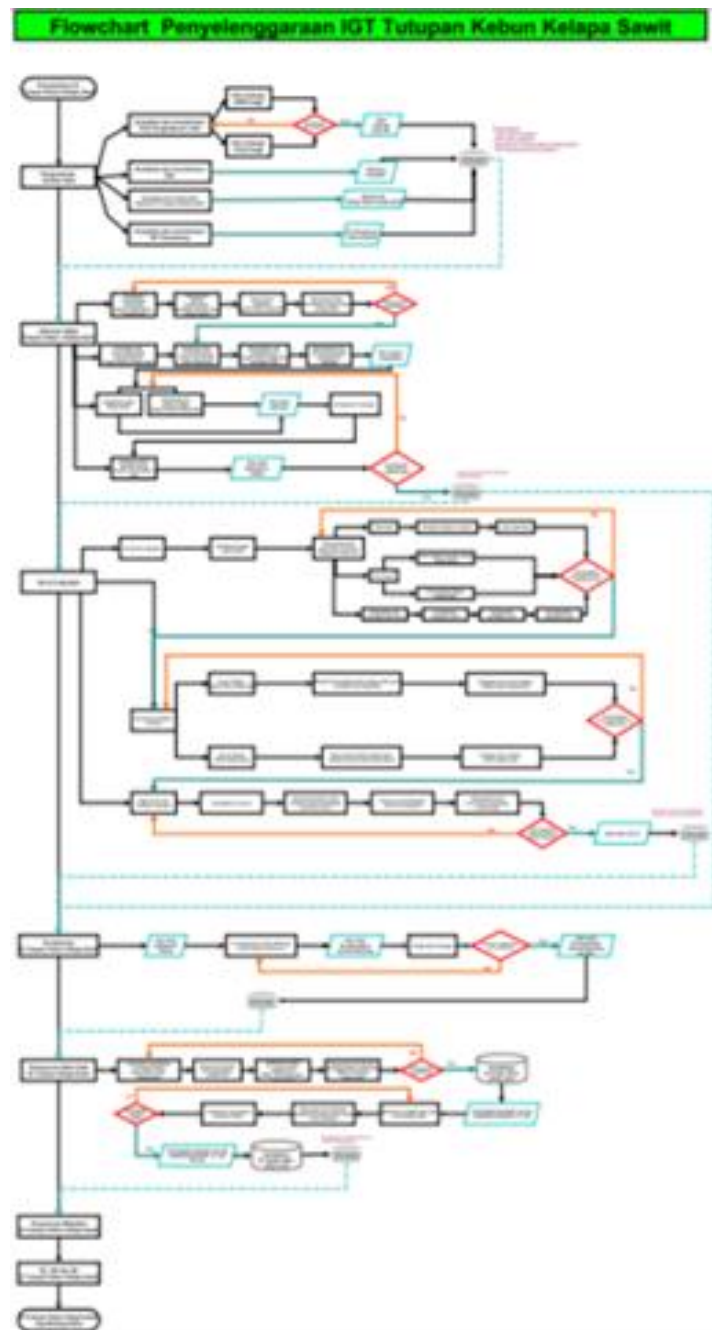
Pembinaan IGT Tutupan Kebun Kelapa Sawit Terstandar dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan dan koordinasi, penyiapan bahan NSPK/Pedoman/Dokumen Teknis, dan Implementasi NSPK/Pedoman/Dokumen Teknis. Ruang lingkup kegiatan pembinaan IGT Tutupan Kebun Kelapa Sawit Terstandar terdiri dari 5 output/luaran, yaitu:

Penyusunan spesifikasi produk IG Tutupan Kelapa Sawit yang mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi produk data. Spesifikasi ini mengatur terkait lingkup spesifikasi, identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan penyajian dari IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit.



Gambar 12. Spesifikasi IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit

Penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit. Dokumen ini merupakan turunan dari spesifikasi produk IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit. Pembahasan dokumen ini melibatkan Kementerian Pertanian selaku walidata IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit. Hasil penyusunan dokumen SOP Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit.



Gambar 13. Flowchart SOP Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit

Penyusunan dokumen Kontrol Kualitas Penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit. Dokumen kontrol kualitas penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit diperlukan untuk memastikan pelaksanaan SOP sesuai dengan

spesifikasi produk. Dokumen tersebut berisi parameter yang diverifikasi berdasarkan tahapan penyelenggaraan IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit.

FORMULIR KONTROL KUALITAS PEMBUATAN BASIS DATA GEOSPASIAL

IG-02	IGP/IG Normal		IG No:	
	IG Pembuatan Basis Data Geospasial		Date yang di IG:	
	Nama Peta/area: (Tuliskan Nama Peta/area)		No. (dalam kategori)	
	(Nama Penyedia dan/atau Peta/area)		Tanggal Mulai IG:	Nama Skema IG:
A. KETERANGAN DATA		ADA/TIDAK	WITABANGUN	
1. Citra Satelit yang tidak lebih IG				
2. Data Baseline IG Tutupan kebun Kelapa Sawit				
B. PARAMETER		SAKUN/TIDAK	WITABANGUN	ALURAN IG
Struktur Basis Data Geospasial				
1. Pembuatan Basis Data Geospasial				Pembuatan Basis Data Geospasial sesuai standar struktur data IG Tutupan kebun Kelapa Sawit/Definisi Spesifikasi
2. Sistem Referensi 2011 (SR11)				Nama Basis Data Geospasial Adalah SR01011 (dalam format - WGS84)
3. Pembuatan Dataset				Pembuatan Dataset sesuai dengan standar pembuatan di SOP Pembuatan Basis Data Geospasial IG Tutupan kebun Kelapa Sawit.
4. File Tutupan kebun Sawit (Jurnal dan File Paket Kelapa Sawit (2011))				Basis Data Geospasial terdiri dari File Tutupan kebun Kelapa Sawit (Jurnal dan Paket Kelapa Sawit (2011))
5. Struktur Data (Nama Field, Nama Attribut, Ukuran Field, Tipe Field)				Struktur Data sesuai dengan standar struktur data IG Tutupan kebun Kelapa Sawit/Definisi Spesifikasi
6. Field Attribut ke Domain				Field atribut berformat dengan domain atribut.
Draft Pembuatan Map IG: _____ Revisi: / 2011-11-11				
Revisi: _____ (Berkas dan/atau/layanan)				
Tanggal: _____ Tanggal: _____ Revisi: _____				

Gambar 14. Dokumen Kontrol Kualitas IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit

Penyusunan dokumen Pedoman Pemetaan Partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit. Dokumen Pedoman Pemetaan Partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit menjelaskan mengenai istilah dan definisi, tahap-tahap, dan persyaratan umum penyelenggaraan pemetaan partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit. Pedoman ini diperuntukan bagi walidata IGT, lembaga fasilitator, fasilitator, verifikator, dan partisipan pemetaan partisipatif.



Pedoman Pemetaan Partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit

Gambar 15. Dokumen Pemetaan partisipatif IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit

Uji implementasi spesifikasi produk IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah dan Riau. Dilakukan uji implementasi spesifikasi produk di Provinsi Riau pada tanggal 7-13 Oktober 2021 dan Kalimantan Tengah pada tanggal 17-23 Oktober 2021. Uji implementasi bertujuan untuk melakukan pengujian pengisian formulir survei lapangan untuk tutupan kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Pelaksanaan kegiatan survei lapangan mencakup: (a) mengetahui ketersediaan data tutupan dan data pabrik kelapa sawit; (b) mendapatkan informasi mengenai prosedur pemetaan partisipatif kebun kelapa sawit; dan (c) menguji pengisian Formulir Survei Lapangan Tutupan Kebun Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit.



Gambar 16. Uji Implementasi Spesifikasi IG Tutupan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

ABT.004.IGT SEBARAN POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA ERSTANDAR

Dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Luas perairan tersebut berbanding lurus dengan potensi perikanan. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Namun sayangnya, hingga kini sebagian besar aktivitas perikanan nasional faktanya belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam regulasi tersebut. Sebagai gambaran terdapatnya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga sering menjadi ancaman langsung maupun tidak langsung bagi keberlanjutan usaha perikanan budidaya. Data spasial luasan lahan budidaya yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkini hanya sampai tahun 2010 dan tentunya terjadi dinamika lahan budidaya dalam beberapa tahun terakhir akibat alih fungsi lahan.

UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan salah satu ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan potensi dan alokasi pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi dan alokasi pembudidayaan ikan tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan IGT Potensi Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Fokus pembinaan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya pada tahun 2021 ini adalah pada penyusunan NSPK serta ujicoba metodologi. Dalam aspek penyusunan standar dan ujicoba metodologi, kegiatan pembinaan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya berfokus pada penyusunan metode dan pembuatan spesifikasi IG Sebaran Potensi Perikanan Budidaya dan ujicoba atau penerapannya pada suatu wilayah. Output utama kegiatan ini yaitu IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya untuk daerah pilot project. Dalam mencapai output IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar, kegiatan ini dipisahkan menjadi setidaknya 3 tahapan, yaitu Persiapan dan koordinasi, Penyusunan NSPK dan Implementasinya.

Dalam tahapan persiapan dan koordinasi, dilakukan **Koordinasi awal dan Penentuan Skema Penyusunan Standar** secara bilateral antara BIG dengan KKP selaku walidata IGT dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi arah kerja pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. Dilakukan juga **Identifikasi Kebutuhan IGT** untuk mendapatkan gambaran umum penyelenggaraan IGT dan sejauh mana kondisi dari IGT Sebaran Potensi Budidaya Perikanan yang akan dilakukan pembinaan. Assessment ini juga menjadi bagian dari pemerolehan informasi untuk penentuan skema penyusunan standar sesuai kriteria IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya.



LEMBAR ASSESMENT TIPOLOGI IGT (1)		
Nama IGT	Peta Sebaran Potensi Perikanan Budidaya	
Walidata	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Produsen Data	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	
Waktu Assessment	25-Feb-21	
Responden	Adi Geraldi	No. Tlp/email :
	Iman R Barizi	
Pewawancara	Rahmat Nugroho dan Florentinus AS	
No	Parameter Assessment	Deskripsi
1	Dasar Hukum Penyelenggaraan IGT	
	a. Undang Undang	UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009
	b. Peraturan Pemerintah	PP 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
	c. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala	Permen KP No 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur data Kelautan dan Perikanan
	d. Dokumen Hukum Lain	
2	Ketersediaan Standar Pemetaan	
	a. Standar Nasional Indonesia	Belum Ada
	b. Dokumen Standar dalam Wujud Peraturan Menteri/Peraturan Kepala	Belum Ada
	c. Dokumen Standar Lain (Juknis/Juklak)	Belum Ada
3	Alasan Penyelenggaraan	
	Produk Data untuk mendukung tugas dan fungsi Utama	
4	Pemanfaatan IGT untuk Internal K/L Walidata	
	Mengetahui sebaran lokasi perikanan budidaya, penyaluran bantuan perikanan	
5	Pemanfaatan IGT untuk Eksternal K/L Walidata	
6	Definisi/Batasan Pengertian IGT	

Gambar 17. Koordinasi Daring dengan KKP dan Identifikasi Kebutuhan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya

Tahapan penyiapan bahan NSPK membahas tentang ketersediaan dokumen standar sebagai fondasi awal dari kegiatan pembinaan penyelenggaraan IGT. Kegiatan penyusunan dokumen teknis yang pertama ditujukan untuk menyusun draft awal **standar penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya**. Secara umum kesepakatan yang dicapai dalam penyusunan dokumen standar adalah bahwa IG yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan bersama yaitu luasan dan lokasi dari pembudidayaan ikan, baik budidaya air tawar, air payau maupun budidaya laut.

Tema	Unsur	Tipe Geometrik	Field	Tipe Field	Alias	Domain
Lahan Budidaya	LAHAN_PEMBUDIDAYAAN_ARSIK	Area Polygon	FCODE	String	Feature Code	
			LCODE	String	Layer Code	
			PROVINSI	String	Provinsi	
			KABUPATEN	String	Kabupaten	
			KECAMATAN	String	Kecamatan	
			METADATA	String	Metadata	
			NAMOBJ	String	Nama Objek	Media
			REFERENSI	String	Referensi	SROI
			TUPE_KAWASAN	String	TUPE_KAWASAN	Tawar Laut Payau
			LUAS_HA	Double	Luas Lahan Budidaya Ha	
			LUAS_M	Double	Luas Lahan Budidaya M	
			SUMBER DATA	String		
			TABUN	String		
			SUMBERDATA	String		
			REMARK	String	Catatan	
			KODE_ESI	String	Kode Eselon I	PT PB RL PI KI DR PS
			PRIMARY KEY			
			NO_PETAK	String	No. Petak Lahan	
			NO_PEMILIK	String	No. Pemilik (NIK)	

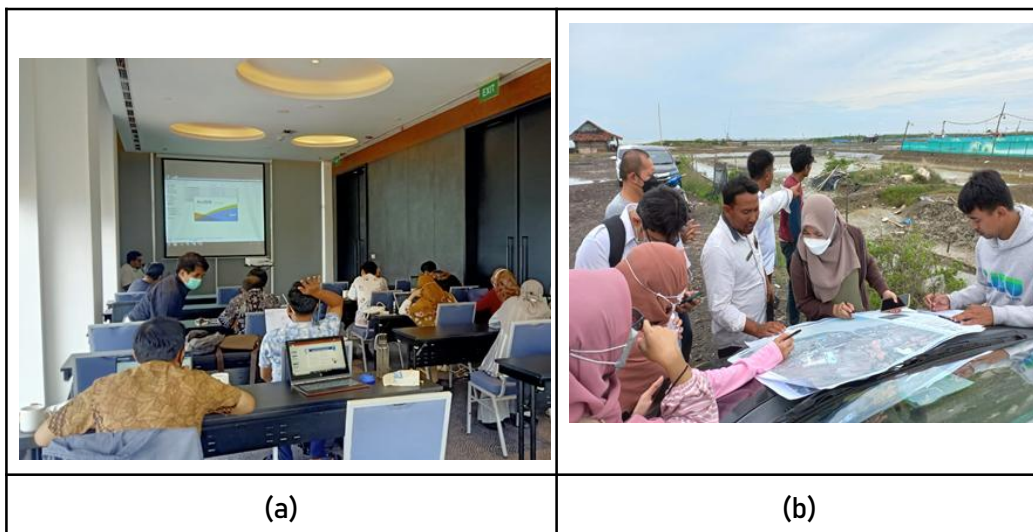
Tema	Unsur	Tipe Geometrik	Field	Tipe Field	Alias	Domain	
Lahan Budidaya	LAHANBUDIDAYA PT50K	POINT	FCODE	String	Feature Code		
			LCODE	String	Layer Code		
			PROVINSI	String	Provinsi		
			KABUPATEN	String	Kabupaten		
			KECAMATAN	String	Kecamatan		
			METADATA	String	Metadata		
			NAMOBJ	String	Nama Objek		
			REFERENSI	String	Referensi		
			JENIS_PERAIRAN	String	Jenis Lahan Budidaya	Tawar Laut Payau	
			LUAS	Double	Luas Lahan Budidaya Ha		
			REMARK	String	Catatan		
			PRIMARY KEY	NO_ID	String	No. Petak Lahan	Sesuai dengan susunan kodefikasi
				NO_PEMILIK	String	No. Pemilik (NIK)	Diisi pada proses survei lapangan

Gambar 18. Struktur Data IG Sebaran Potensi Perikanan Budidaya

Tahapan implementasi NSPK dilakukan dengan ujicoba standar yang diwujudkan melalui **survei lapangan / Groundtruth** pada lokasi yang dinilai masih meragukan dan **Bimbingan Teknis (Bimtek)** penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya kepada penyelenggara IGT tersebut, sesuai dengan Dokumen Standar yang telah dibuat dan disepakati. Didukung dengan **Standard Operational Procedure (SOP)** dan **Petunjuk teknis** untuk penyelenggaraan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.



Gambar 19. SOP dan Petunjuk Teknis IG Sebaran Potensi Perikanan Budidaya



(a)

(b)



(c)

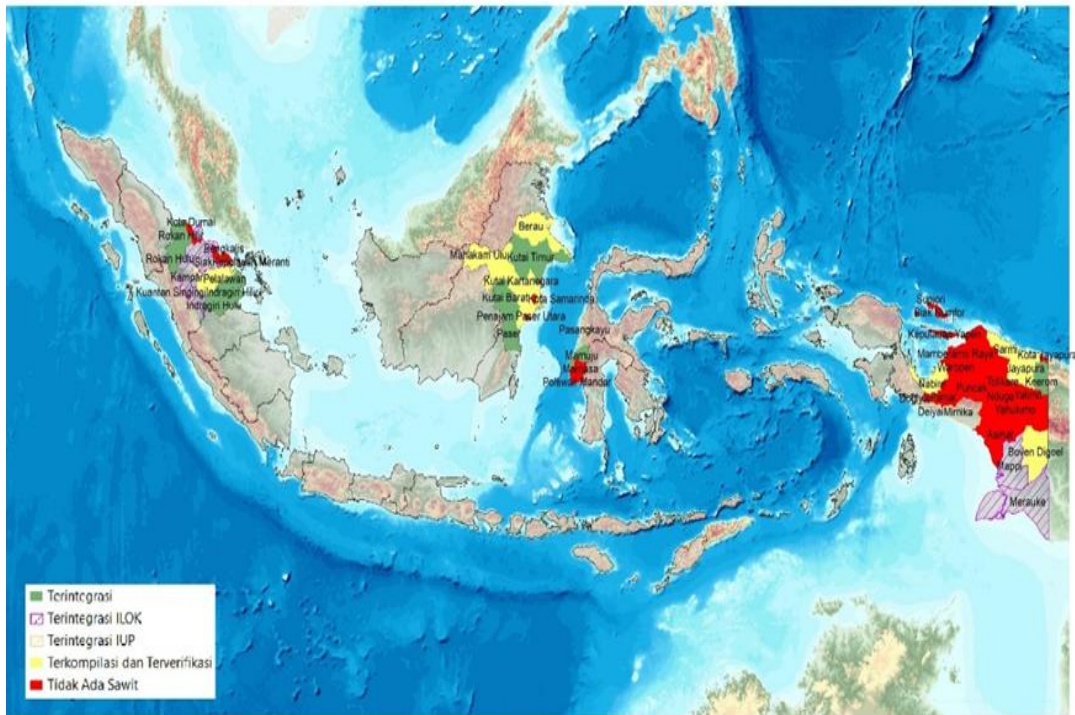
Gambar 20, (a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, (b) *Groundtruth*, dan (c) Peta hasil re-deliniasi setelah *groundtruth*

ABT.005. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN IGT IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN IJIN LOKASI TERBINA

Pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk komitmen PPIT untuk penyelesaian penataan perijinan perkebunan kelapa sawit bersama dengan KPK. Penyelenggaraan pembinaan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diamanatkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2018, dan dijabarkan dengan Surat Keputusan Bersama 5 LPK/LPNK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019 – 2020 dimana pada diktum KETIGA menyebutkan bahwa Aksi Pencegahan Korupsi Meliputi Kepatuhan Perizinan dan Perbaikan Tata Kelola Data.

Tahun 2021 implementasi pembinaan penyelenggaraan IGT difokuskan pada penyelesaian integrasi IGT Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dengan lokus wilayah kegiatan di (1). Provinsi Papua, (2). Sulawesi Barat, (3). Riau, dan (4). Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan

melibatkan walidata, beberapa pakar dari K/L, dan seluruh stakeholder yang berkepentingan. Tahapan dari pekerjaan ini pada intinya adalah Persiapan dan Koordinasi, Supervisi penyelenggaraan IGT, hingga pembinaan siap berbagi pakai. Tahapan tersebut diwujudkan dalam *Focus Group Discussion*, Supervisi, Bantuan Teknis, dan Bimbingan Teknis dengan Walidata/Produsen Data. Berikut merupakan Hasil capaian pelaksanaan kegiatan kompilasi dan integrasi serta Surat Rekomendasi IGT Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (ILOK dan IUP).



Gambar 21. Hasil capaian pelaksanaan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (ILOK dan IUP)



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM. 46 Cibinong 16911
Telepon. (021) 875 2062-2063, Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI
Website: <http://www.big.go.id>

Nomor : B-30.146/PIT-BIG/IGT.01.01/12/2021 30 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Kompilasi dan Integrasi IGT Izin Lokasi Perkebunan
dan Izin Usaha Perkebunan Sawit

Yth. Sebagaimana daftar terlampir
Di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah dilakukan kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang mengacu pada:

1. Pedoman Teknis Pengisian Checklist, Pedoman Pembentukan Data Shapefile, dan Pedoman Penyusunan Struktur Data dan Metadata.
2. Pedoman Teknis Kegiatan Kompilasi dan Integrasi IGT

Bersama ini disampaikan hasil kompilasi dan integrasi yang telah dilakukan sampai tahun 2021 sebagaimana Lampiran 2.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pemetaan
dan Integrasi Tematik,

ditandatangani secara elektronik

Lien Rosalina

Tembusan:

1. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
3. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES-E

Gambar 22. Surat Rekomendasi IGT Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (ILOK dan IUP)

ABT.006. IGT LAHAN GARAM TERBINA

Kebutuhan akan IGT yang berkualitas dan terupdate diperlukan dalam mendukung program pemerintah menuju kedaulatan pangan. Salah satu komoditi pangan yang potensial untuk swasembada adalah garam. Dalam pengembangan lahan garam dibutuhkan perencanaan yang holistik, diawali dengan pemenuhan

ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Garam. Kondisi eksisting IGT Lahan Garam di Indonesia berbeda kualitas dan tingkat kedetilan informasi tematik pada setiap daerahnya sehingga dibutuhkan pembinaan

Ruang lingkup kegiatan pembinaan tahap 2 ini terdiri dari pendampingan, asistensi dan supervisi implementasi standar dan pedoman yang ditujukan kepada produsen data yaitu Direktorat Jasa Kelautan, Seditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai unit pengelola data lingkup eselon 1 dan Pusdatin sebagai unit pengelola dan penyebarluasan data lingkup kementerian. Bentuk pendampingan dan asistensi contohnya dalam penyusunan SOP (*Standard Operational Procedure*), penyusunan dokumen kontrol dan evaluasi kualitas, pendampingan implementasi produksi IG sesuai spesifikasi produk. Pendampingan untuk manajemen kualitas juga dilakukan dalam implementasi proses kontrol kualitasnya sehingga walidata dapat mengetahui dan memahami kualitas dari setiap proses/tahapan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan IG Lahan Garam.



Gambar 23. Pelaksanaan Konsinyasi Manajemen Kualitas Penyelenggaraan IG Lahan Garam

Pada akhir pembinaan penyelenggaraan IG Lahan Garam tahap kedua ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu menghasilkan IG Lahan Garam yang terstandar dan siap diberbagipakaikan. Penyelenggaraan IG Lahan Garam telah dilaksanakan sesuai dengan tatalaksana manajemen data yang baik. Proses kontrol kualitas pada setiap tahapan penyelenggaraan IG Lahan Garam telah dilaksanakan, demikian juga dengan uji akurasi untuk setiap elemen kualitas sebagaimana yang telah dituangkan dalam spesifikasi produk. Terkait dengan berbagipakai data, produsen data walidata juga telah memahami proses penyebarluasan IGT yang dihasilkan termasuk penyusunan metadatanya.

Berkenaan dengan itu maka dalam pembinaan penyelenggaraan IGT Lahan Garam ini dapat dikeluarkan **Rekomendasi IG Lahan Garam Terbina**. Selain rekomendasi tersebut, di dalam pembinaan tahap kedua ini juga telah dihasilkan dokumen teknis sudah diimplementasikan dalam penyelenggaraan IG Lahan Garam. Dokumen-dokumen teknis adalah :

1. SOP Pengumpulan Sumber Data IG Lahan Garam
2. SOP Pengolahan Citra Satelit IG Lahan Garam
3. SOP Penyusunan Geodatabase, Interpretasi dan Delineasi Objek Lahan Garam
4. SOP Survey Lapangan IG Lahan Garam
5. SOP Reinterpretasi IG Lahan Garam
6. SOP Pengisian Metadata IG Lahan Garam
7. SOP Berbagi Pakai IG Lahan Garam
8. Modul Manajemen Kualitas IG Lahan Garam-Kontrol Kualitas
9. Modul Manajemen Kualitas IG Lahan Garam-Evaluasi Kualitas
10. Modul Manajemen Kualitas IG Lahan Garam-Penjaminan Kualitas

0000-05 Periode		00-00-00	
00 Interpretasi/Delineasi (Area)		00 No-1	
Nama Pekerjaan: IG_LAHAN_GARAM_PAMERASAN		Data yang di 00 IG_LAHAN_GARAM_PAMERASAN	
Direktora Jasa Ketersuaan		Tanggal Mulai 00: 08 November 2021	Nama Petugas 00: Abdul Sukur
A	KETERSEDIAAN DATA	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Citra satelit yang telah lolos QC	ADA	1) Multipetrasat_DSM_PHEBA_PHE_2000073100000001_CRT_PHEBA_2000000_002493.Nep0y02a4c_1 2) Multipetrasat_DSM_PHEBA_PHE_2000073100000001_CRT_PHEBA_2000000_002493.Nep0y02a4c_1 3) Multipetrasat_DSM_PHEBA_PHE_2000073100000001_CRT_PHEBA_20000731_000493.Nep0y02a4c_1
2	Data IG Lahan Garam hasil interpretasi	ADA	
B	PARAMETER	BILANGAN KESALAHAN 00	KETERANGAN
ACUAN 00			
Pengecekan Interpretasi dan Delineasi			
1	Kekurangan Delineasi Objek Lahan Garam	0	Lahan garam belum di delineasi
2	Ketebuhan Delineasi Objek Lahan Garam	0	Bukan Lahan Garam, termasuk daratan
3	Definisi Objek Lahan Garam Sesuai dengan ketentuan Penggambaran	0	Definisi tidak sesuai kesempakan dan interpretasinya
4	Ketengkapan dan Kesesuaian Isian Atribut Fungsi Lahan Garam	40	Fungsi masih bisa di detailkan
5	Unsur Lahan Garam disimpan dalam format sesuai ketentuan	0	Sesuai
6	Kesesuaian interpretasi dan klasifikasi unsur Fungsi Lahan Garam	0	Fungsi tidak sesuai
hasil Pantauan Tim 00: (Enter nama/Entolok *)			
CATATAN (komentor/perm asalahan/perbaikan)			
		Tanggal Akhir 00: Petugas 00: Koordinator 00:	

Gambar 24. Contoh Dokumen QC mulai proses interpretasi, pra survei, hingga supervisi lapangan

ABT.007. IGT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TERBINA

IG Kawasan Konservasi Perairan merupakan penggambaran perencanaan penetapan zona-zona konservasi perairan pada wilayah laut di Indonesia, baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu KKPN (Kawasan Konservasi Perairan Nasional), maupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah). IG Kawasan Konservasi Perairan ini penting untuk diselenggarakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan satu kawasan dengan Kawasan lainnya baik itu KKPN maupun KKPD.

Surat Direktorat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 1528/DJPR.5/VII/2019 tentang Permintaan Pendampingan Penyusunan Pedoman Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Meminta bantuan dukungan pendampingan dalam pelaksanaan pembuatan NSPK serta penyelenggaraan Peta Kawasan Konservasi Perairan. Pembinaan perlu tetap dilaksanakan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan IG Kawasan Konservasi Perairan dilaksanakan sesuai dokumen teknis yang disepakati, baik dilakukan oleh walidata maupun pihak lainnya, sehingga berbagai pakai data bisa terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan IG Kawasan konservasi perairan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu (1) persiapan dan koordinasi yang membahas **dokumen perencanaan kegiatan IGT KKP, reviu dokumen untuk pengesahan spesifikasi output penyajian peta kawasan konservasi perairan.**



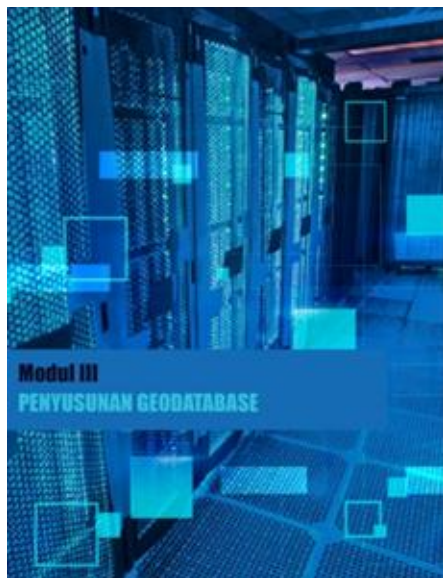
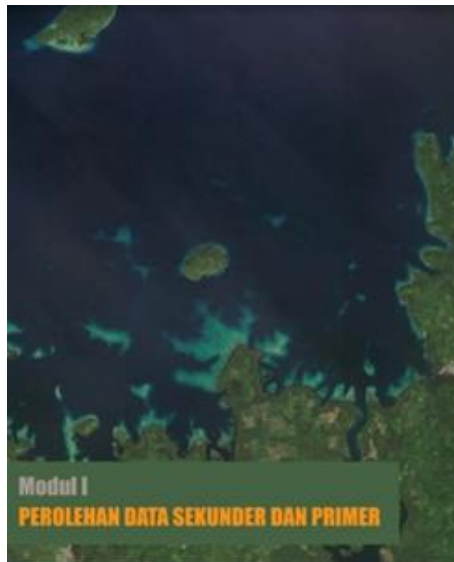
A	B	C	D	E	F
Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di
Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di
Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di
Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di
Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di	Melakukan validasi data dengan standar yang ditetapkan di

Gambar 25. Persiapan dan koordinasi

Kemudian pelaksanaan (2) supervisi yang diawali dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dan evaluasi kondisi data/IG pada produsen data. Sesuai dengan kesepakatan bersama walidata dan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi dan sesuai target output yang disampaikan oleh walidata saat *assessment* tema IGT. Pelaksanaan (2) supervisi dilakukan di TWPN yang berada pada dua provinsi yaitu Sumatera Barat (LKKPN Pekanbaru) dan Maluku (BKKPN Kupang). Berkaitan dengan kegiatan supervisi, disusun pula modul penyusunan IG KKP sebagai pedoman bagi produsen data dalam memproses data dari awal hingga data tersebut bisa diberbagi pakaikan.



Gambar 26. Koordinasi dan Supervisi Penyusunan IG KKP



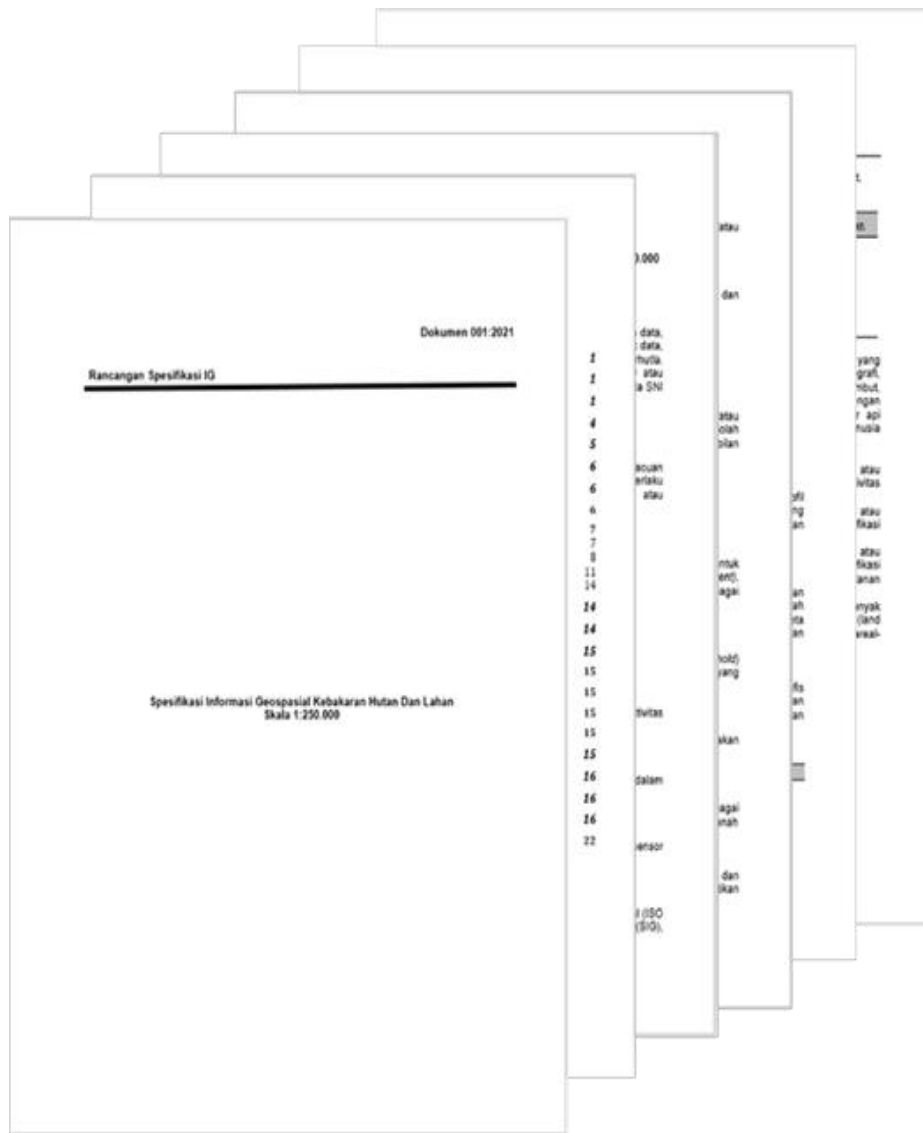
Gambar 27. Modul Penyusunan IG Kawasan Konservasi Perairan

Sebagai bentuk dukungan pelaksanaan, pada tahap (3) pembinaan siap berbagi pakai, dilaksanakan **bimbingan teknis pengumpulan dan pengolahan, penyusunan zonasi menggunakan marzone, penyusunan basisdata dan metadata, hingga desain layout peta kawasan konservasi perairan** sebagai salah satu tahap implementasi modul dalam penyusunan IG KKP. Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dihadiri oleh produsen data yang berasal dari seluruh UPT KKP. Selain itu dilaksanakan pula **FGD pembahasan dokumen kontrol kualitas dan penjaminan kualitas** untuk menjamin kualitas output data yang akan di berbagi pakai.

ABT.008 REKOMENDASI PENYELENGGARAAN IGT RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

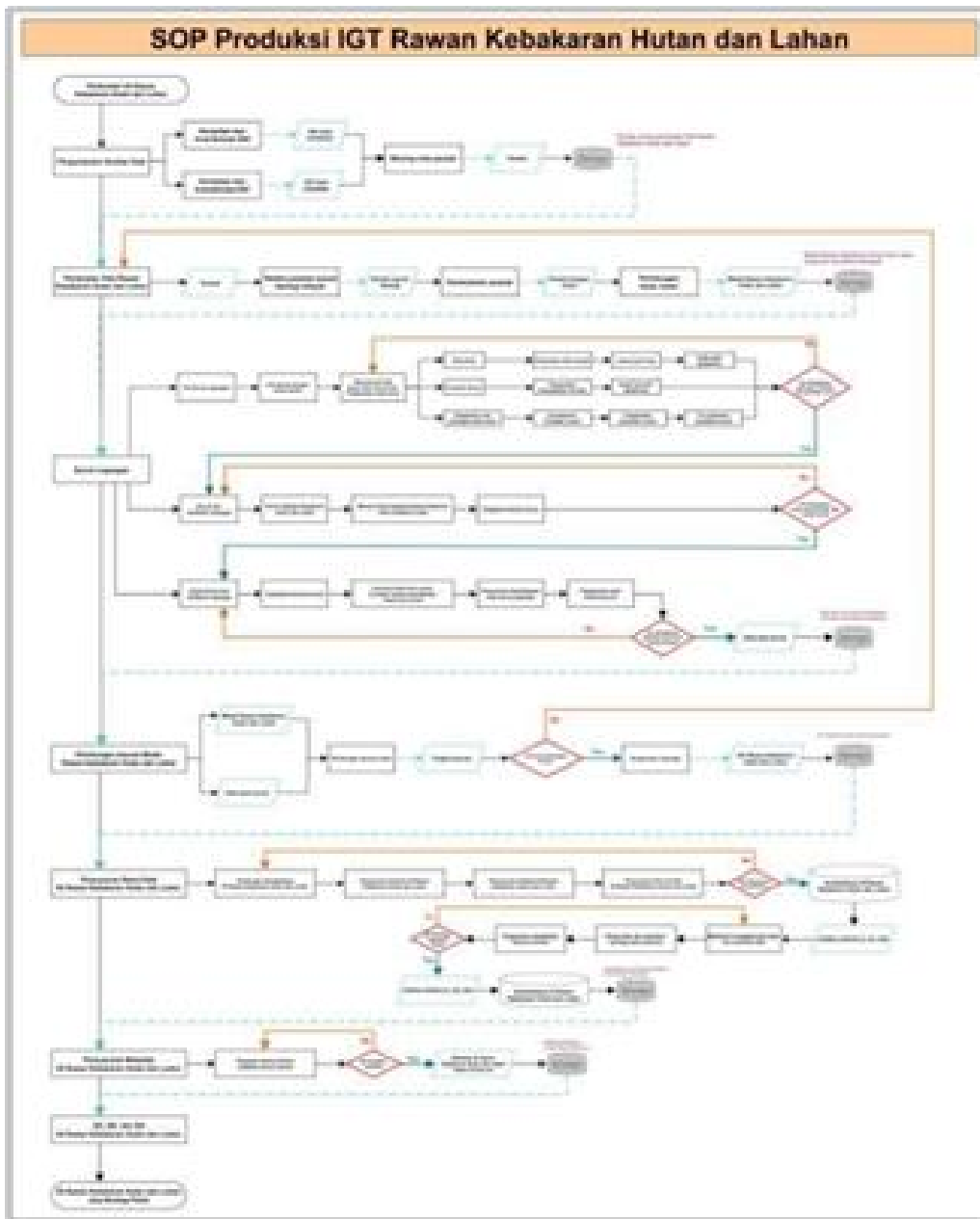
Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan walidata, beberapa pakar dari K/L, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (pokja) Pemetaan Kebencanaan. Pekerjaan dilakukan dengan metode koordinasi, on desk di laboratorium, workshop dan bimbingan teknis bersama antar K/L dan Pemda maupun FGD yang melibatkan antar K/L/P dan pakar terkait. Selain itu juga akan dilakukan verifikasi lapangan bilamana diperlukan. Tahapan tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi, *Focus Group Discussion*, bimbingan teknis, dan supervisi.

Penyusunan Spesifikasi IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Spesifikasi IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan mengatur ketentuan mengenai spesifikasi fitur, sumber data, pengumpulan data, perolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data dan penyajian dari informasi geospasial. Spesifikasi ini berfokus kepada output/produk IG Rawan Karhutla skala 1:50.000 atau 1:250.000 sesuai dengan ketersediaan sumber data. Lingkup spesifikasi mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi Produk Data.



Gambar 28. Dokumen Spesifikasi IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyusunan Dokumen SOP Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. SOP berisikan tahapan-tahapan yang harus dilalui produsen data mulai dari persiapan, penyiapan data, pengolahan data, penyimpanan, hingga visualisasi data.



Gambar 29. Flowchart SOP Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyusunan Dokumen Kontrol Kualitas IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Berikut merupakan Dokumen Kontrol Kualitas IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah disusun.

The image displays three pages of a Quality Control Document (DOKUMEN KONTROL KUALITAS) for land and forest fire risk assessment. Each page contains a header with project information, a table of control points (QC Point) with descriptions and methods, and a signature section at the bottom.

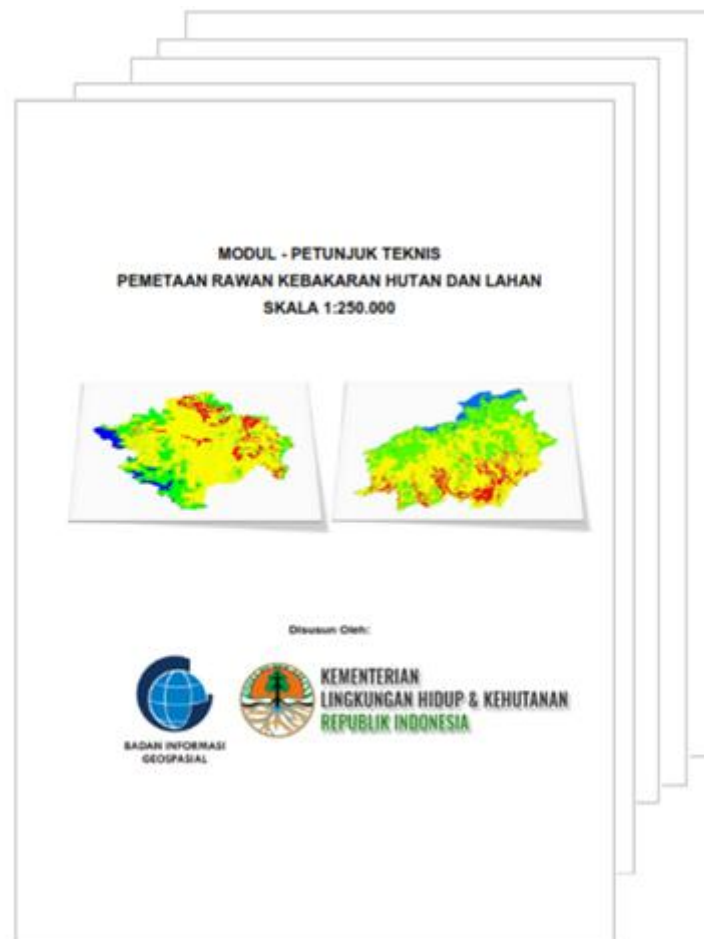
Page 1 (Left): Project: "Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan". Title: "DOKUMEN KONTROL KUALITAS". Scale: 1:250.000. Location: "PERUMAHAN RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1276/000". It lists 15 QC points under categories like "Data Pemetaan", "Klasifikasi", and "Analisis".

Page 2 (Middle): Continuation of the QC points table, including "Klasifikasi" and "Analisis". It includes a signature section for "KORUMPAJAN" and "Lulus/Tidak Lulus".

Page 3 (Right): Continuation of the QC points table, including "Analisis". It includes a signature section for "KORUMPAJAN" and "Lulus/Tidak Lulus".

Gambar 30. Dokumen Kontrol Kualitas IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyusunan Modul – Petunjuk Teknis Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Skala 1:250.000. Petunjuk Teknis yang dibuat berdasarkan metode pemetaan yang tertuang pada dokumen standar yang telah disepakati dan disusun berdasarkan tahapan seperti persiapan data, pengolahan data, dan penyajian dan penyimpanan data.



Gambar 31. Petunjuk Teknis Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Skala 1:250.000

Penyusunan Metadata IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Setelah produk akhir dari pemetaan rawan kebakaran hutan dan lahan telah selesai, geodatabase tersebut harus diberikan metadata untuk mendukung proses berbagipakai yang akan dilanjutkan setelahnya oleh unit clearing walidata. Metadata tersebut berisi tentang data yang dihasilkan, mulai dari sumber data yang digunakan, uraian singkat tentang data tersebut, hingga kualitasnya.

Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dokumen rekomendasi IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan dokumen yang menerangkan hasil dari pembinaan berisi hasil dari Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.



Gambar 32. Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan IG Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

ABT.009. IGT RISIKO BANJIR TERBINA

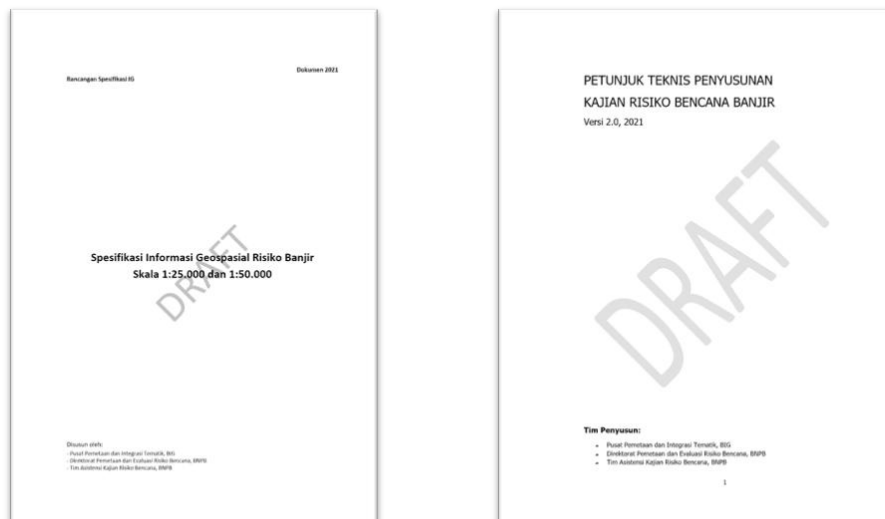
Peta Rawan Banjir merupakan hasil analisis dari data sistem lahan, penutup lahan, dan morfometri diperoleh dari BIG, data kejadian banjir dari Kementerian PUPR, serta data curah hujan dasarian yang berasal dari BMKG. BIG sebagaimana Surat Keputusan Kepala BIG Nomor 27 Tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik merupakan walidata peta rawan banjir yang mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa peta rawan bencana yang telah diproduksi dapat digunakan dan diberbagipakai kepada stakeholders terkait. Guna memastikan hal tersebut maka BIG melalui kegiatan ini berupaya melakukan pembinaan terhadap K/L terkait dalam pemanfaatan IGT Rawan Banjir agar dapat

mendukung pengurangan risiko bencana banjir di Indonesia. Dukungan terhadap pengurangan risiko dapat dilaksanakan melalui penguatan pada outcome pencapaian produksi peta rawan banjir. Bentuk penguatan ini adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan peta rawan banjir dalam implementasi kebutuhan untuk menjawab kebutuhan potensi bencana yang memungkinkan terjadi di masa yang akan datang. Pembinaan terhadap pengguna data menjadi tanggung jawab BIG agar data yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam manajemen penanggulangan bencana. Selain itu peta banjir yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan dalam penilaian risiko bencana banjir yang merupakan kewalidatan BNPB. Peta rawan banjir menjadi input yang penting dalam menilai tingkat bahaya banjir yang merupakan salah satu parameter dalam penghitungan risiko banjir.

Pada Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembinaan IGT Risiko Banjir sudah dilakukan sampai pada tahap pembinaan siap berbagi pakai dan status pembinaan menjadi IGT Terbina. Kegiatan pembinaan ini meliputi penguatan standar dengan penyusunan Spesifikasi IGT Risiko Banjir dan ketentuan Struktur Basisdata serta Metadata untuk IGT Risiko Banjir; uji coba implementasi standar melalui survei lapangan dan bimbingan teknis di daerah; hingga pembinaan berbagi pakai data di daerah. Lokasi supervisi atau uji coba implementasi standar IGT Risiko Banjir ditetapkan berdasarkan ketersediaan data, kebutuhan kajian risiko bencana banjir yang masih belum terpenuhi di daerah terkait, serta daerah yang sedang melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana di tahun 2021. Dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, lokasi uji coba implementasi untuk pembinaan IGT Risiko Banjir di beberapa daerah diantaranya adalah Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Gorontalo, dengan perubahan Kembali menjadi dua daerah yaitu Kab. Gunung Kidul dan Kab. Gorontalo karena kondisi pandemi.

Dalam proses pembinaan kepada BNPB sebagai walidata IGT Risiko Banjir, BIG telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi dasar IGT Risiko Banjir dapat dikatakan sebagai IGT yang telah memenuhi kriteria IGT Terbina dan siap diberbagipakaikan. Kegiatan yang telah dilaksanakan bersama antara lain:

1. Penyusunan spesifikasi Produk IGT Risiko Banjir sesuai SNI ISO 19131 Informasi Geospasial – Spesifikasi Produk Data;
2. Pembaharuan Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir;
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Basisdata dan Metadata IGT Risiko Banjir;
4. Penyusunan dokumen kontrol kualitas IGT Risiko Banjir;
5. Uji implementasi standar IGT Risiko Banjir



Gambar 33. Dokumen Draft Spesifikasi Produk Data IGT Risiko Banjir dan Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Risiko Banjir versi 2



Gambar 34. Kegiatan Bimbingan teknis dan FGD kontrol kualitas

ABT.010 REKOMENDASI PENYELENGGARAAN IGT LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERBINA

Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dilatarbelakangi oleh masih minimnya implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Keterlibatan BIG dalam pelaksanaan Perpres tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Terpadu dan Sekretaris Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. BIG diharapkan dapat mengawal penyelenggaraan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi bersama Tim Pelaksana Perpres 59/2019 sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjamin sesuai kaidah pemetaan yang benar dan kevalidannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan walidata dan seluruh stakeholder yang berkepentingan. Dalam kegiatan pembinaan ini kegiatan berupa pendampingan penyusunan dokumen dan bantuan teknis.

Pembinaan tahun kedua ini hasil kegiatan berupa rekomendasi IGT Lahan Sawah Dilindungi yang sudah terbina dan siap diberbagipakaikan. Selain rekomendasi,

dihasilkan beberapa dokumen teknis dan juga data pendukung penyusunan IGT LSD.

Dokumen dan data tersebut adalah:

1. Dokumen Spesifikasi IGT Lahan Sawah Dilindungi
2. Dokumen Form Kontrol Kualitas
3. LBS terkoreksi untuk 8 provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Sumatera Barat)
4. Usulan LSD untuk 8 provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Sumatera Barat)
5. LBS terkoreksi untuk 12 provinsi (Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau)
6. LBS terkoreksi untuk 13 provinsi (NTT, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua)



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM. 46 Cibinong 16911
Telepon. (021) 875 2062-2063, Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI
Website: <http://www.big.go.id>

Nomor : B-30.151/PIT-BIG/IGT.01.01/12/2021 30 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina

Yth. 1. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu - Kementerian ATR/BPN
2. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Kementerian ATR/BPN

Di tempat

Merujuk Pasal 57 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pada tahun anggaran 2020 - 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG) telah melakukan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai berikut:

1. Penyusunan Spesifikasi produk IG Lahan Sawah Dilindungi yang mengacu pada SNI ISO 19131 Informasi geografi – Spesifikasi produk data;
2. Penyusunan Dokumen Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan Sawah yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Nomor 4 Tahun 2020;
3. Verifikasi Lahan Baku Sawah menjadi Lahan Sawah Terkoreksi dan Usulan Lahan Sawah Dilindungi pada 8 Provinsi (Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat) sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589 Tahun 2021;
4. Verifikasi Lahan Baku Sawah menggunakan citra SPOT 6/7 mosaik LAPAN (2021) menjadi Lahan Baku Sawah Terkoreksi pada 12 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau);
5. Verifikasi Lahan Baku Sawah menggunakan citra SPOT 6/7 mosaik LAPAN (2021) dan survei lapangan pada 13 Provinsi (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua).

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan IG Lahan Sawah Dilindungi telah memenuhi kriteria Informasi Geospasial Tematik (IGT) Terbina dan siap diberbagipakai.

Selanjutnya, dokumen Spesifikasi produk IG Lahan Sawah Dilindungi agar dapat ditetapkan sebagai standar penyelenggaraan IG Lahan Sawah Dilindungi.

Seluruh dokumen tersebut di atas dapat diakses melalui tautan: https://big.go.id/spesifikasi_LSD

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pemetaan
dan Integrasi Tematik,

(tanda tangan secara elektronik)

Lien Rosalina

Tembusan:

1. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR-E

Gambar 35. Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi



Gambar 36. Dokumen Spesifikasi IGT Lahan Sawah Dilindungi

QA-00	QA00-05 Formulir		AOI :		
	FORMULIR PENJAMINAN KUALITAS				
	Informasi Geospasial Kawasan Konservasi Perairan		Tanggal Pelaksanaan QA		Pelaksana
	Nama Pelaksana				
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PENYELENGGARAAN					
No.	Jenis Dokumen	Inventarisasi	Hasil QC	Judul Dokumen	Keterangan
1	Peraturan Terkait				
2	Bisnis Proses				
3	Spesifikasi Sumber Data, Bahan dan/atau Peralatan				
4	Kompetensi Personil				
5	Standar Produk				
6	Kompetensi Personil				
7	Standar Operasional Pelaksanaan				
KONTROL KUALITAS PRODUK IGT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN					
No.	Jenis Dokumen	Ketersediaan	Hasil QC	Judul Dokumen	Keterangan
1	Data Penyusun				
2	Kesesuaian Zonasi				
3	Struktur Data				
4	Sistem Referensi				
5	Metadata				
6	Aturan Topologi				
7	Penyajian Peta				
HASILEVALUASI KUALITAS					
No.	Jenis Dokumen	Ketersediaan	Hasil QE	Judul Dokumen	Status
1	Elemen Akurasi Temporal				
2	Elemen Kelengkapan Data				
3	Elemen Konsistensi Logis				
4	Elemen Akurasi Tematik				
5	Elemen Akurasi Posisi				
METADATA					
No.	Jenis Dokumen	Ketersediaan	Hasil QE	Judul Dokumen	Status
1	Metadata IGT Kawasan Konservasi Perairan				
KESIMPULAN					
Berdasarkan proses <i>Quality Assurance</i> (QA) Geodatabase yang telah dilakukan, serta memperhatikan kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan, dokumen Kontrol Kualitas (QC) dan Evaluasi Kualitas (QE), Produk data ini [DIJAMIN/TIDAK DIJAMIN] karena semua elemen kualitas diterima.					
Nama Dan Tanda Tangan Petugas QA					
Nama Dan Tanda Tangan Koordinator QA					
Nama Dan Tanda Tangan Pejabat Eselon II QA					

Gambar 37. Dokumen Form Kontrol Kualitas

Manfaat yang dirasakan oleh K/L dan masyarakat adalah semakin mudahnya mendapatkan IGT yang dihasilkan oleh BIG dan pendampingan serta pembinaan yang intensif untuk pemanfaatan IGT.

Manfaat kegiatan pada Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)

1. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan IGT bermanfaat bagi K/L lain dalam penyelenggaraan IGT sehingga informasi geospasial yang dihasilkan memiliki standar yang sama dan dapat diberbagipakaikan.

Indikator Kinerja Program 02 (IKP02)

Indikator Kinerja Program 02 memiliki target 50.01%, dimana indikator kinerja program dinyatakan dengan persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional. IKP02 dapat terealisasi 50.01% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 11. Indikator Kinerja Program 01 (IKP01)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan informasi geospasial tematik strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	%	50.01	50.01	100% (tercapai)

Perhitungan capaian kinerja diperoleh dengan cara :
80%*(% Capaian IGT Strategis) + 20%*(% Capaian Atlas) atau

$80\% * ((\% \text{ IGT Sistem Lahan Skala } 1:50.000 + \% \text{ IGT Rawan Banjir} + \% \text{ IGT Potensi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil} + \% \text{ IGT Multirawan Terintegrasi} + \% \text{ IGT Deformasi Terintegrasi} + \% \text{ Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan (SRC)} + \% \text{ IGT EWS} + \% \text{ IG Strategis Dinamika Sumberdaya} + \% \text{ IGT Integrasi Spasial Statistik} + \% \text{ IGT Neraca Spasial Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup})/10) + 20\% * ((\% \text{ AGI Tema 1} + \% \text{ AGI Tema 2} + \% \text{ AGI Tema 3} + \% \text{ AGI Tema 4} + \% \text{ AGI Tema 5} + \% \text{ Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi} + \% \text{ Atlas Indikator TPB} + \% \text{ Atlas Taktual Indonesia})/8)$

Bobot untuk IGT Strategis adalah 80% karena diperlukan analisis untuk mencapai outputnya.

Bobot untuk Atlas adalah 20% karena menitikberatkan pada unsur kartografi dan *story telling*.

Persentase cakupan wilayah IGT dihitung berdasarkan luasan cakupan wilayah per tema secara akumulasi pada tahun berjalan dibagi total target luasan cakupan wilayah per tema secara nasional.

No.	Kelompok IGT Strategis	Luasan cakupan wilayah per tema secara akumulasi pada tahun berjalan (2021) dalam km2	Total target luasan cakupan wilayah per tema secara nasional (km2)	persentase	rata-rata
-----	------------------------	---	--	------------	-----------

No.	Kelompok IGT Strategis	Luasan cakupan wilayah per tema secara akumulasi pada tahun berjalan (2021) dalam km2	Total target luasan cakupan wilayah per tema secara nasional (km2)	persentase	rata-rata
	IGT Strategis				
1	IGT Rawan Banjir Terintegrasi	1152677,95	1229472,57	93,75%	53,51%
2	IGT Multirawan Bencana Terintegrasi	74436,85	1899695	3,92%	
3	IGT Deformasi Terintegrasi	128774,27	128774,27	100,00%	
4	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	60	150	40,00%	
5	IGT Sistem Lahan	1340525	1899695	70,57%	
6	IGT Peringatan Dini Banjir	1359	13894	9,78%	
7	IGT Potensi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil	22802	26801,99043	85,08%	
8	IG Strategis Dinamika Sumberdaya (2020)	9182,09	9182,09	100,00%	
9	IGT Integrasi Spasial Statistik	133157,17	1899695,36	7,01%	
10	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	1899695,352	7598781,41	25,00%	
	Atlas				
1	Atlas Geospasial Indonesia : Wilayah, Fisik dan Lingkungan Alam	1899695,36	1.899.695,36	100,00%	36,00%
2	Atlas Geospasial Indonesia : Sejarah, Suku dan Budaya Bangsa	1899695,36	1.899.695,36	100,00%	
3	Atlas Geospasial Indonesia : Sosial Ekonomi dan Penduduk	0	1.899.695,36	0,00%	
4	Atlas Geospasial Indonesia : Potensi dan Sumberdaya Alam	0	1.899.695,36	0,00%	
5	Atlas Geospasial Indonesia : Keanekaragaman Hayati	0	1.899.695,36	0,00%	
6	Atlas Indikator TPB	742592,66	1.899.695,36	39,09%	
7	Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	36475	102.286,00	35,66%	

No.	Kelompok IGT Strategis	Luasan cakupan wilayah per tema secara akumulasi pada tahun berjalan (2021) dalam km ²	Total target luasan cakupan wilayah per tema secara nasional (km ²)	persentase	rata-rata
8	Atlas Taktual Indonesia	42813	322.225,74	13,29%	
80% IGT Strategis + 20% Atlas					50,01%

Definisi :

IGT strategis merupakan IGT yang diselenggarakan oleh BIG dalam rangka memenuhi penugasan dari pemerintah atau pimpinan. IGT Strategis yang diselenggarakan pada tahun Renstra 2020-2024 terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. IGT Strategis yang terdiri dari 10 tema:
 - a. IGT Sistem Lahan Skala 1:50.000
 - b. IGT Rawan Banjir,
 - c. IGT Potensi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil,
 - d. IGT Multirawan Terintegrasi,
 - e. IGT Deformasi Terintegrasi,
 - f. Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan (SRC),
 - g. IGT Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS),
 - h. IG Strategis Dinamika Sumberdaya,
 - i. IGT Integrasi Spasial Statistik,
 - j. IGT Neraca Spasial Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

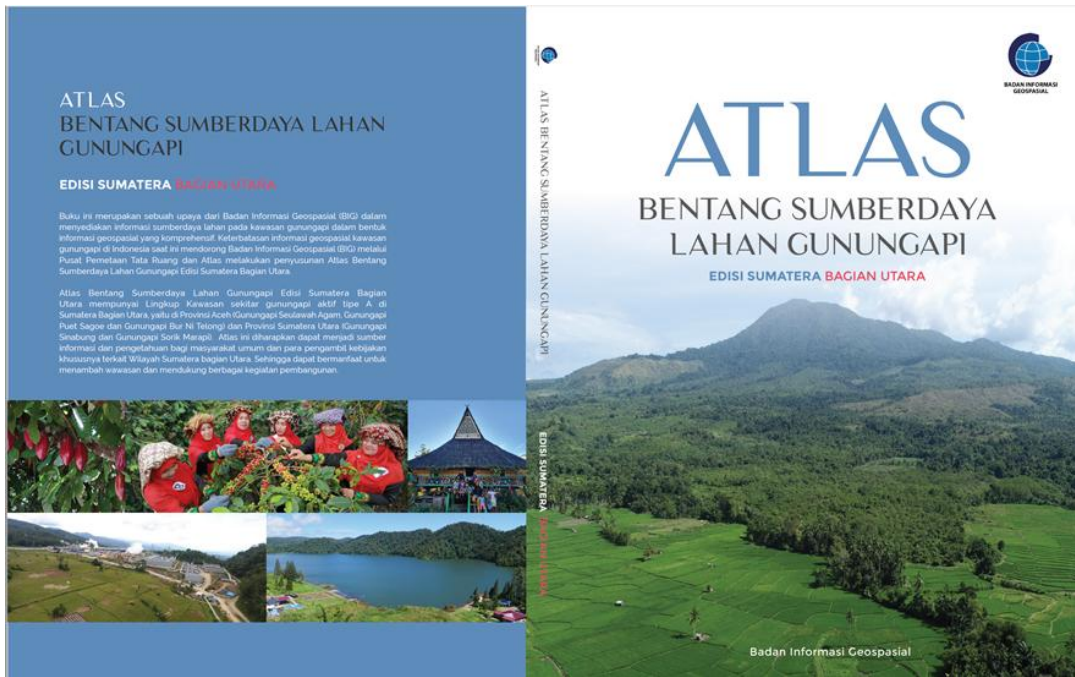
2. Atlas terdiri dari 8 tema:
 - a. Atlas Geospasial Indonesia : Wilayah, Fisik dan Lingkungan Alam (2020)
 - b. Atlas Geospasial Indonesia : Sejarah, Suku dan Budaya Bangsa (2021)
 - c. Atlas Geospasial Indonesia : Sosial Ekonomi dan Penduduk (2022)
 - d. Atlas Geospasial Indonesia : Potensi dan Sumberdaya Alam (2023)
 - e. Atlas Geospasial Indonesia : Keanekaragaman Hayati (2024)
 - f. Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gununggapi
 - g. Atlas Indikator TPB
 - h. Atlas Taktual Indonesia

Kegiatan yang mendukung perhitungan indikator kinerja program 02 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

CBO.001. ATLAS BENTANG SUMBERDAYA LAHAN GUNUNGAPI EDISI SUMATERA BAGIAN UTARA

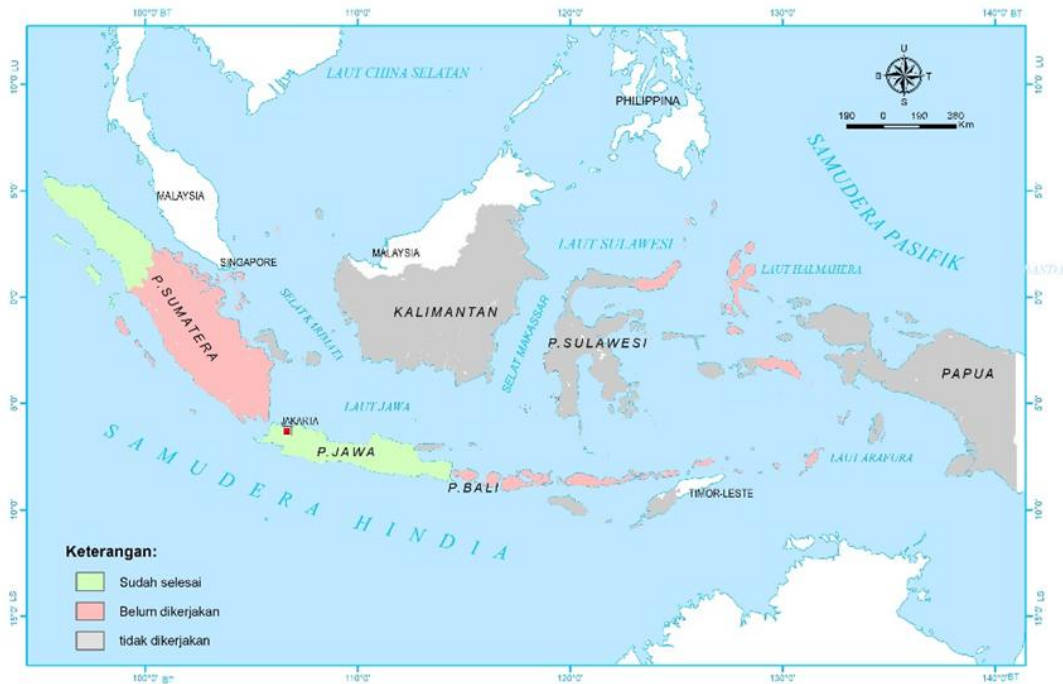
Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi adalah menyediakan informasi geospasial tematik berupa Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi edisi Sumatera bagian Utara. Deretan gunungapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Kepulauan Maluku dan Sulawesi bagian utara. Indonesia menjadi bagian dari *ring of fire* atau cincin gunungapi dunia. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap bencana letusan gunungapi. Namun dibalik itu, tersimpan anugerah sumberdaya yang tak ternilai dari keberadaan gunungapi, baik sumberdaya alam dan budaya yang berada di sekitarnya. Informasi geospasial bentang sumberdaya lahan gunungapi yang tersaji dalam bentuk atlas ini mengupas sisi manfaat keberadaan gunungapi yang disajikan dengan peta, narasi, foto, dan citra satelit, diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan bentang sumberdaya lahan gunungapi bagi pembaca semua.

Sampai dengan tahun 2020 telah disusun Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Jawa Bagian Timur, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat. Pada Tahun 2021 disusun Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Edisi Sumatera Bagian Utara. Atlas ini berisi tentang Informasi terkait sumberdaya lahan gunungapi tipe A di Provinsi Aceh (G. Seulawah Agam, G. Peut Sagoe dan G. Bur Ni Telong) dan Provinsi Sumatera Utara (G. Sinabung-Sibayak dan G. Sorik Marapi). Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi ini dapat dimanfaatkan bagi kalangan masyarakat umum, pendidikan, dan para pengambil kebijakan. Dengan mempelajari atlas ini diharapkan mampu membuka cakrawala dan pengetahuan terkait kegunungapian dan berkah akibat letusan yang ditimbulkan. Masyarakat, lingkungan Pendidikan dan para pengambil kebijakan dapat mengambil sisi positif dari hidup disekitar gunungapi, selain tetap harus waspada terhadap bencana akibat letusan gunungapi yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya.



Gambar 38. Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Edisi Sumatera Bagian Utara

Sumber: Kegiatan PPTRA Tahun 2021



Gambar 39. Indeks Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi

CBO.002. ATLAS GEOSPASIAL INDONESIA EDISI SEJARAH, SUKU, DAN BUDAYA BANGSA & PENGEMBANGAN APLIKASI E-ATLAS NASIONAL VERSI 3.0

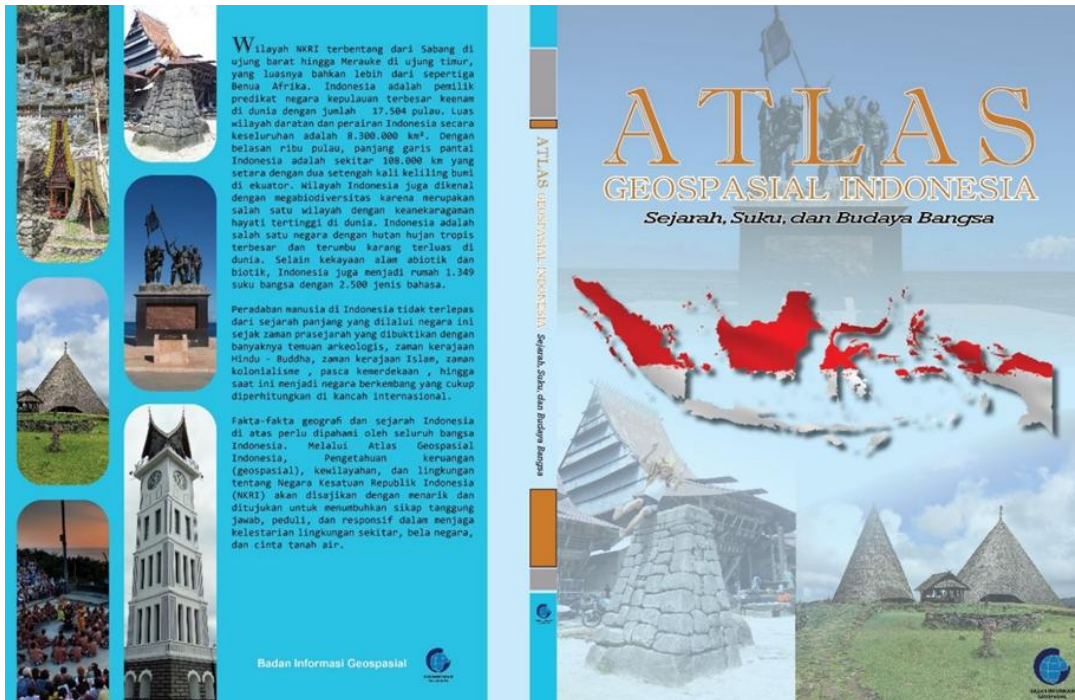
Indonesia adalah pemilik predikat negara kepulauan terbesar keenam di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Luas wilayah daratan dan perairan Indonesia secara keseluruhan adalah 8.300.000 km². Dengan belasan ribu pulau yang dimiliki, Indonesia menjadi rumah bagi 1.349 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa. Peradaban manusia di Indonesia juga tidak terlepas dari sejarah panjang yang dilalui negara ini. Sejak zaman prasejarah yang dibuktikan dengan banyaknya temuan arkeologis, zaman kerajaan Hindu - Budha, zaman kerajaan Islam, zaman kolonialisme , pasca kemerdekaan , hingga saat ini menjadi negara berkembang yang cukup diperhitungkan di kancah internasional.

Fakta-fakta geografi dan sejarah Indonesia perlu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Melalui Atlas Geospasial Indonesia, Pengetahuan keruangan (geospasial), kewilayahan, potensi, dan lingkungan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disajikan dengan menarik dan ditujukan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab, peduli, dan responsif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar, bela negara, dan cinta tanah air.

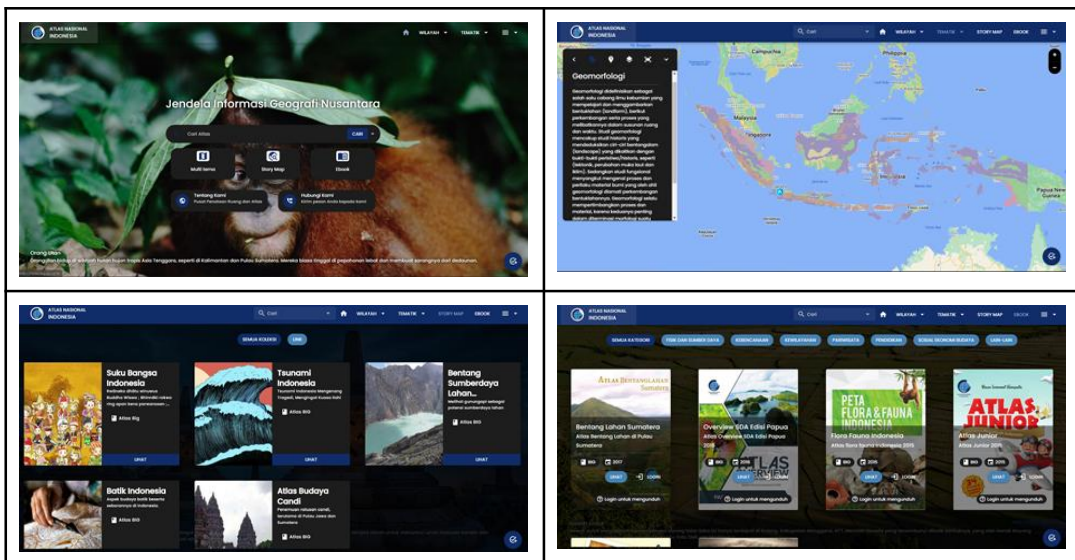
Atlas Geospasial Indonesia (AGI) tahun 2021 ini mengangkat tema Sejarah, Suku, dan Budaya Bangsa setelah pada tahun sebelumnya mengangkat tema fisik dan lingkungan alam. AGI tahun ini mencoba memotret dan menyajikan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia sekaligus menyajikan kekayaan budaya yang ada di setiap region. Terdapat 5 region yaitu Sumatera, Jawa-Bali-Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua. Warisan budaya yang diangkat antara lain meliputi warisan budaya yang bersifat benda seperti bangunan cagar budaya, dan juga yang bersifat tak benda seperti adat istiadat, seni tradisional, pengetahuan tradisional, ritus dan bahasa.

Selain Atlas Geospasial Indonesia dalam bentuk buku, kegiatan ini juga mengembangkan aplikasi e-Atlas Nasional ke versi 3.0. Aplikasi e-Atlas Nasional disusun sejak tahun 2016 sebagai media untuk menyebarluaskan informasi berbentuk Atlas yang diproduksi oleh BIG. Pengembangan e-Atlas dilakukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap perkembangan jaman dan kebutuhan user. Peningkatan dilakukan pada performa, fungsi, fitur, tampilan desain, dan juga

user experience . aplikasi e-Atlas Nasional versi 3.0 dapat diakses melalui alamat atlas.big.go.id.



Gambar 40. Atlas Geospasial Indonesia edisi Sejarah, Suku, dan Budaya Bangsa
Sumber: Kegiatan PPTRA Tahun 2021

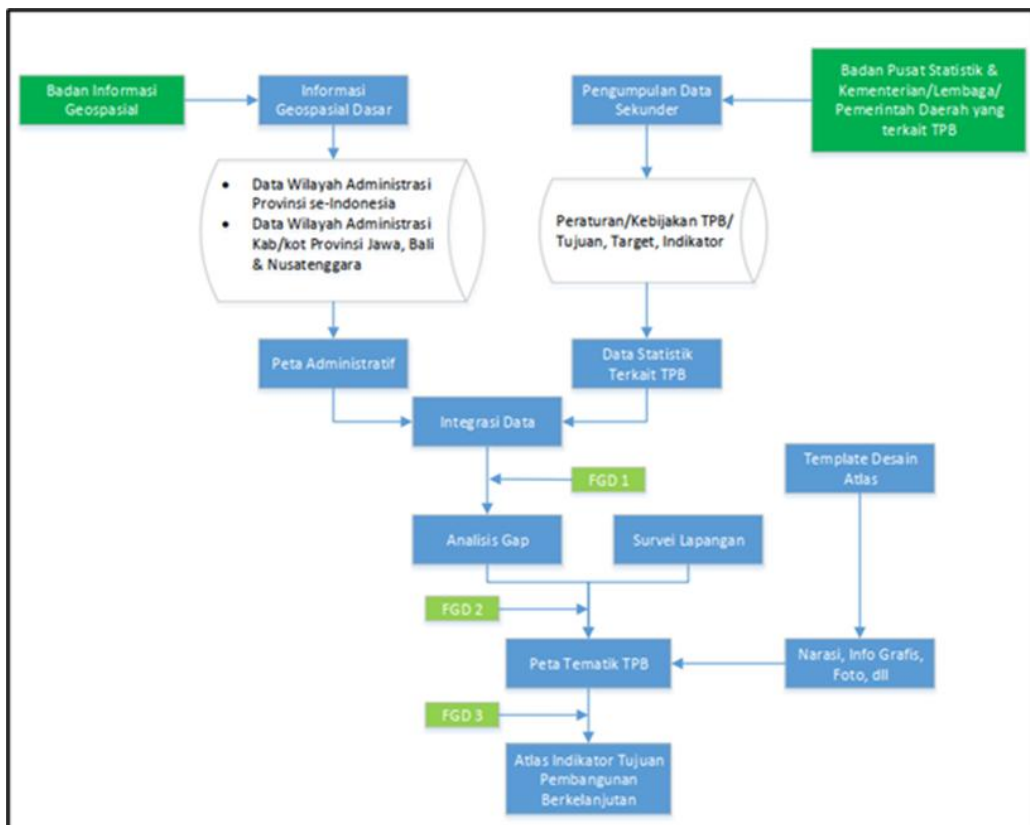


Gambar 41. Aplikasi e-Atlas Nasional versi 3.0

CBO.003. ATLAS INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

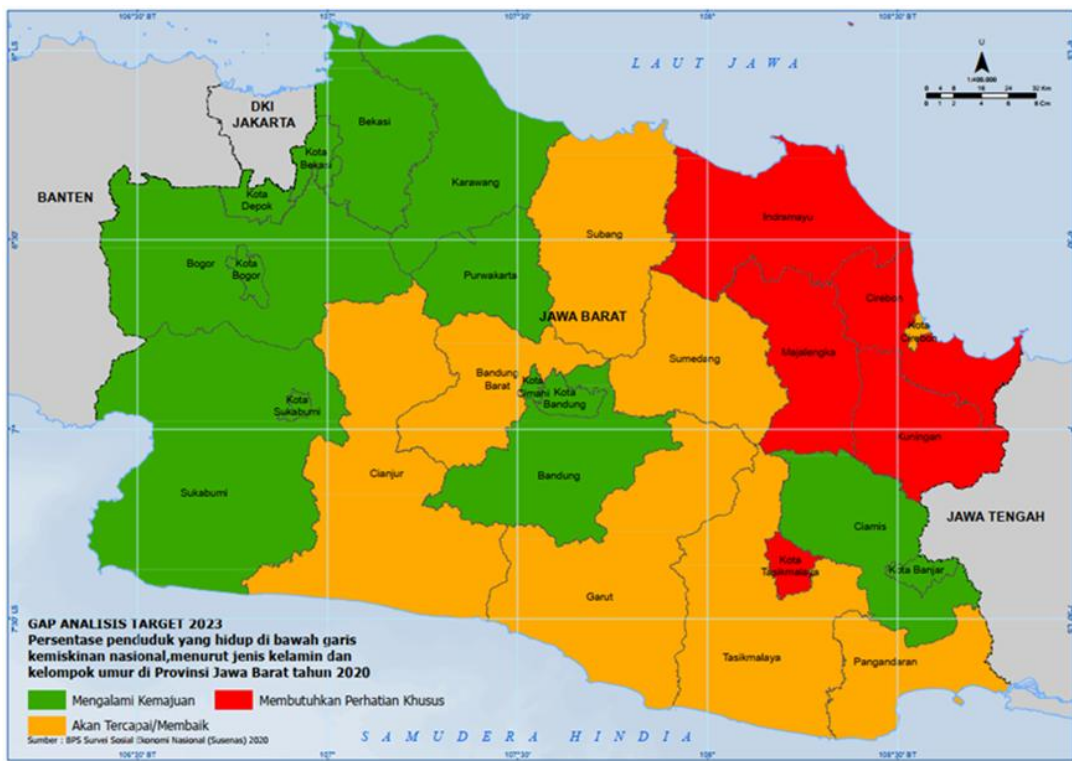
1. Koordinasi teknis dan administrasi
2. Pengumpulan data sekunder terkait TPB
3. Menyusun template desain Atlas
4. Penyiapan peta administrasi Kab/Kota
5. Pelaksanaan Focus Group Discussion
6. Pengolahan dan analisis data
7. Persiapan lapangan
8. Survei lapangan
9. Input data lapangan, integrasi, dan analisis data spasial
10. Penyusunan komponen desain grafis dan Atlas
11. Penyusunan laporan
12. Kontrol kualitas



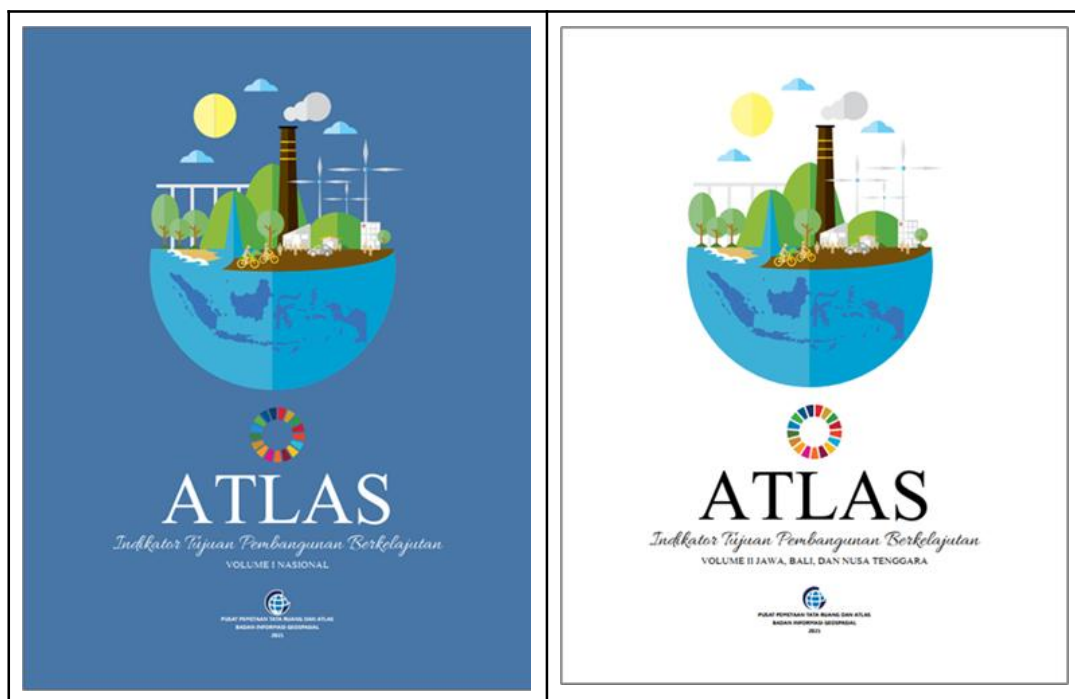
Gambar 42. Diagram Alir Kegiatan Pembuatan Atlas Indikator TPB



Gambar 43. Peta Tematik TPB (Capaian indikator 1.2.1* tingkat provinsi)



Gambar 44. Peta Tematik TPB (Gap Analisis indikator 1.2.1* Provinsi Jawa Barat)



Gambar 45. Buku Atlas Indikator TPB Volume I Nasional dan Volume II Provinsi

CBO.004. ATLAS TAKTUAL NASIONAL INDONESIA: TEMA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI JAWA BARAT

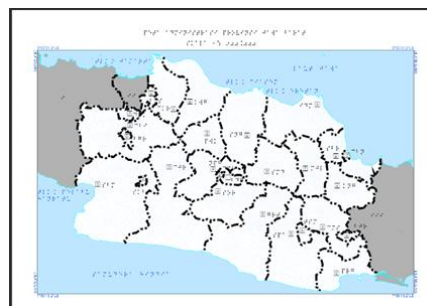
Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan Atlas Taktual Nasional Indonesia dengan tema wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat adalah menyediakan informasi geospasial khususnya bagi penyandang disabilitas Netra. Estimasi Kementerian Kesehatan RI, jumlah penyandang disabilitas netra di Indonesia adalah 1,5 % dari seluruh penduduk atau sekitar 3,75 juta penduduk, baik kategori buta maupun lemah penglihatan. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 40% penduduk penyandang disabilitas netra berada pada usia sekolah (6-18 tahun). Angka ini menggambarkan betapa pentingnya dukungan bagi penyandang disabilitas netra terutama persamaan hak untuk memperoleh pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan maupun untuk mendapatkan dukungan sosial.

Salah satu media yang digunakan untuk mengenalkan informasi geospasial untuk penyandang disabilitas netra adalah melalui Atlas Taktual. Peta taktual disajikan dalam bentuk tiga dimensi, maka peta tersebut mempunyai keterbatasan dalam menyajikan berbagai informasi. Pada umumnya, peta tersebut hanya berisi: satu tema, judul peta yang juga merupakan arah utara dari peta, simbol disajikan dalam bentuk simbol yang sederhana namun perbedaan satu dengan yang lainnya

mempunyai perbedaan yang jelas/ekstrim. Keterangan legenda, toponimi, dan narasi peta dengan menggunakan huruf Braille. Dalam rangka belajar untuk membaca dan memahami peta taktual, seorang penyandang disabilitas netra memerlukan instruktur khusus. Seorang instruktur maupun para penyandang disabilitas netra perlu memahami/mempelajari tentang konsep peta, konsep mengenai keruangan, arah, teknik membaca peta secara sistematis, simbol peta, serta harus memahami bagaimana peta dua dimensi yang dibentuk menjadi model tiga dimensi/timbul.

Pada tahun 2021, Badan Informasi Geospasial membuat Atlas Taktual Nasional Indonesia dengan tema wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Peta administrasi disajikan sampai dengan level administrasi kabupaten. Atlas Taktual Indonesia untuk penyandang disabilitas netra dengan skala yang lebih besar diharapkan dapat memberikan informasi geospasial yang lebih dekat dengan kemampuan mental map dari pengguna. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan uji pemaknaan atlas taktual di SLB N A Citeureup Cimahi, Kota Cimahi. Pelaksanaan uji ini diikuti oleh peserta setingkat SD, SMP, dan SMA. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh peta taktual yang sudah dibuat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas netra. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan atau koreksi atas peta-peta yang sudah dibuat.

DOKUMENTASI KEGIATAN



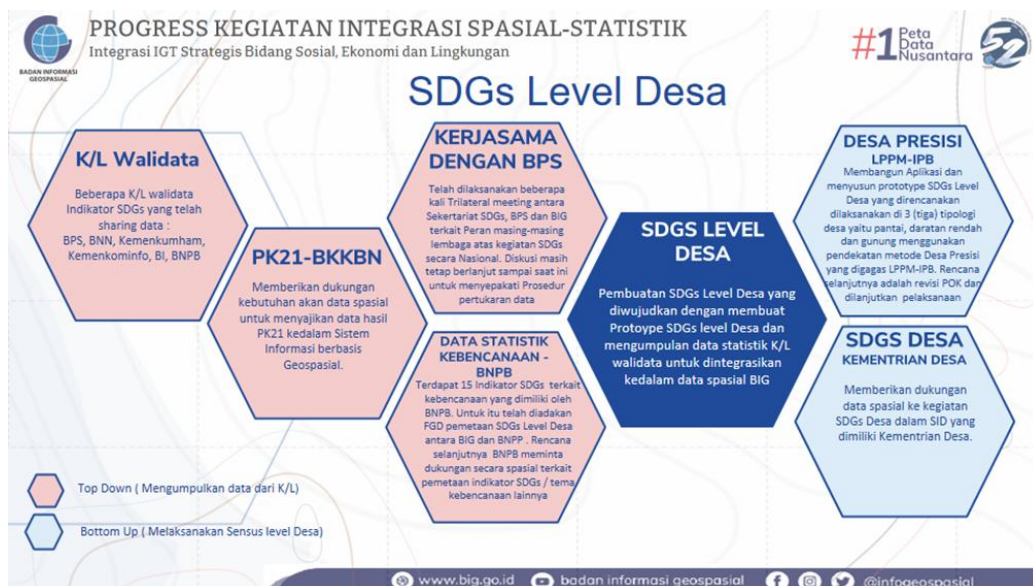


CBO.005. IGT INTEGRASI SPASIAL-STATISTIK 2021

Kegiatan IGT Integrasi spasial-statistik merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas berdasar pada kebutuhan pemerintah terkait visualisasi serta analisis spasial terhadap data statistik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan Utama dari kegiatan ini adalah mengintegrasikan antara Informasi Geospasial Dasar akurat yang dihasilkan oleh BIG dan data statistik yang tepat oleh Kementerian/Lembaga walidata statistik sehingga menghasilkan Peta Geos-Statistik yang lengkap.

Fokus utama kegiatan IGT Integrasi Spasial-Statistik pada tahun 2021 adalah memetakan ketersediaan dan kondisi seluruh data terkait TPB di Indonesia di level Desa, Kenapa Desa? Karena saat ini data administrasi yang dimiliki oleh BIG sudah menyelesaikan sampai dengan level Desa, selain itu Dashboard yang dimiliki Sekretariat Nasional SDGs Indonesia saat ini baru menampilkan data SDGs di level Nasional - Kabupaten.. Metode yang dilakukan diantaranya :

- a. Mengirimkan surat kepada K/L walidata statistik terkait TPB
- b. Mengumpulkan sampel data ke beberapa Kabupaten/Kota di Pulau Jawa



Gambar 46. Kegiatan IGT Integrasi Spasial Statistik

Selain itu, Kegiatan ini juga melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan mencari bentuk ideal bagaimana data Geospasial dan Statistik diintegrasikan dalam suatu bentuk sistem yang tepat. Untuk itulah dilaksanakan :

- Penyusunan Prototipe SDGs Desa dengan Data Desa Presisi oleh LPPM - PB
- Kompetisi pembuatan Aplikasi Spasial bertema SDGs dengan nama Indonesian Geospatial Challenge (IGC) 2021

INDONESIAN Geospatial Challenge 2021

Aplikasi berbasis Informasi Geospasial untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kompetensi pembangunan Aplikasi berbasis Geospasial untuk membantu menjawab Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dibuka untuk seluruh Mahasiswa di Indonesia. 2 (dua) Tim Terbaik akan mendapatkan hadiah, dan menjadi Wakil Indonesia dalam kompetensi serupa di Tingkat ASEAN

Ketentuan Umum :

- Setiap tim Minimal terdiri dari 2 - 4 Orang mahasiswa Indonesia aktif yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi/Universitas di Indonesia.
- Setiap Project Report wajib bertemakan tentang penggunaan Teknologi Informasi Geospasial untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
- Setiap tim dapat menentukan sendiri Rumusan Masalah yang akan digunakan dalam proyek ini. Setiap rumusan masalah wajib terkait dengan salah satu tujuan dalam TPB/SDGs
- Setiap anggota tim wajib menunjukkan surat bukti sebagai mahasiswa aktif dengan menunjukkan surat pengantar dari Ketua Jurusan Perguruan Tinggi/Universitas.
- Setiap peserta hanya boleh tergabung dalam 1 (satu) tim dan mendaftarkan 1(satu) Project Report
- Project yang didaftarkan merupakan karya orisinal dari tim dan belum pernah dikusertakan dan dipublikasikan di Kompetisi sejenis.

Inf lebih lanjut :
https://big.go.id/content/pengumuman/kompetisi-IGC_2021
CP : Nurman (081213430488)

Timeline:

- 27 September - 18 November 2021: Pendaftaran Dibuka
- 16 - 20 November 2021: Penilaian Tahap 1
- 21 - 23 November 2021: Pengumuman 10 Finalis
- 1 - 10 Desember 2021: Presentasi 10 Finalis (online)
- 11 - 18 Desember 2021: Penilaian Tahap 2
- 19 Desember 2021: Pengumuman Pemenang

#1 Peta Data Nusantara

Gambar 47. Indonesian Geospatial Challenge 2021

Hasil dari kegiatan IGT Integrasi Spasial-Statistik pada periode pertama di tahun 2021 ini diantaranya :

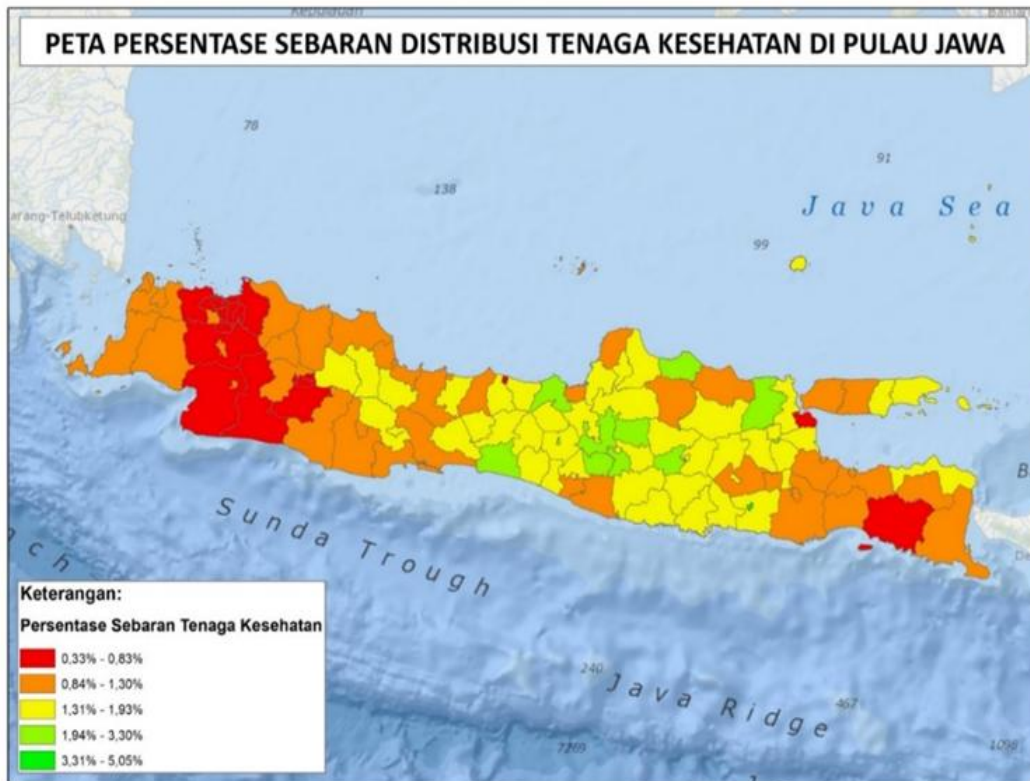
- Informasi Ketersediaan data statistik terkait SDGs di K/L dan beberapa Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

- b. Perjanjian Kerjasama dengan BKKBN dan Kemendesa PDDT terkait penyediaan data statistik dan Geospasial untuk membantu menjawab TPB
- c. Prototipe SDGs Level Desa menggunakan data desa presisi kerjasama dengan LPPM-IPB
- d. Pemenang Kompetisi IGC 2021 yang akan mewakili Indonesia dalam *ASEAN Geospatial Challenge 2022*

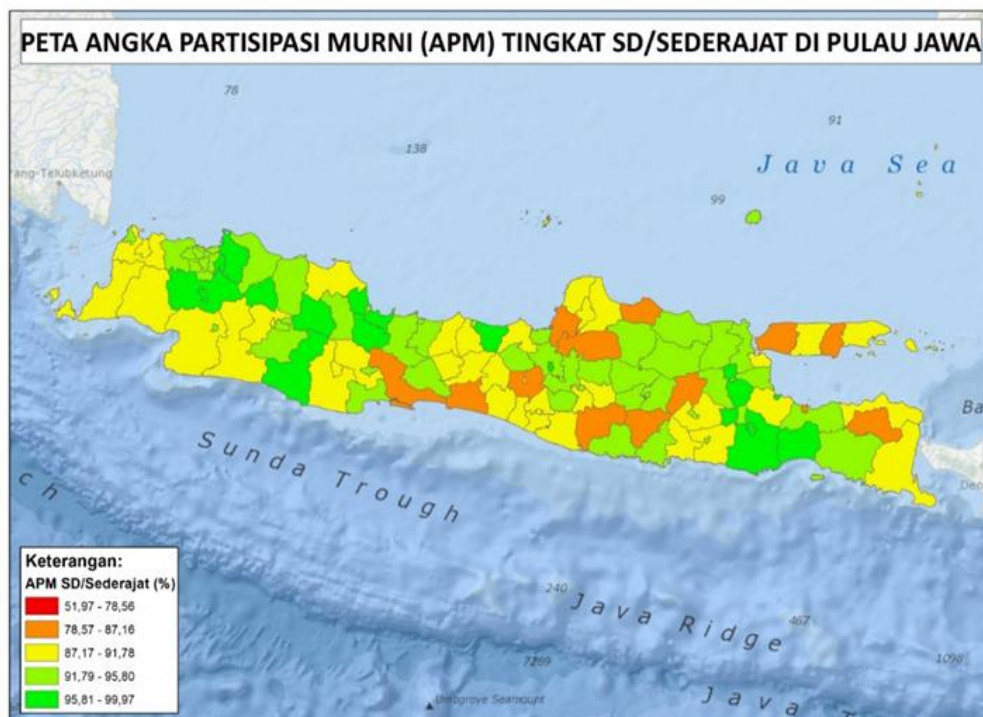


Gambar 48. Pemenang IGC 2021

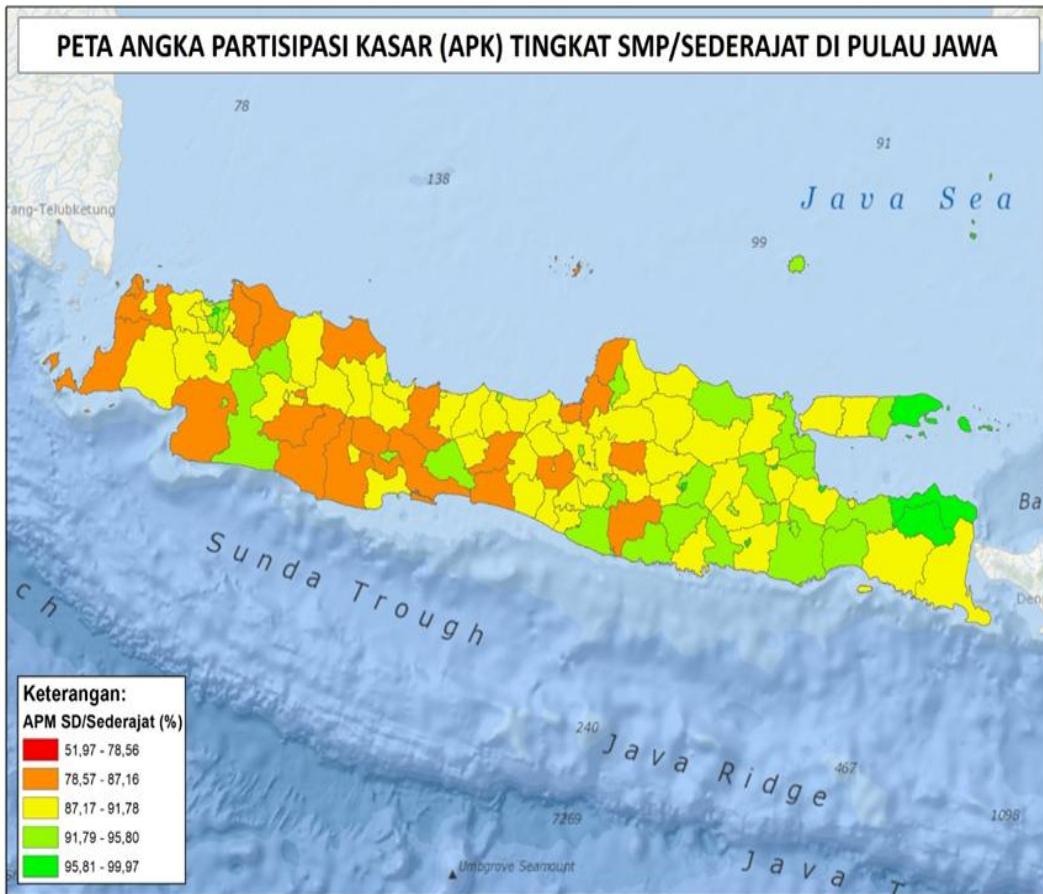
- e. Telah tercapai luasan 133.157 Km² (seluruh Pulau Jawa) dalam peng-integrasi-an spasial statistik untuk beberapa indikator, di antaranya :
 - Indikator 3.c.1. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan
 - Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat)
 - Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat dan SMA/SMK/ sederajat,



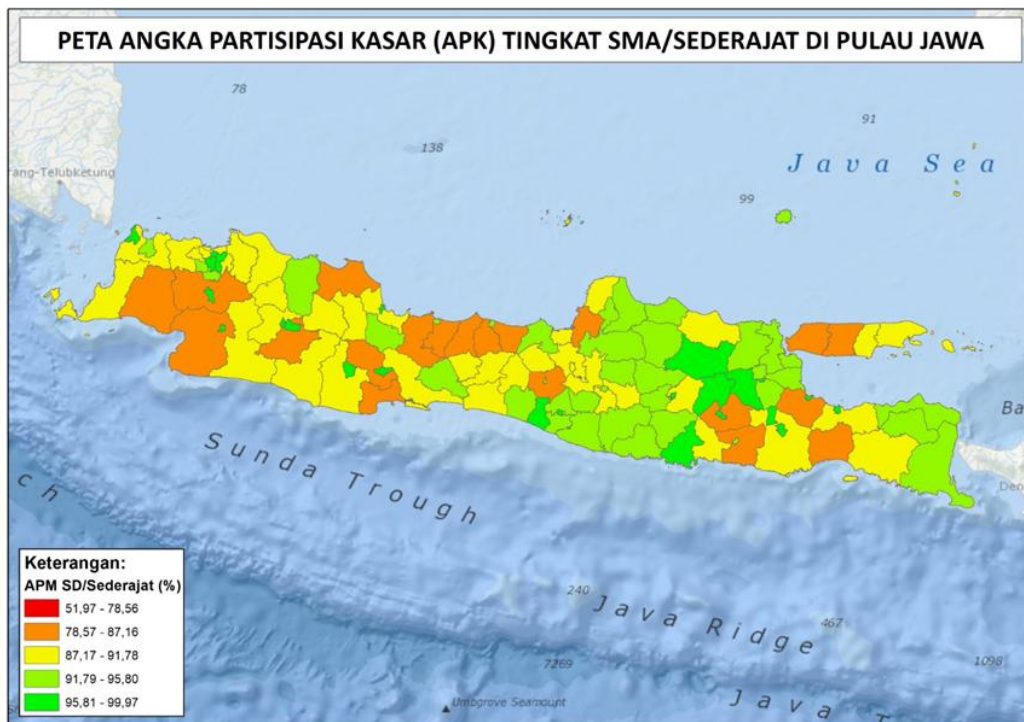
Gambar 49. Peta Sebaran Distribusi Tenaga Kesehatan di Pulau Jawa (Indikator 3.c.1. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan)



Gambar 50. Peta Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat di Pulau Jawa (Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat)



Gambar 51. Peta Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat di Pulau Jawa. (Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat)



Gambar 52. Peta Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ sederajat di Pulau Jawa (Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ sederajat)



Gambar 53. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kemendes PDDT

Selanjutnya pada tahun 2022 direncanakan untuk mulai mematangkan prototipe SDGs level Desa dengan menambahkan data-data yang dimiliki oleh Kementerian Desa PDDT, data BKKBN dan data statistik lain demi memperkaya SDGs Level Desa. Selain itu untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan konsep SDGs Desa akan dilaksanakan *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan mengundang Instansi, akademisi dan praktisi terkait SDGs sehingga motto dari SDGs “*No one left behind*” akan dapat tercapai.

CBO.006. PENYUSUNAN IGT NERACA SPASIAL SUMBERDAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP

Neraca sumberdaya alam sebagai salah informasi geospasial tematik sudah dikenal cukup lama sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan, khususnya penetapan fungsi ruang. Dalam perkembangannya, neraca sumberdaya dan lingkungan hidup yang menggambarkan cadangan/aset sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perubahannya semakin dibutuhkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 3 dan 4 menjadikan neraca sumberdaya dan lingkungan hidup sebagai salah satu instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian dari instrumen ekonomi

lingkungan hidup. Neraca disajikan dalam bentuk neraca aset dalam satuan fisik dan neraca aset dalam satuan uang.

Sebagai bentuk dukungan untuk menyusun neraca aset, yang nantinya akan dipublikasikan dalam Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (Sisnerling), Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) melakukan penyusunan neraca sumberdaya lahan dalam skala nasional. Neraca yang disusun menggunakan klasifikasi SEEA (Systems of Environmental Economic Accounting) Central Framework 2012 sebagai acuan global dalam klasifikasi penutup lahan. Dalam proses penyusunannya, BIG berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama mengawal kegiatan ini agar sesuai dengan target yang diharapkan.

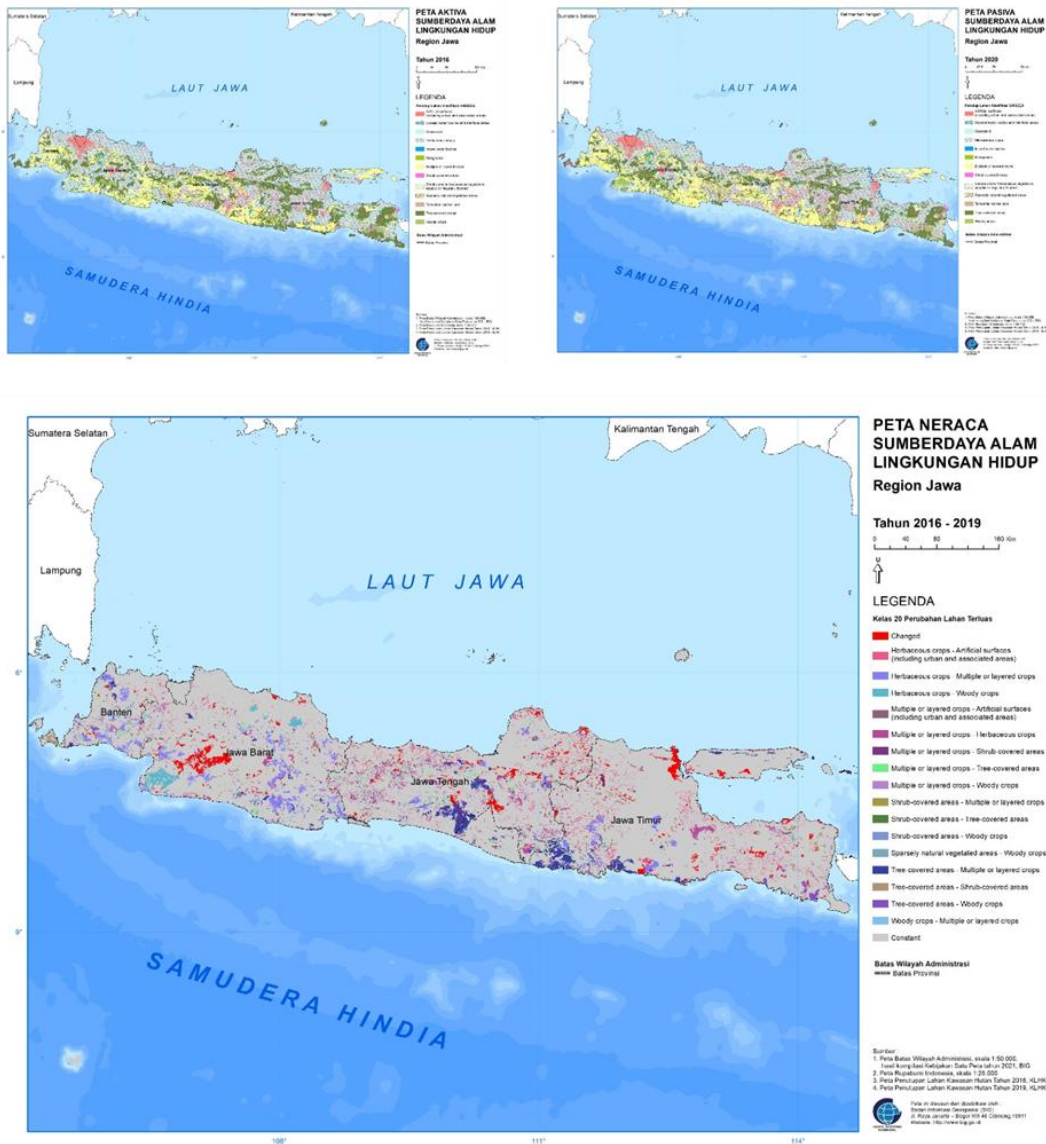
Hasil dari kegiatan ini adalah pedoman penyusunan neraca spasial penutup lahan nasional berdasarkan klasifikasi SEEA. Pedoman ini berisi kumpulan deskripsi klasifikasi penutup lahan skala nasional (1:250.000) dan reklasifikasinya menjadi penutup lahan SEEA-Central Framework 2012. Proses reklasifikasi dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan akan peta penutup lahan skala nasional (1:250.000) yang dibutuhkan untuk Sisnerling (Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia) yang diterbitkan oleh BPS setiap tahun dan disusun berdasarkan metodologi SEEA Central Framework 2012. Selain proses reklasifikasi, pedoman ini juga menjelaskan beberapa metode standar dalam penyusunan neraca sumberdaya. Metode penyusunan neraca sendiri mengacu kepada SNI 6728.2:2015 tentang Penyusunan neraca sumber daya - Bagian 2: Sumber daya hutan spasial serta SNI 6728.3:2015 tentang Penyusunan neraca spasial sumber daya alam - Bagian 3: Sumber daya lahan.

PEDOMAN
**Penyusunan Neraca Spasial Penutup Lahan
Nasional Berdasarkan Klasifikasi
SEEA-CF 2012**



2021

Selain pedoman, kegiatan ini juga menghasilkan peta prototype neraca spasial penutup lahan nasional menggunakan klasifikasi SEEA. Peta ini disusun dengan menggunakan peta penutupan lahan yang diterbitkan oleh KLHK untuk tahun 2016 dan 2020. Klasifikasi penutupan lahan yang ada dalam peta tersebut di reklasifikasi kedalam kelas penutup lahan SEEA Central Framework 2012 yang sesuai dengan skema reklasifikasi dalam pedoman yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Kegiatan Penyusunan IGT Neraca SDA-LH telah tercapai seluas 1.899.695 Km².



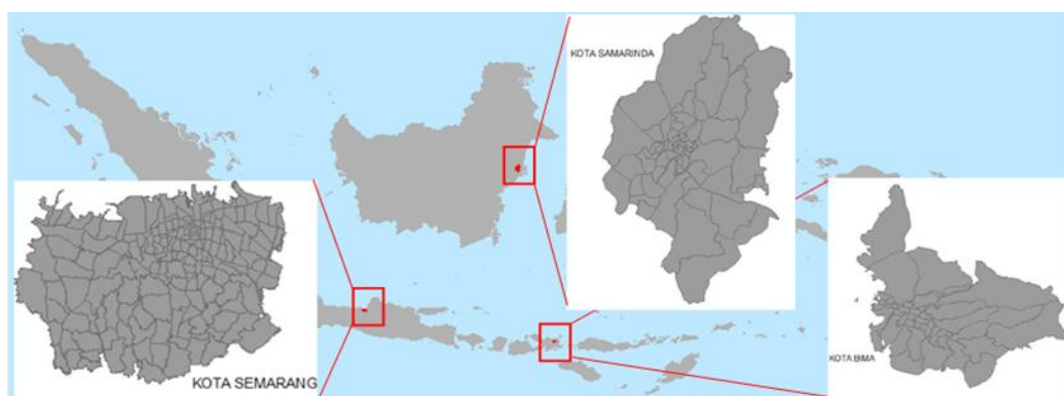
Gambar 54. Peta Prototype Neraca SDA-LH untuk Region Jawa

CBO.007. IGT PERINGATAN DINI BANJIR

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Banjir merupakan jenis bencana yang masuk dalam kategori bencana alam. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Kegiatan IGT Peringatan Dini Banjir pada tahun 2021 dimaksudkan untuk dapat menyusun model peringatan dini banjir untuk dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki bahaya banjir. Pemodelan tersebut akan dilakukan pada daerah percontohan. Dengan adanya penyusunan model untuk IGT Peringatan Dini Banjir, pemodelan ini diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk keperluan peringatan dini maupun manajemen kebencanaan. Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan

IGT peringatan dini banjir melalui pemodelan yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan pengguna IGT Peringatan Dini Banjir lainnya.

Pemodelan akan dilakukan untuk prediksi bahaya banjir luapan sungai untuk 3 Kota yaitu; Kota Semarang (390,8 Km²), Kota Samarinda (745,71 Km²) dan Kota Bima (223,38 Km²). Ketiga Kota tersebut tersebut dipilih karena selain ketiga kota tersebut sudah memiliki peta rawan banjir yang dibuat sesuai dengan SNI, daerah tersebut juga berada pada lokasi yang memang rawan akan banjir. Sebagai daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan dan ekonomi tentunya dampak yang diakibatkan oleh banjir cukup besar, oleh karena itu peringatan dini banjir sangat penting.

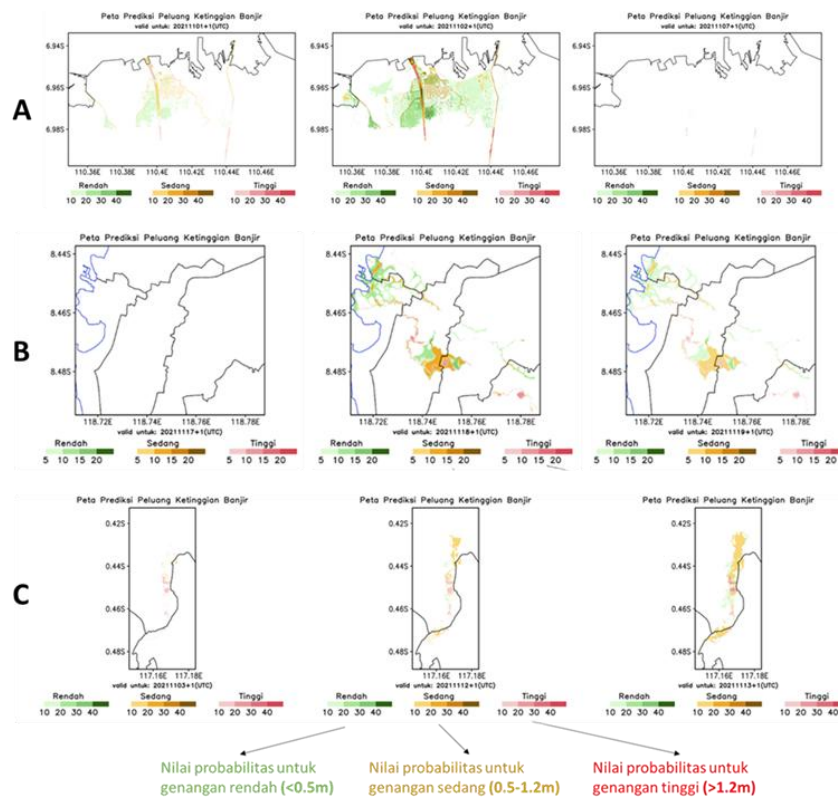


Gambar 55. Lingkup Kegiatan IGT Peringatan Dini Banjir TA 2021

Dalam penyusunan IGT Peringatan Dini Banjir, terdapat dua bagian besar dalam tahapan prosesnya, yaitu: 1) pembangunan database dan 2) sistem prediksi operasional. Pada tahapan pertama, pembangunan database bertujuan untuk mendapatkan satu set peta prediksi banjir yang dibangun berdasarkan data kejadian banjir historis yang tercatat resmi oleh BNPB. Selain itu, tahap pertama ini juga bertujuan untuk mencari batas (*threshold*) besaran curah hujan penyebab banjir, serta menghitung peluang banjir historis berdasarkan analisis hubungan sebaran data hujan dan simulasi debit air. Hasil-hasil pada tahap pertama ini bersifat statis dan dijadikan sebagai database sebagai masukan data pada proses analisis tahap kedua.

Pada proses tahap kedua, untuk memperoleh sistem prediksi operasional, dilakukan prediksi banjir rutin harian (operasional) berdasarkan prediksi cuaca dinamis. Prediksi cuaca yang dilakukan akan menghasilkan nilai peluang hujan

yang dapat melewati nilai threshold yang diperoleh berdasarkan analisis ensemble yang terkalibrasi. Selanjutnya, nilai peluang ini digabung dengan peta banjir dari database yang dihasilkan pada proses tahap pertama, sehingga nantinya dapat menghasilkan peta prediksi banjir harian.



Hasil prediksi banjir wilayah Semarang (A), Bima (B), dan Samarinda (C). Warna hijau, orange, dan merah menunjukkan nilai probabilitas untuk genangan rendah ($<0.5\text{ m}</math>), genangan sedang ($0.5-1.2\text{ m}</math>), dan genangan tinggi ($>1.2\text{ m}</math>).$$$

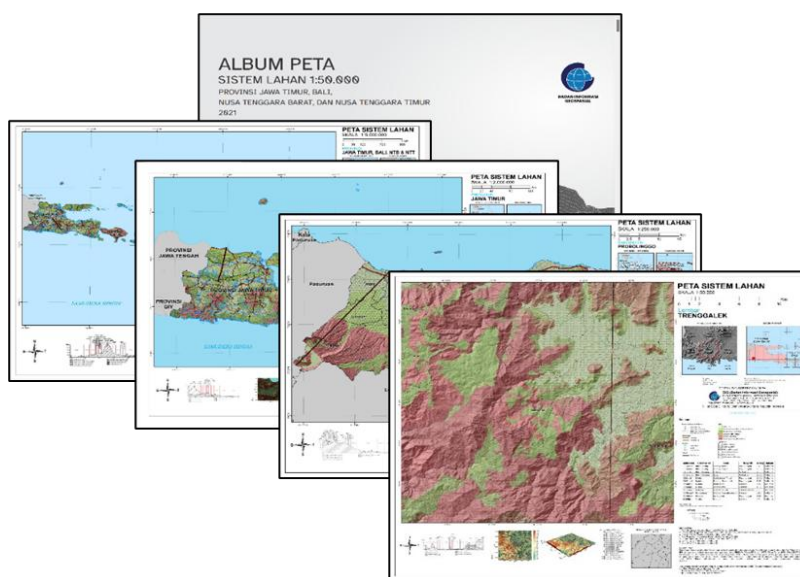
CBO.008.Peta Sistem Lahan 1:50.000

Informasi Geospasial Sistem Lahan Skala 1:50.000 merupakan produk informasi geospasial tematik (IGT) sebagai penjabaran dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang telah direvisi melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan perundangannya. Peta Sistem Lahan skala 1:50.000 merupakan salah satu bentuk informasi geospasial tematik sumberdaya alam terintegrasi. Peta Sistem Lahan skala 1:50.000 ini merupakan peta tematik yang mengintegrasikan informasi karakteristik fisik dan lingkungan. Secara praktis, peta ini memuat beberapa informasi antara lain morfologi, litologi, tanah, iklim, penggunaan lahan/vegetasi dan hidrologi. Informasi fisik dan lingkungan ini bersumber pada beberapa K/L sebagai Wali Data IGT.

Kegiatan Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000 tahun 2021 dilaksanakan secara Swakelola Tipe II. Pelaksanaan penyelenggaraan Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000 tahun 2021 mencakup tiga kegiatan yang dilakukan yaitu 1) Pemetaan Sistem Lahan Skala 1:50.000 di empat provinsi (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur); 2) Penyusunan Struktur Basisdata Sistem Lahan 1:50.000; dan 3) Penyusunan Pedoman Survei Lapangan Sistem Lahan Skala 1:50.000.

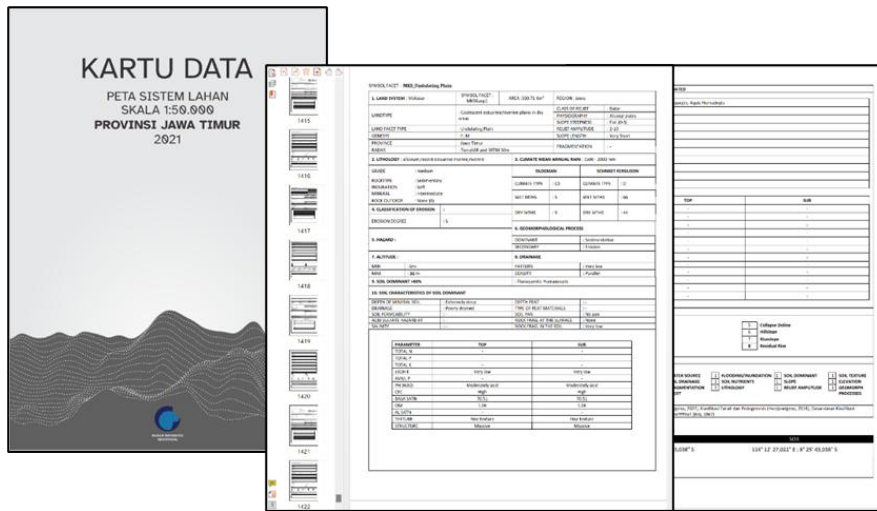
1. Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000

Album peta Sistem Lahan dibuat dalam bentuk digital hasil export dari peta yang sudah dilakukan layout. Album peta dibuat dalam versi seamless untuk keempat provinsi, seamless untuk setiap provinsi, 1 (satu) kabupaten di setiap provinsi, serta 1 (satu) NLP untuk setiap provinsi.



Gambar 56. File hasil album digital Peta Sistem Lahan dan beberapa contoh hasil layouting untuk album digital *seamless*

Kartu Data merupakan susunan informasi yang berisi parameter-parameter yang menggambarkan karakteristik setiap faset lahan dalam kelas-kelas sistem lahan. Kartu Data disusun berdasarkan region, dimana terdapat 4 (empat) Kartu Data yang dihasilkan yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.



Gambar 57. Contoh Hasil Kartu Data Sistem Lahan

2. Penyusunan Struktur Basisdata Sistem Lahan 1:50.000

Data atribut penyerta pada dataset Sistem Lahan cukup kompleks sehingga direkomendasikan field pada data Sistem Lahan dipisahkan antara field informasi utama yang melekat pada shp SISTEM_LAHAN_50K.shp dan informasi pendukung/ informasi sekunder yang disajikan dalam tabel dan dikaitkan dengan shapefile melalui relationship class. Berikut salah satu contoh usulan struktur basis data pada field utama Peta Sistem Lahan 1:50.000.

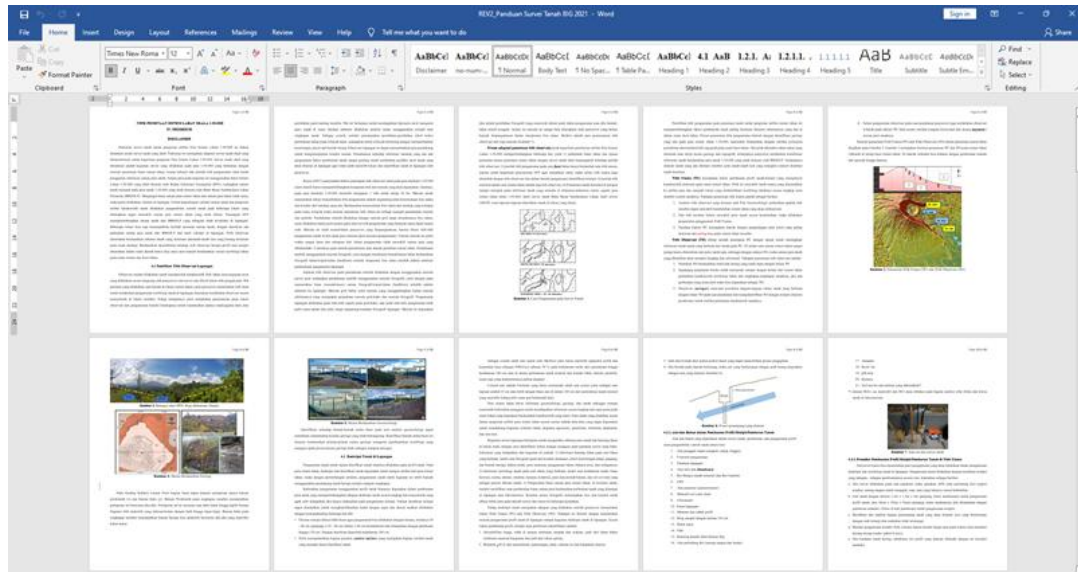
Usulan field utama Peta Sistem Lahan 1:50.000 yang melekat pada data spasial

Nama	Alias	Field Type	Domain
FCODE	Feature Code	String	
METADATA	Metadata	String	
REMARK	Catatan	String	
SRS_ID	Spatial Reference System Identifier	String	
THNBUAT	Year, Month and Date of Updated	String	
REGION	Region	String	REG
LSYSNAM	Land System Name	String	LSN
LFACENG	Land Facet Type (English)	String	LFEN

Nama	Alias	Field Type	Domain
LTYPENG	Land Type (English)	String	LTEN
SYMLSYS	Symbol of Land System	String	SLS
SYMLFAC	Symbol of Land Facet	String	SLF
FACETCOD	Kode Facet	String	
SLOPE	Slope (%)	String	SLP
RELCLASS	Classes of Relief (English)	String	RELEN
RELAMP	Relief Amplitude (m)	String	RELAM
LITHOENG	Lithology (English)	String	LITOE
ROCKENG	Rock Type (English)	String	ROCKEN
SOILDOM	Soil Dominant (Subgroup)	String	
SOILASC	Soil Association (Subgroup)	String	
DPEAT	Peat Depth (cm) Dominant	String	PD
ANNRAIN	Annual Rain (mm)	String	

3. Penyusunan Pedoman Survei Lapangan Sistem Lahan Skala 1:50.000

Hasil penyusunan pedoman ini adalah draf Pedoman Survei Lapangan Pemetaan Sistem Skala 1:50.000. Draft Pedoman Survei Lapangan meliputi Aspek Tanah, Geologi dan Geomorfologi.



Gambar 58. Contoh Draft Dokumen Pedoman Survei Lapangan Pemetaan Sistem Lahan 1:50.000

CB0.009 PEMETAAN REAKSI CEPAT KEBENCANAAN

Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan adalah kegiatan pencarian data, pengumpulan data, pengolahan data, dan visualisasi data geospasial secara cepat pada setiap bagian atau tahapan dari siklus kebencanaan sehingga kebutuhan informasi terhadap suatu peristiwa kebencanaan dapat diketahui secara jelas dan lengkap dan dapat dipenuhi sesuai standar yang berlaku baik itu sebelum, saat ataupun setelah terjadinya bencana. Informasi geospasial yang dihasilkan dari kegiatan Pemetaan Reaksi Cepat Kebencanaan pada setiap tahapan siklus kebencanaan dapat dijadikan sebagai kerangka kerja (framework) untuk mendukung kebijakan dalam pengelolaan bencana (initial disaster management) dan asesmen bencana pada semua tahapan siklus kebencanaan atau dengan kata lain pada semua tahapan kebencanaan yaitu pra-bencana, saat-bencana, hingga pasca-bencana.

Kegiatan pemetaan cepat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi, instrument, tahapan dan sumber data untuk menghasilkan data yang dibutuhkan secara cepat dan bermanfaat. Pada tahapan pencarian data, identifikasi dan komunikasi dengan pihak walidata merupakan salah strategi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait data-data yang diperlukan. Pada tahapan pengumpulan data, beberapa strategi dan instrumen yang digunakan adalah survei secara teristris ataupun survey dengan menggunakan UAV atau Drone

yang mana kegiatannya dilakukan oleh BIG, dilakukan oleh BIG dengan kolaborasi dengan BNPB ataupun BPBD. Pada tahapan pengolahan data, analisis spasial menggunakan data statistik, data IGD maupun IGT kebencanaan wilayah terkait merupakan strategi yang dilakukan dalam kegiatan ini, Pada tahapan penyajian data metode yang dilakukan adalah penyajian data secara softcopy dan hardcopy, baik itu dalam bentuk peta, laporan, ataupun disajikan dalam suatu portal atau web.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain adalah:

1. Kegiatan Survey Potensi longsor di wilayah Cihanjuang, Sumedang dilakukan untuk memetakan wilayah yang mungkin akan terjadi longsor lanjutan di wilayah sekitar longsor di Desa Cihanjuang.
2. Pemetaan Monitoring Gumuk Pasir sebagai dasar Mitigasi Bencana Banjir dan Tsunami di Yogyakarta. Luasnya cakupan pemetaan untuk wilayah Gumuk pasir ini adalah sekitar 5 km².
3. Pemetaan Cepat Bencana Banjir di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Tim SRC turun ke lokasi bencana tepatnya di Kabupaten Malaka pada tanggal 14-21 April 2021 sesuai dengan permintaan BNPB untuk melakukan pemetaan udara dengan menggunakan drone. Tim SRC melakukan pemetaan drone dan kemudian hasilnya diserahkan ke BNPB untuk dimanfaatkan lebih jauh lagi untuk keperluan tanggap bencana dan juga pasca bencana.



Gambar 59. Hasil pemetaan drone di 2 lokasi di Kabupaten Malaka.

4. Survei analisis potensi bencana longsor di Kabupaten Sukabumi. Wilayah yang menjadi fokus dari kegiatan survey ini adalah wilayah yang berada dekat dengan sesar Cimandiri.



Gambar 60. Peta Potensi Bencana Longsor di sebagian wilayah Kab. Sukabumi

5. Pemetaan wilayah terdampak Banjir di Jasinga, Kab. Bogor dan Analisis Penyebab terjadinya Banjir di Wilayah tersebut.
6. Survey Validasi Lapangan dan Pemetaan Wilayah Tambang di Wilayah Gunung Merapi



Gambar 61. Area tambang yang dilakukan pemotretan udara

7. Kegiatan analisis terhadap penyebab banjir Sintang di Kalimantan Barat
8. Penyediaan Data Dasar dan Tematik kebencanaan untuk Bencana Letusan Gunung Semeru
9. Sertifikasi Pilot Drone

Manfaat kegiatan pada Indikator Kinerja Program 02 (IKP02)

1. Kegiatan penyelenggaraan IGT strategis bermanfaat bagi K/L lain maupun Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi geospasial yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun dalam penanggulangan kebencanaan
2. Sebagai bentuk atau sarana geoliterasi bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan geospasial tentang wilayah NKRI

3.3. REALISASI ANGGARAN

3.3.1. PENGANGGARAN

Pada tahun 2021 pagu anggaran Deputi Bidang IGT sebesar Rp **22,432,323,000,-** Detail alokasi anggaran per Rincian Output sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Pagu Alokasi Anggaran Deputi Bidang IGT Per Rincian Output Tahun 2021

Rincian Output		Pagu
6447	Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	22,432,323,000
6447.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	8,651,160,000
ABT.001	Bantuan Teknis Rekomendasi Peta Rencana Detil Tata Ruang	0
ABT.002	Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang	2,442,053,000
ABT.003	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit Terstandar	813,362,000
ABT.004	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar	715,663,000
ABT.005	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Ijin Lokasi Terbina	744,052,000
ABT.006	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina	813,273,000
ABT.007	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina	765,152,000
ABT.008	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina	486,340,000
ABT.009	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina	695,695,000
ABT.010	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina	1,175,570,000

Rincian Output		Pagu
6447.CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	13,781,163,000
CBO.001	Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	898,540,000
CBO.002	Atlas Geospasial Indonesia	1,243,594,000
CBO.003	Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	953,534,000
CBO.004	Atlas Taktual Indonesia	275,685,000
CBO.005	IGT Integrasi Spasial-Statistik	1,760,776,000
CBO.006	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup	985,818,000
CBO.007	IGT Peringatan Dini Banjir	515,101,000
CBO.008	Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000	6,172,441,000
CBO.009	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	975,674,000

3.3.2. PELAPORAN KEUANGAN

Pada Tahun 2021, penetapan pagu anggaran Deputi Bidang IGT mengalami 4 (empat) kali revisi DIPA DJA , 3 (tiga) kali revisi DIPA Kanwil dan 1 (satu) kali revisi POK untuk Pusat PTRA dan mengalami 6 (enam) kali revisi DIPA dan 1 (satu) kali revisi POK untuk PPIT. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dari total anggaran Deputi Bidang IGT sebesar Rp **22,432,323,000,-** telah direalisasikan sebesar Rp **20,560,155,663,-** atau sebesar **91.65%**. Secara persentase serapan tersebut tergolong lebih besar dari serapan tahun 2020 yang mencapai 79.90% .

Tabel 13. Realisasi Anggaran DBIGT per Rincian Output TA 2021

Rincian Output		Pagu	Realisasi	%
6447	Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	22,432,323,000	20,560,155,663	91.65
6447.ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	8,651,160,000	7,878,791,460	91.07
ABT.001	Bantuan Teknis Rekomendasi Peta Rencana Detil Tata Ruang	0	0	0.00
ABT.002	Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang	2,442,053,000	2,224,536,173	91.09
ABT.003	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit Terstandar	813,362,000	707,260,530	86.96
ABT.004	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya	715,663,000	670,549,232	93.70

Rincian Output		Pagu	Realisasi	%
	Terstandar			
ABT.005	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Ijin Lokasi Terbina	744,052,000	656,939,354	88.29
ABT.006	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina	813,273,000	700,719,734	86.16
ABT.007	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina	765,152,000	718,425,811	93.89
ABT.008	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina	486,340,000	441,586,660	90.80
ABT.009	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina	695,695,000	673,341,169	96.79
ABT.010	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina	1,175,570,000	1,085,432,797	92.33
6447.CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	13,781,163,000	12,681,364,203	92.02
CBO.001	Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	898,540,000	861,331,237	95.86
CBO.002	Atlas Geospasial Indonesia	1,243,594,000	1,073,606,112	86.33
CBO.003	Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	953,534,000	910,233,900	95.46
CBO.004	Atlas Taktual Indonesia	275,685,000	229,378,542	83.20
CBO.005	IGT Integrasi Spasial-Statistik	1,760,776,000	1,371,702,553	77.90
CBO.006	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup	985,818,000	890,388,151	90.32
CBO.007	IGT Peringatan Dini Banjir	515,101,000	483,511,055	93.87
CBO.008	Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000	6,172,441,000	5,927,359,089	96.03
CBO.009	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	975,674,000	933,853,564	95.71

Sumber : Laporan Capaian Output SAS, 2021

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran TA 2021 yang disampaikan Sekretaris Utama BIG melalui Nota Dinas Nomor B-8.1/SESMA/PR.02.02/2/2022 tanggal 8 Februari 2022 diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Informasi Geospasial adalah 97.75 dengan kriteria Sangat Baik.

NKA 2021 Unit Kerja Eselon 1

No	Unit Kerja	NKA	Kriteria
1	Sekretariat Utama	98,31	Sangat Baik
2	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik	97,75	Sangat Baik
3	Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	97,68	Sangat Baik
	Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (Non PNBK)	98,05	Sangat Baik
4	Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar	97,49	Sangat Baik

Perhitungan penilaian NKA ini diperoleh dari hasil capaian sasaran, capaian keluaran, nilai efisiensi, realisasi anggaran, dan konsistensi serapan anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD).

3.3.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA KEUANGAN

Secara prinsip, Deputi Bidang IGT menggunakan model pembiayaan yang efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan tujuan dan sasaran tetap tercapai. Persentase serapan Deputi Bidang IGT 2021 mencapai 91.65%, angka menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia sudah dimanfaatkan secara optimal. Prinsip penggunaan anggaran yang efektif dapat diukur keberhasilannya melalui output yang dihasilkan dan outcome bagi pihak lain, sementara prinsip penggunaan anggaran yang efisien dapat dilihat pada proses bisnis yang dijalankan. Prinsip efisien tetap memomorsatukan hasil yang akan dicapai.

Penggunaan anggaran yang efisien di Deputi Bidang IGT melalui mekanisme satu pintu. Makna dari satu pintu yaitu setiap pengajuan dan pengeluaran anggaran harus memperoleh persetujuan dari pejabat struktural setingkat Eselon II dan Pejabat Pembuat Komitmen. Mekanisme ini untuk mengurangi inefisiensi anggaran yang tidak diinginkan. Persetujuan anggaran didasarkan atas substansi kegiatan yang diajukan oleh penanggung jawab sub kegiatan sehingga tujuan penganggaran berbasis kinerja dapat tercapai. Penganggaran Deputi Bidang IGT berbasis online, terpadu dengan sistem penganggaran di BIG. Pemantauan anggaran dan penyerapan dapat dilakukan setiap saat melalui desktop online maupun via gawai.

Pengawasan keuangan yang ketat dilakukan melalui sistem monitoring Deputi Bidang IGT setiap di awal bulan. Aktivitas ini merupakan bagian dari pengawasan dan efektivitas anggaran. Deputi Bidang IGT mengarahkan agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan meniadakan setiap bentuk pembiayaan yang melenceng dari tujuan kegiatan. Efisiensi pembiayaan juga

dapat dilihat dari bisnis proses kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* kegiatan Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui daring, telah memangkas anggaran rapat paket meeting.

MONITORING DAN EVALUASI DEPUTI BIDANG IGT

Untuk mengawal arah kebijakan dan strategi sekaligus memantau dan mengendalikan aktivitas kegiatan di lingkungan Kedeputan Bidang IGT maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Aktivitas monitoring dan evaluasi bulanan seperti keterangan di bawah ini:

1. Senin, 10 Mei 2021, rapat monitoring dan evaluasi Triwulan 1, yang membahas :

- Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di lingkup kedeputan IGT selama Triwulan I antara lain:
 - ❖ Terkait Pembinaan perlu adanya koordinasi antara IGT dan IGD, diharapkan ada satu pintu pembinaan yaitu satu pintu pembinaan rekomendasi peta dasar yang pelaksanaannya melalui pokja
 - ❖ Terkait dengan RB, perlu dilakukan persiapan di semua area perubahan agar nilai RB meningkat dari tahun sebelumnya, perlu diperhatikan juga dengan jadwal – jadwal dalam pelaksanaan RB baik jadwal pengisian LKE, Penilaian Asesor, inputing LKE, dll.



R B

1. Batas waktu penyampaian PMPRB yang semula paling lambat tanggal 30 April 2021 menjadi 30 Juli 2021.
2. Periode waktu pengisian dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. **Tanggal 2 Juni – 18 Juni 2021** (bagi Kementerian/Lembaga);
 - b. **Tanggal 21 Juni – 2 Juli 2021** (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WIB/Waktu Indonesia Barat);
 - c. **Tanggal 5 Juli – 16 Juli 2021** (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WITA/Waktu Indonesia Tengah);
 - d. **Tanggal 19 Juli – 30 Juli 2021** (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WIT/ Waktu Indonesia Timur).

Note :

LKE ZI / WBK :

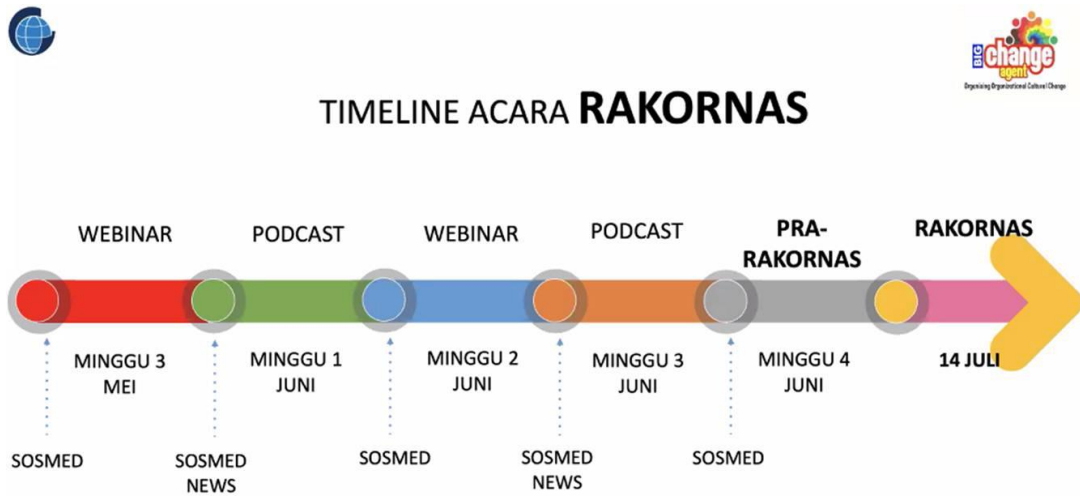
- Tim Penilai Kedeputan : 11 - 18 Mei 2021
- Tim Penilai Internal : 19 Mei 2021



- ❖ **Agenda Rakornas.** Rakornas yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli ini juga perlu dilakukan persiapan. Selain acara Rakornas itu sendiri juga akan ada acara pendamping seperti: Webinar, Podcast

dan acara Pra Rakornas. Panitia Rakornas melibatkan Agen perubahan di BIG.

❖ Rencana Timelinenya sbg berikut:



TEMA Besar RAKORNAS 2021?

BENTUK USULAN ACARA PENDAMPING RAKORNAS

1. PODCAST/SINIAR	2. WEBINAR	3. SOSIAL MEDIA	4. NEWS
AUDIO DAN VISUAL	GELAR WICARA	TAGAR, HASHTAG	TEMA RINGAN

Usulan Tema Dari IGT :

- Podcast :
- Webinar :

❖ Dalam rangka program IG dalam Genggaman dan literasi geospasial maka diperlukan bahan berupa berita atau konten sosmed (foto dan deskripsi) yang nantinya akan di upload di web atau sosmed BIG. Materi dapat berupa kegiatan rapat, FGD, survei, sosialisasi, dll Diharapkan setiap bulan minimal ada 1 berita/konten dari tiap pusat yang di upload di medsos/web BIG, untuk penjadwalannya dapat diatur misal PPIT minggu 1, PTRR minggu ke 3. Masing masing pusat dapat koordinasi melalui tim medsos dan telah di acc kapus.

- ❖ Dengan adanya RB IGT maka koordinasi semakin cair dan fleksibel antara PPIT dan PTRA baik dari segi anggaran maupun SDM.

The image displays two screenshots from a Zoom meeting. The top screenshot shows a slide titled "Maintenance/Pengembangan Dashboard Pembinaan IGT (TA 2021)". The slide content includes:

- Sebelumnya pada tahun 2020 aplikasi ini disusun melalui mekanisme FGD bersama programmer tenaga ahli TK.
- Aplikasi selesai pada Desember 2020, dengan inputan yang masih kosong / dummy.
- Awal tahun 2021 sudah dilakukan input ulang untuk 201 IGT, oleh CPNS Pusat PPIT:
 - Input profil dan deskripsi IGT oleh CPNS Pusat PPIT
 - Input parameter dan status IGT
- Kondisi input yang belum ideal:
 - Input belum diverifikasi ulang terutama untuk data-data yang kosong, dan perlu dilakukan penugasan bersama untuk melakukan input / pencarian data-data yang masih kosong / belum diisi.
 - Untuk input yang sudah diisi seperti Parameter dan Status IGT pun, masih perlu konfirmasi dengan walidata (assessment lagi)
 - Cakupan IGT dan Capaian IGT masih kosong dan perlu konfirmasi dengan walidata
 - Perlu pembuatan data spasial cakupan per 201 tema IGT, per stala output
 - Cakupan IGT dan Capaian IGT belum disinkronkan dengan bisnis proses komposisi integrasi IGT untuk monitoring capaiannya
 - Perlu penyesuaian SK Walidata sesuai dengan Perpres KSP yang terbaru
- Tahun Anggaran 2021 dipersiapkan pengembangan/maintenance melalui Kontrak Tenaga Perseorangan, tidak melalui FGD atau kontraktual. Dengan tujuan utama untuk:
 - Pengembangan map viewer untuk cakupan IGT, dan map viewer untuk maintenance IGT yang ada publikasinya
 - Reporting yang lebih baik secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan
 - Mekanisme Input Mandiri dari KLP, dan proses review acceptance dari BIG

The bottom screenshot shows a slide titled "Akses masih terbatas" with the URL <http://simpatig.big.go.id> and the text "Sistem Informasi Pemantauan Penyelenggaraan Informasi Geospasial". It lists reasons for limited access:

1. Inputan Status IGT belum direview bersama, apakah ada yang salah / kurang sesuai
2. Isian numerik cakupan IGT beberapa masih kosong
3. Isian numerik capaian IGT beberapa masih kosong
4. Belum terdapat informasi spasial (SHP) dari cakupan IGT untuk dapat ditampilkan

It also states: "Jika memang point di atas dirasa tidak bermasalah, akan secara paralel mengajukan Stress Testing dan Vulnerability Assessment kepada Pusat PPIG, untuk kemudian jika lolos dapat diakses dari luar jaringan BIG".

Kendala Anggaran

- Direncanakan di awal, pengembangan akan dilakukan menggunakan anggaran Pusat PTRA di Tahun 2021, khususnya pada output Pokja Pemetaan Tata Ruang
- Pada Februari/Maret terdapat perubahan besar pada tugas dan fungsi BIG terkait pembinaan pemetaan tata ruang, dengan dicabutnya PP 8/2013 yang juga berdampak terhadap anggaran yang masih belum bisa digunakan.
- Maret-April telah dilakukan perumusan dan audiensi tugas dan fungsi baru berupa Pembinaan Pemanfaatan Informasi Geospasial, sudah dibahas bersama pimpinan, lintas ke deputian, dan biro perencanaan, termasuk Bappenas.
- Telah disiapkan revisi anggaran, output dan kegiatan baru dalam menyiasati perubahan tugas ini.
- Menunggu revisi POK, semoga maintenance / pengembangan Dashboard Pembinaan IG ini bisa segera dilakukan.

2021	Belanja Awal Labinger	7.000.000.000	2021	Belanja Awal Labinger	4.000.000.000
1. Target Pengembangan Pemetaan Output			1. Target Pengembangan Pemetaan Output		
1.1. Pembinaan Pengawasan Non-ATR di 10 orang, 13 bulan	300.000.000		1.1. Pembinaan Pengawasan Non-ATR di 10 orang, 13 bulan	300.000.000	
1.2. Pembinaan Pengawasan Non-ATR di 10 orang, 13 bulan	300.000.000		1.2. Pembinaan Pengawasan Non-ATR di 10 orang, 13 bulan	300.000.000	
1.3. Bekerja Pribadi			1.3. Bekerja Pribadi		
1.4. Maintenance Dashboard Pembinaan IG	300.000.000		1.4. Maintenance Dashboard Pembinaan IG	300.000.000	

Target Juli 2021

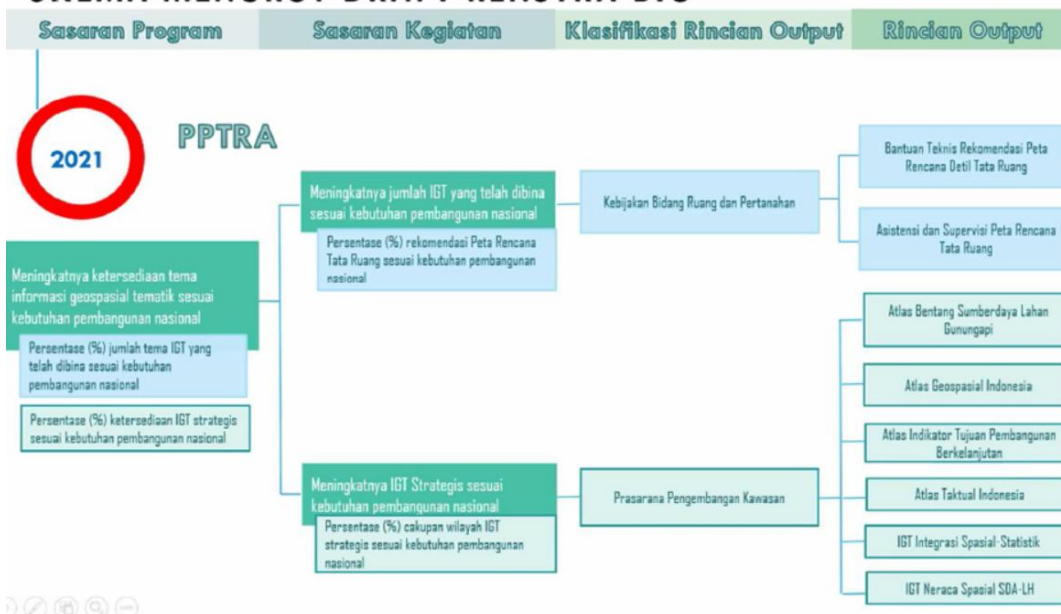
- Sudah dapat diakses dari luar BIG
- Adanya penugasan review input dan input untuk data-data yang kosong
 - Hasil input profil IGT dan parameter/status pembinaan telah terverifikasi secara internal
- Adanya penugasan input capaian renaksi / RPJMN
 - Hasil input capaian renaksi / RPJMN terisi dan terverifikasi secara internal
- Pembuatan data spasial cakupan per IGT, per skala output, dan melakukan input ke sistem
 - Beberapa IGT yang sudah memiliki cakupan pemetaan yang jelas dapat diinput

- ❖ Terkait dengan adanya:
 1. Pencabutan PP no. 8 Tahun 2013 dalam PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 252
 2. Raperka BIG Pemberian Persetujuan dan Penggunaan IGD sebagai turunan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial pasal 12
 3. PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- ❖ Maka hal ini akan merubah bisnis proses pokja tata ruang, sehingga kegiatan yang terkait bantuan teknis dan asistensi dan supervisi

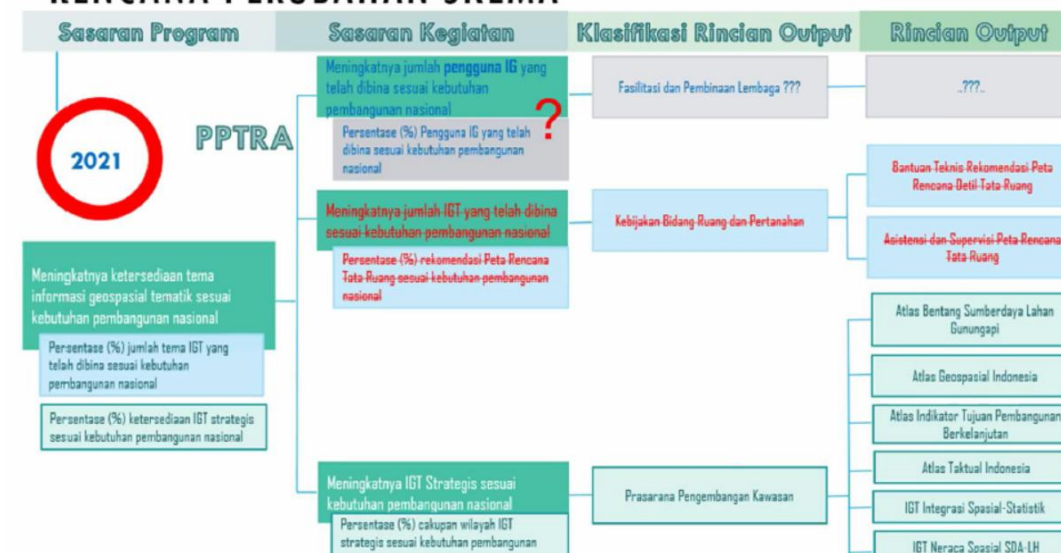
peta tata ruang yang sudah dilakukan selama ini akan berubah dan rencana akan dialihkan kedalam bentuk Kelompok Kerja Pembinaan Peta Dasar untuk Tata Ruang.

- ❖ Sampai saat ini sudah dilakukan Rapat Koordinasi IGD - IGT 19 April 2021; Rapat Koordinasi Awal Terkait Penggunaan Garis Pantai PPTRA-PKLP 5 Mei 2021; Dan Rapat Koordinasi Awal Terkait Penggunaan Garis Pantai PPTRA-PPBW 7 Mei 2021
- ❖ Terkait dengan hasil rapat dengan PKLP, dapat disimpulkan sbb:
 1. Akan dilakukan rapat lanjutan untuk penyepakatan petunjuk teknis untuk menjawab daftar identifikasi masalah yang dibahas pada rapat pertama
 2. Pembentukan tim inti dalam pokja PPTRA PKLP
 3. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian konflik garis pantai akan diselesaikan dengan PP 43/2021 terkait Penyelesaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah,
- ❖ Terkait dengan Rapat dengan PPBW, dapat disimpulkan sbb:
 1. Akan dilakukan rapat lanjutan untuk penyepakatan petunjuk teknis untuk menjawab daftar identifikasi masalah yang dibahas pada rapat pertama
 2. Pembentukan tim inti dalam pokja PPTRA PPBW
 3. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian konflik garis pantai akan diselesaikan dengan PP 43/2021
 4. terkait Penyelesaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah - Pasal 5 dan 6
 5. Pada bulan Agustus 2021 akan dilakukan penyepakatan batas wilayah untuk seluruh Indonesia oleh Kemendagri dan akan digunakan untuk seluruh pengguna.
- ❖ Terkait dengan hal tersebut diatas rencana juga akan dilakukan penyesuaian dengan indikator kinerja dengan skema sebagai berikut:

SKEMA MENURUT DRAFT RENSTRA BIG



RENCANA PERUBAHAN SKEMA



❖ Berikut adalah beberapa alternatif usulan KRO-RO PPTRA :

KRO	RO
Kebijakan / Kajian (ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan)	Satuannya Rekomendasi Kebijakan → Bidang Tata Ruang sebelum PP 8 dicabut, sehingga tidak akan digunakan lagi
Prasarana (CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan)	Satuannya berupa Produk peta tematik dengan luasan (km2) → pilihan 3
Pembinaan Pemerintah Daerah dan Desa (FBA- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah/ FBB - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa)	Satuannya jumlah Pemerintah Daerah (Prov, Kab, Kota) / Pemerintah Desa → pilihan 1
Fasilitasi dan Pembinaan Publik (BDA dst - Fasilitasi Pembinaan Lembaga/Masyarakat/BUMN)	Satuannya jumlah Lembaga/BUMN/Masyarakat → pilihan 1
Koordinasi dan Kerjasama (AEF- Sosialisasi dan Diseminasi)	Satuannya jumlah peserta (orang) → pilihan 2

- ❖ ABT.002 (3 M) anggaran sdh direalisasikan, untuk gaji non ASN, sedangkan ABT.001 anggaran sebesar 8 M masih di bloking baru dpt dibuka setelah ada kegiatan yang strategis atau kegiatan yang prioritas.
- ❖ Anggaran ABT.002 rencana akan dialokasikan untuk atlas pariwisata.
- ❖ Permasalahan RO sdh solve setelah trilateral meeting: RO masih menggunakan RO lama
- ❖ Usulan RO baru di tahun ini belum bisa dilaksanakan karena tahun sdh berjalan.
- ❖ Kegiatan di PTRAsifatnya bukan rekomendasi jadi dibuat kegiatan untuk suport kegiatan /kebutuhan di PPRT terkait asistensi peta dasar di PPRT.
- ❖ BIG tahun ini berkomitmen mendukung Kemen Pariwisata dalam program Bangga berwisata di Indonesia saja. Pokja Atlas PPTRA rencana akan berkontribusi dengan menyusun atlas pariwisata pada Destinasi Utama dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Bali, Greater Jakarta, Kepulauan Riau, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur.
- ❖ Tahun 2021 akan dilakukan penyusunan Atlas Pariwisata Danau Toba dan Labuan Bajo. dan akan dilanjutkan wilayah Bali dan Mandalika (2022), Jakarta dan sekitarnya serta Borobudur (2023), dan Kepulauan Riau (2024).
- ❖ Atlas Pariwisata ini akan berisi informasi yang menggambarkan destinasi wisata yang meliputi unsur kewilayahan, aksesibilitas, atraksi, amenities, investasi dan masyarakat termasuk Desa Wisata.
- ❖ Tetapi terkendala pada anggaran, karena pada tahun ini belum ada alokasi anggaran untuk kegiatan penyusunan atlas pariwisata. Anggaran Atlas Pariwisata masih menunggu revisi DIPA dan rencana anggaran atlas pariwisata ini akan diambil dari ABT.002 yaitu RO terkait Asistensi dan supervisi. Membantu mempercepat proses revisi DIPA dengan menyiapkan segala persyaratan untuk revisi (TOR, RAB dan data dukung lainnya)
- ❖ Kegiatan yang dilakukan sampai saat ini adalah pengumpulan data sekunder untuk pembuatan atlas pariwisata tetapi untuk kegiatan selanjutnya masih harus menunggu alokasi anggaran untuk atlas

pariwisata. Karena saran dari inspektorat adalah kegiatan dilakukan setelah ada alokasi anggaran di DIPA.

- ❖ Jika Atlas Pariwisata ini dilaksanakan maka perlu menghitung ulang target capaian indikator kinerja karena sampai th 2024
- ❖ Untuk kegiatan Aplikasi E Atlas:
 1. Kewajiban tahap Review PPIG untuk seluruh pengadaan TIK di lingkungan BIG tahun ini menambah rentang waktu persiapan sebelum naik lelang
 2. Tahap review yang melibatkan pihak lain (PPIG dan Inspektorat) kecepatan prosesnya disesuaikan dengan load pekerjaan pihak reviewer
 3. Masih ada tahap clearance antara PPIG dan Menpan yang harus dilakukan (*info terakhir dipersilahkan parallel)
 4. KAK dinyatakan siap Lelang sudah mepet dengan libur lebaran
 5. Mengingat jangka waktu pelaksanaan kontrak 5 bulan ditambah proses lelang selama 2 bulan sehingga selesai kontrak terlalu mepet akhir tahun sehingga perlu ada perubahan pada KAK
 6. Perubahan di KAK dari yang 5 bulan menjadi 4 bulan, dengan menambah jumlah tenaga ahli

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a presentation slide. The slide title is "Review Kegiatan Kelompok Kerja Integrasi IGT Strategic Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan". The main topic is "SDGs Level Desa". The slide features a central blue hexagon with the text "SDGS LEVEL DESA" and "Pembuatan SDGs Level Desa yang diwujudkan dengan membuat Prototype SDGs Level Desa dan mengumpulkan data statistik K/L walidata untuk diintegrasikan kedalam data spasial BIG". Surrounding this central hexagon are five other hexagons, each containing text about different initiatives: "KERJASAMA DENGAN BPS", "DATA STATISTIK KEBENCANAAN - BNPB", "DESA PRESISI LPPM-IPB", "PK21-BKKBN", and "SDGS DESA KEMENTERIAN DESA". The Zoom meeting participants listed at the top are Niendyawati, Setyani, BIG - LINTA, KOTADIPTRA, Chintia_PTRA.BIG, and BIG - Wangsit... The system tray at the bottom shows the date 10/05/2021 and time 10:32.

Zoom Meeting

Niendyawati Setiyani Chintia_PTRA.BIG BIG - Wangsit...

Recording

Review Kegiatan Kelompok Kerja

Integrasi IGT Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

ISU UTAMA

SATU DATA INDONESIA

Kegiatan- Kegiatan yang mendukung Satu Data Indonesia

SDGs Level Desa

PKZ 1 - BKSDH
SDGs Desa - Kementerian Desa
Desa Perkota - LPPM IPB
Kerjasama BPS
Kerjasama BNPB

UNGGIM-AP

Rencana Kegiatan 2 0 2 1

Neraca SDA

Neraca SDA Darat
Neraca SDA Laut
Aset Neraca Aa Pemda

www.big.go.id info.pptrabig.go.id pptrabig PPTRA BIG

10:30 10/05/2021

You are viewing Diah Retno Minarna's screen

Niendyawati Setiyani Chintia_PTRA.BIG BIG - Wangsit...

Recording

Review Kegiatan Kelompok Kerja

Integrasi IGT Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

UN-GGIM-AP workplan

Coordination

1. Sharing information with member countries
2. Drafting workplan and Roadmap

Review Work

1. Final report of pilot project review work by expert group and other organizations to reflect view of the region

2019

2020

pilot project and draft concept paper

1. Identify resources and carry out study in specified country
2. seminar of member of WG to share best experiences and best practices
3. Establish agreed workplan and road map

2021

2022

Finalization

1. Selection and application of GSGF in a particular country
2. Report of outcome of the activities

2023

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions

10:36 10/05/2021

You are viewing Diah Retno Minarna's screen

Niendyawati Setiyani Chintia_PTRA.BIG BIG - Wangsit...

Recording

Review Kegiatan Kelompok Kerja

Integrasi IGT Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Neraca Sumberdaya Alam

NSDA Darat

ALUR KERJA PENYUSUNAN NERACA

- 1. PENYEDIAAN DATA**
Penyediaan data dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 2. PENYUSUNAN NERACA ASET DALAM SATUAN FISIK**
Penyusunan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang statistik berkoordinasi dengan kementerian yang membina urusan perencanaan dan pembangunan
- 3. PENYUSUNAN NERACA ASET DALAM SATUAN MATA UANG**
Penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang keuangan

NSDA Laut

Pilot project pada kawasan konservasi

1. Ocean asset 2. Flow to environment 3. Flow to economy 4. The Ocean Economy 5. Governance 6. Combined presentation 7. Ocean wealth

NERACA SDA Laut

Penyusunan Neraca/Status Fisik/Laut: BIG, B/LKLPN, KKP, Kemenku, KKP, Kemenku, BPS

Neraca Sumberdaya Alam Darat dan Laut dilaksanakan untuk mendukung BPS-Kemenku (Darat) dan KKP-BPS-Kemenku (Laut) bukan merupakan aset mengingat hasil dari kegiatan PPTRA-BIG yang diserahkan merupakan "hasil antara" dari Siserling, Ocean Account.

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions

10:38 10/05/2021

- ❖ Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Kedeputian IGD - IGT akan dilakukan secepatnya dengan membentuk tim kecil, petunjuk teknis serta alur pelayanan asistensi peta dasar untuk tata ruang yang melibatkan PTR, PPRT, PPBW dan PKLP
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan Atlas Pariwisata sudah berjalan baik di internal (pengumpulan data, team, penyediaan anggaran) serta FGD dengan K/L terkait
- ❖ Pengembangan aplikasi e-Atlas Nasional 2021 difokuskan pada User Interface dan User experience bagi pengguna
- ❖ Kegiatan SDI, SDGs Level Desa, UNGGIM-AP dan Neraca SDA telah mulai dilaksanakan seperti koordinasi internal unit eselon 2 di BIG, FGD dengan stakeholder terkait, untuk kegiatan level internasional (UN-GGIM-AP *Extended Executive Board Meeting*) akan dimulai di bulan mei dan terjadwal di bulan Juni, September, Oktober dan Nopember 2021.
- ❖ Kegiatan neraca difokuskan pada integrasi untuk mendukung KLHS sebagai produk antara yang akan diserahkan ke Pemerintah Daerah

You are viewing Tandang BIG's screen View Options

Recording

Participants: 76

MONEV KEGIATAN PKSP & IGIF

Rapat Monev & R&R Kedepuan Bidang IGT BIG
Senin, 10 Mei 2021

Zoom Meeting

Recording

OUTLINE

- LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- TANTANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- TINDAK LANJUT KEGIATAN

Zoom Meeting

Recording

LAPORAN KEGIATAN PKSP

KOMPILASI
Rangkaian kegiatan pengumpulan data IGT yang dimiliki K/L, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau Pemda untuk Seluruh Wilayah Indonesia

INTEGRASI
Rangkaian kegiatan dalam melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD

SINKRONISASI
Rangkaian kegiatan penyalarsan IGT yang dilakukan oleh K/L dan/atau Pemda

BERBAGI PAKAI DATA & IG
Berbagi pakai data IGT oleh K/L dan/atau Pemda melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional

SATGAS 1 **SATGAS 2** **SATGAS 3**

158 PETA TEMATIK
24 KEMENTERIAN/JEMBRAGA
34 PROVINSI

LAPORAN KEGIATAN PKSP

RENCANA AKSI PKSP BERDASARKAN PERPRES 23/2021

A	B	C	F
PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PKSP 1. Penetapan Walidata IGT pada K/L - (BIG) 2. Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT - (BIG) 3. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP - (Kemendagri dan Kemendagri) 4. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT - (Walidata IGT) 5. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kegiatan KEGIATAN dan Integrasi Pelaksanaan KSP - (BIG) 6. Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan - (Kemendagri) 7. Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG KSP - (BIG)	PERWUJUDAN IGD 1. Peta RBI Skala 1:5.000 2. Peta RBI Skala 1:50.000 3. Peta RBI Skala 1:250.000 4. Perwujudan CSRT 5. Perwujudan Foto Udara 6. Penyediaan Data 99	PEMUTAKHIRAN IGD 1. Peta RBI Skala 1:50.000	INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL 1. Penyelesaian Data IG 2. Penyusunan Grand Design Pengembangan Pusat Data Nasional
D	E	G	
PERWUJUDAN IGT 1. Perwujudan IGT Status (26 IGT) 2. Perwujudan IGT Perencanaan Ruang (5 IGT) 3. Perwujudan IGT Potensi (47 IGT)	PEMUTAKHIRAN IGT 1. Pemutakhiran IGT Status (25 IGT) 2. Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang (11 IGT) 3. Pemutakhiran IGT Potensi (69 IGT)	SINKRONISASI IGT 1. Penyelesaian Tumpang Tindih Pemakaian Lahan 2. Pelaporan PKSP kepada Presiden RI	

Target penetapan Juni 2021:

1. SK walidata IGT
2. SK pokja IGT
3. NSPK pokja IGT

TANTANGAN KEGIATAN PKSP

No.	Identifikasi Tantangan	Usulan Solusi
1.	Kegiatan Pelaksanaan PKSP tidak tercantum dalam SKP namun memiliki <i>load</i> yang sangat besar	<ul style="list-style-type: none"> • SK atau nota dinas dari Deputi IGT sebagai data dukung tugas tambahan • Kegiatan PKSP dimasukkan dalam TA 2022
2.	Kebutuhan SDM dalam melaksanakan kegiatan PKSP	<ul style="list-style-type: none"> • SK atau nota dinas penugasan SDM • Pelibatan SDM lintas unit teknis >> Contoh: Pokja IGT Tata Ruang untuk kompilasi dan integrasi IGT Tata Ruang
3.	Kebutuhan anggaran dalam melaksanakan kegiatan PKSP	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi anggaran yang ada (Revisi POK) • Dukungan anggaran dari unit teknis lain (PTRA)
4.	Sinergi dan Kolaborasi dengan Satgas 2 dan Satgas 3	Kepala BIG perlu menetapkan tim pelaksana PKSP di BIG dan mengadakan <i>kick-off meeting</i> PKSP >> Staf khusus Kepala BIG untuk koordinasi dan monitoring kegiatan PKSP

You are viewing Tandang BIG's screen

View Options

Recording

Setiyani

Anton - BIG

Khafid - PTR

Retno Wulan...

BIG - Wangsit...

21

TANTANGAN KEGIATAN IGIF

No.	Identifikasi Tantangan	Usulan Solusi
1.	Secara formal tidak ada SK penugasan Kegiatan IGIF	Arahan dan SK Kepala BIG terkait pelaksanaan kegiatan UN-GGIM
2.	SDM yang terlibat dalam kegiatan IGIF sudah memiliki SKP kegiatan di unit teknisnya	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan struktur organisasi BIG >> Staf khusus Kepala BIG untuk koordinasi dan monitoring kegiatan Internasional Kerjasama dengan akademisi
3.	Tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan IGIF	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi anggaran yang ada (Revisi POK) Kegiatan IGIF dimasukkan dalam KRO

Unmute Start Video

Participants Chat Share Screen Record Reactions

11:10 10/05/2021

Zoom Meeting

Recording

Setiyani

Anton - BIG

Khafid - PTR

Retno Wulan...

BIG - Wangsit...

22

TINDAK LANJUT KEGIATAN IGIF

- SK Kepala BIG tentang kegiatan UN-GGIM
- Koordinasi lintas kedeputian di BIG (PSKIG) untuk menyusun IGIF Country Action Plan
- Penyusunan rencana kerja

11:11 10/05/2021

You are viewing Sri Hartini's screen

View Options

Recording

Sri Hartini

Setiyani

Anton - BIG

Khafid - PTR

Tanjung BIG

Retno Wulan...

11 Mei 2021 - Monev kegiatan DDT.pdf - PowerPoint

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help Tell me Share

11 Mei 2021 - Monev kegiatan DDT.pdf - PowerPoint

Slide 1 of 22 English (Indonesia)

Notes Comments

100%

11:20 10/05/2021

PENERTIBAN KJA DI DANAU TOBA & PEMETAAN RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Monev Pelaksanaan Kegiatan di Kedeputian IGT, 11 Mei 2021

Zoom Meeting: You are viewing Sri Hartini's screen. Participants: Setiyani, BIG, BIG_Lien Rosalina, Sri Hartini, BIG_Ferrari Pinem, Niendyawati.

REGULASI

Perpres No 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba

Pasal 6 (b)
 Penataan ruang Kawasan Danau Toba bertujuan untuk mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.

Indikator

Pengendalian KJA yang tidak sesuai zonasi

- Diluar Zona A4 (Kedalaman > 100 m)
- Diluar Zona A3.2 (Kedalaman 30 – 100 m)

SK Gubernur Sumut 188.4/213/KPTS/2017

Membatasi produksi perikanan budidaya di Danau Toba sebesar 10.000/tahun

Indikator

- Penentuan pengurangan jumlah KJA di setiap Lokasi, (sesuai zonasi dan analisa kajian akademik)
- Penentuan strategi pengendalian

System tray: 11:42 10/05/2021

Zoom Meeting: You are viewing Sri Hartini's screen. Participants: Setiyani, BIG, BIG_Lien Rosalina, Sri Hartini, BIG_Ferrari Pinem, Niendyawati.

Perkembangan saat ini :

- 1 Penertiban KJA akan dilakukan secara bertahap (2021 – 2023)
- 2 Penyiapan peta sebaran KJA sedang dalam proses – termasuk pendataan pembudidaya KJA (masyarakat dan perusahaan)
- 3 LAPAN sudah menyediakan data citra satelit SPOT dan foto udara hasil pemotretan menggunakan drone
- 4 Pushidrosal sudah menyiapkan data batimetri danau
- 5 Pemerintah daerah sedang membahas mekanisme alih profesi dari pembudidaya KJA khususnya untuk yang dilaksanakan oleh masyarakat.

System tray: 11:48 10/05/2021

Zoom Meeting: You are viewing Sri Hartini's screen. Participants: Setiyani, BIG, BIG_Lien Rosalina, Sri Hartini, BIG_Ferrari Pinem, Niendyawati.

2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KARHUTLA

- Paradigma Baru Penanggulangan Karhutla,
 - Mengedepankan upaya pencegahan
 - Melibatkan Masyarakat (termasuk : Patroli Terpadu dan MPA)
 - Early warning and detection System
 - Early Respons

Mengedepankan Pencegahan mengingat bila telah terjadi kebakaran maka dengan area terbakar yang sangat luas akan sulit dilakukan pemadaman, sehingga pencegahan adalah upaya yang lebih efektif dan efisien.

BIG sesuai Tupoksinya sebagai Pembina, berperan dalam pembinaan penyelenggaraan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.

System tray: 11:50 10/05/2021

Zoom Meeting

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Ros Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem Niendyawati

Recording

PEMBINAAN

(PELAKSANAAN AMANAH UU NO 4 TAHUN 2011)

1. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemetaan Potensi Karhutla Skala 1:250.000, tahun 2016.
2. Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 8742:2019 tentang Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Skala 1:250.000. tahun 2019
3. Perjanjian Kerjasama antara BIG dengan KLHK Nomor : 18.1/PPKS-BIG/PK.05/9/2019 tentang Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, tahun 2019
4. *Revisi* Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemetaan Potensi Karhutla Skala 1:250.000, tahun 2020.

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

11:51
10/05/2021

You are viewing BIG_Ferrari Pinem's screen

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Ros Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem Niendyawati

Recording

SATUAN REAKSI CEPAT KEBENCANAAN BIG

KEPUTUSAN KEPALA BIG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG SATUAN REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Tujuan: Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Informasi Geospasial bertugas melakukan rapid mapping kebencanaan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan distribusi informasi geospasial kebencanaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

PENUGASAN TIM SRC BIG

Mengacu Kepada SK Kepala BIG no 6 tahun 2016, Tugas Satuan Reaksi Cepat (SRC) BIG melakukan Rapid Mapping kebencanaan yang meliputi;

1. Perencanaan/ Penyiapan Peta Kerja
2. Akuisisi (Pengumpulan Data)
3. Pengolahan dan Analisa Data
4. Penyajian Data
5. Penyebarluasan Informasi Geospasial
6. Pelaporan

PERKA BIG No 8 Tahun 2015
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PEMETAAN CEPAT

Go to PC settings to activate Windows


11:25
10/05/2021

You are viewing BIG_Ferrari Pinem's screen

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Ros Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem Niendyawati

Recording

Bisnis Proses



✓	Pemetaan Wilayah Terdampak Bencana	✓	Pemetaan dan Analisis Potensi Bencana Lanjutan
✓	Pemetaan Kejadian Luar Biasa	✓	Pemetaan Kontigensi

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows

11:29
10/05/2021

You are viewing BIG_Ferrari Pinem's screen

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Rosalia Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem Niendywati

OPTIMALISASI IG UNTUK REKONSTRUKSI BENCANA BANJIR BANDANG GUNUNG MAS

KENAMPAKAN 3D CITRA SPOT
SEKELILING TOL SUNGAI KECAMATAN MASARU KABUPATEN BOGOR

PETA KLERENGAN
SEKELILING TOL SUNGAI KECAMATAN MASARU KABUPATEN BOGOR

PETA SEBARAN RUMAH JABODETABEK
KABUPATEN BOGOR

PETA KESUAIAN LAHAN PERMUKAAN
KABUPATEN BOGOR

PETA MULTIBAWAN BENCANA
KABUPATEN BOGOR

Go to PC settings to activate Windows

11:30 10/05/2021

Zoom Meeting

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Rosalia BIG_Ferrari Pinem Sri Hartini Niendywati

SIKLON SEROJA NTT

WILAYAH TERDAMPAB ILE BOLONG

TANDAP DARI DATAR SIKLON TROPIS SEROJA BBT

- lereng atas gunungapi adalah area yang memiliki bahan material endapan unconsolidated/ lepas.
- Aliran air dapat berperan sebagai tenaga pengikis yang melepaskan ikatan antar material, sehingga material lepas tersebut akan meluncur mengikuti alur yang tersedia (transport zone).
- Alur atau alur sungai yang membawa material lepas-lepas dari lereng atas berpotensi mengakibatkan terjadinya aliran rombakan/ debris yang akan terendapkan pada wilayah bawah (deposition zone).
- Dengan tingkat kecuraman 26 - > 40 % (Curam hingga sangat curam) aliran rombakan yang terjadi bisa sangat cepat dan menyapu daerah yang ada dibawahnya.

Go to PC settings to activate Windows

11:31 10/05/2021

Zoom Meeting

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Rosalia BIG_Ferrari Pinem Sri Hartini Niendywati

LONGSOR SUMEDANG

REKOMENDASI
Penguatan aspek mitigasi berupa mencegah terjadinya longsor susulan memperbaiki fungsi drainase air, pembuatan terasering dengan sistem drainase yang tepat, melakukan penghijauan dengan sistem tanaman yang berakar kuat, Melakukan pemadatan tanah disekitar perumahan, Menutup rekahan diatas lereng, membuat selokan yang bisa mengalirkan air hujan, membangun tanggul penahan untuk menahan runtuhnya material, sosialisasi kepada masyarakat akan adanya potensi bencana dan membuat rambu-rambu di lokasi yang memiliki ancaman bencana.

Go to PC settings to activate Windows

11:33 10/05/2021

Zoom Meeting

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Rosalina BIG_Ferrari Pinem Sri Hartini Niendyawati

PUBLIKASI PORTAL KEBENCANAAN

Dashboard Kebencanaan
Badan Informasi Geospasial

Sistem Informasi Geografis untuk berbagai data hasil Pemetaan Cepat Bencana (Rapid Mapping) yang terjadi di Indonesia. Menyediakan visualisasi peta dampak bencana dan potensi bencana di suatu memungkinkan pengguna untuk mengunduh data polami dan dampak dari bencana tersebut.

Galeri Peta

- Peta Tematik Bencana Cytisina Senaga NIT
- Peta Respon dan Aksi Gempabumi Banjir...
- Peta Tanggapan Longsor Sumatera
- Peta Setoran Simulasi Nasional

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

11:33
10/05/2021

Zoom Meeting

Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Rosalina BIG_Ferrari Pinem Sri Hartini Niendyawati

KERJASAMA PEMETAAN KONTINGENSI

Peta rute evakuasi rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami Kab. Bantul

Tujuan penyusunan Peta Kontingensi untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat terjadi.

Penjajakan Kerjasama:
BPBD Sukabumi
BPBD Kab Bengkulu Selatan

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

11:34
10/05/2021

Zoom Meeting

Yusuf Wibisono Setiyani Anton - BIG BIG_Lien Rosalina BIG_Ferrari Pinem Sri Hartini

#1 Peta Data Nusantara
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Progres KSP, Pokja Penutup Lahan, Keanekaragaman Hayati, Pemetaan Gn. Merapi, Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan

Kordinator Penyelenggaraan IGT Strategis
Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kedeputan Bidang Informasi Geospasial Tematik
Senin, 10 Maret 2021

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

11:58
10/05/2021

You are viewing Yusuf Wibisono's screen

View Options

Recording

Setiyani

Yusuf Wibisono

Anton - BIG

BIG_Lien Rizalinda

Sri Hartini

BIG Ferrari Pinem

2

Program Kelompok Kerja (POKJA) Internal Klasifikasi Penutup Lahan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial pasal 6 ayat 1 dan 2

"... unsur Penutup Lahan adalah salah satu dari 8 (delapan) unsur dalam Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000 dan 1:1.000.000 ..."

- Pertemuan Koordinasi Kedeputian IGD, IGT & Biro PKH zoom meeting per 19 April 2021 :
 - "... unsur Penutup Lahan dalam Peta Rupa Bumi Indonesia perlu segera dilakukan pembahasan internal melalui Kelompok Kerja Internal BIG untuk segera memastikan/menyusun Sistem Klasifikasi Yang Dapat Memenuhi Pengguna (K/L) ..."
- Pertemuan koordinasi antara PPIT dan PPRT zoom meeting per 6 Mei 2021 :
 - "... PPRT & PPIT mempunyai kesempahaman untuk membangun penguatan teknis penyusunan unsur penutup lahan dalam RBI dalam bentuk :
 - Kajian bersama terkait sistem klasifikasi penutup lahan
 - Kajian periodisasi pemutakhiran unsur penutup lahan
 - Tujuan kajian agar penutup lahan dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin pengguna K/L
 - Kajian diawali dengan sistem klasifikasi yang telah ada yaitu :
 - Sistem klasifikasi SNI 7645 – 2014
 - Sistem klasifikasi Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI)
 - Sistem klasifikasi Struktur Data Rupabumi Indonesia ... "
- Tindaklanjut SK POKJA Penutup Lahan selanjutnya segera diterbitkan setelah ...

Go to PC settings to activate Windows

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

11:59 10/05/2021

You are viewing Yusuf Wibisono's screen

View Options

Recording

Setiyani

Yusuf Wibisono

Anton - BIG

BIG_Lien Rizalinda

Sri Hartini

BIG Ferrari Pinem

Kendala & Pemecahan Masalah

Metode kajian penyusunan sistem klasifikasi penutup lahan perlu penelaahan yang terintegrasi/terpadu agar sasaran kegiatan yaitu Sistem Klasifikasi Penutup Lahan dapat di terima oleh multi user (K/L).

Activate Windows

Go to PC settings to activate Windows

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

12:04 10/05/2021

Zoom Meeting

Setiyani, BIG_Ferrari Pinem

3

Penyusunan Instruksi Presiden Pengarusutamaan Keekaragaman Hayati

Rancangan Substansi Inpres Pengarusutamaan Keekaragaman Hayati

- Tujuan INPRES
Pengarusutamaan pelestarian keekaragaman hayati untuk *tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan [penguatan,] koordinasi dan integrasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*
- Sasaran INPRES
 1. *Menyusun strategi pembangunan* dengan mempertimbangkan potensi keekaragaman hayati di semua sektor yang menjamin *keseimbangan antara konservasi keekaragaman hayati dan pemanfaatan* yang berkelanjutan;
 2. *Membangun strategi* dan perencanaan peningkatan *pemanfaatan keekaragaman hayati* untuk *menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi tinggi*, strategis dan memberikan keunggulan kompetitif;
 3. *Membangun strategi dan perencanaan pembangunan sektor dan daerah* dengan *mengedepankan peran keekaragaman hayati dan ekosistemnya*;
 4. *menggunakan aspek pelestarian keekaragaman hayati* sebagai pertimbangan utama dalam *perencanaan penataan ruang wilayah*, dengan diantaranya memasukkan ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Spesifik K/L tertentu;
- Mekanisme Pelaksanaan INPRES
Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung peran keekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.

You are viewing Yusuf Wibisono's screen

Setiyani, BIG_Ferrari Pinem

- Prinsip Pelaksanaan INPRES
 1. Pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan keekaragaman hayati
 2. Keberlanjutan dan kehati-hatian dalam pemanfaatan keekaragaman hayati baik pada tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem melalui pemanfaatan non eksploitasi.
 3. Menerapkan pembangunan rendah karbon dalam sektor kehutanan, kelautan, pertanian, industri, dan energi.
- Bentuk Pelaksanaan INPRES
 1. *Menyediakan data dan informasi* yang berkaitan dengan pelestarian keekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan
 2. *Melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian* sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan pelestarian keekaragaman hayati.
 3. *Melakukan fungsi penegakan hukum* dalam rangka perlindungan keekaragaman hayati
- Mandat BIG Pelaksanaan INPRES
Melakukan pemetaan secara spasial penyebaran keekaragaman hayati yang telah diinventarisasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Masyarakat

You are viewing Yusuf Wibisono's screen

Setiyani, BIG_Ferrari Pinem

Timeline Penyelesaian INPRES Pengarus Utamaan Keekaagaman Hayati

The timeline consists of a large orange arrow pointing to the right, with five colored circles (yellow, green, green, teal, blue) marking key events. Above the arrow, text indicates that the Ministry of Industry and Trade is still finalizing the draft up to the present. A dashed box highlights the period from the 19th of March to the 16th of February 2021, with a note that discussions are still ongoing.

- Rakor Es 1 (16 Feb 2021)** (Yellow circle)
- Pembahasan Rancangan Inpres (19 Mar 2021)** (Green circle)
- Rakor Menteri/Kepala Lembaga (Apr 2021)** (Green circle)
- Penyerahan Rancangan Inpres kepada Sekretariat Negara (Apr 2021)** (Teal circle)
- Pengesahan Inpres** (Blue circle)

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan masih menfinalisasi perumusan Inpres sampai saat ini

... masih dalam pembahasan ...


Zoom Meeting

Recording

Setiyani

Yusuf Wibisono... Antton - BIG BIG_Lien Rizalina Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem

Sasaran Kajian



1. Menyusun data penutup lahan secara multi temporal pada level skala 1:50.000/1:25.000 di Kawasan Merapi – dengan Citra CSRT 2013 & SPOT 5/6/7 2020;
2. Menyusun analisis sementara wilayah /kawasan yang mengalami percepatan perubahan penutup lahan melalui data penutup lahan multi temporal;
3. Menyusun rekomendasi wilayah /kawasan yang mengalami percepatan perubahan penutup lahan untuk dilakukan pemotretan dengan wahana drone oleh Tim SRC – PPIIT;
4. Menyerahkan data sebagaimana angka 1). 2). dan 3). kepada Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas untuk dilakukan penyusunan Neraca Sumberdaya Lahan Kawasan Gunung Merapi.

Tindak Lanjut

“ Surat Gubernur D.I Yogyakarta kepada Kepala BIG ttg. Permohonan Pemetaan Cepat dan Analisis Neraca di Kawasan Lindung Merapi ...”

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

12:10
10/09/2021

Zoom Meeting

Recording

Setiyani

Yusuf Wibisono... Antton - BIG BIG_Lien Rizalina Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem

Metode

- Metode penginderaan jauh berdasarkan interpretasi visual citra satelit
 - Penutup Lahan T0 = menggunakan sumber data CSRT perekaman 2013 – 2015, jika ada awan menggunakan SPOT 5/6/7 perekaman tahun 2013 - 2015, dikoreksi geometrik terlebih dahulu secara image to image menggunakan acuan posisi sesuai CSRT. Untuk membantu interpretasi digunakan data referensi berupa IG Penutup Lahan skala 1:250.000 tahun 2016
 - Penutup Lahan T1 = menggunakan sumber data SPOT 6 / 7 perekaman tahun 2019 – 2020, dikoreksi geometrik terlebih dahulu secara image to image menggunakan acuan posisi sesuai CSRT
- Skala zoom untuk interpretasi / digitasi : 1:2.500 – 5.000
- Klasifikasi penutup lahan mengacu pada SNI 7645-1:2014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan Skala Kecil Menengah Bagian 1

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

12:11
10/09/2021

You are viewing Yusuf Wibisono's screen

Zoom Meeting

Recording

Setiyani

Yusuf Wibisono... Antton - BIG BIG_Lien Rizalina Sri Hartini BIG_Ferrari Pinem

Progres/Realisasi Pelaksanaan

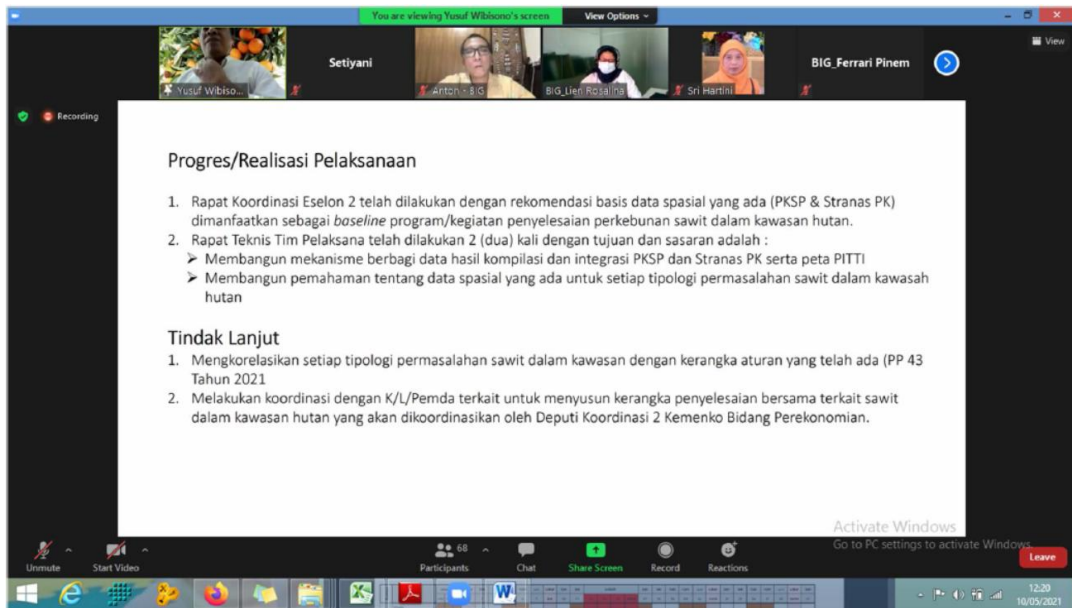
- Citra SPOT 5 / 6 / 7 LAPAN, sebagian sudah diolah :
 - Penggabungan sub-scene → 1 scene
 - Pansharpened
 - Konversi ke ECW
- Pembentukan tim kerja – nota dinas Kapus PIT
- Penyusunan pedoman interpretasi penutup lahan
- Penyusunan kunci interpretasi
- Identifikasi obyek penutup lahan dari citra satelit

Kendala & Pemecahan Masalah

- Kendala belum ada alokasi anggaran dan sistem kinerja personil
- Perlu pengaturan/mechanisme pada sistem penganggaran untuk kegiatan yang diluar DIPA yang telah ada (menganat PPIT masuk WBK)

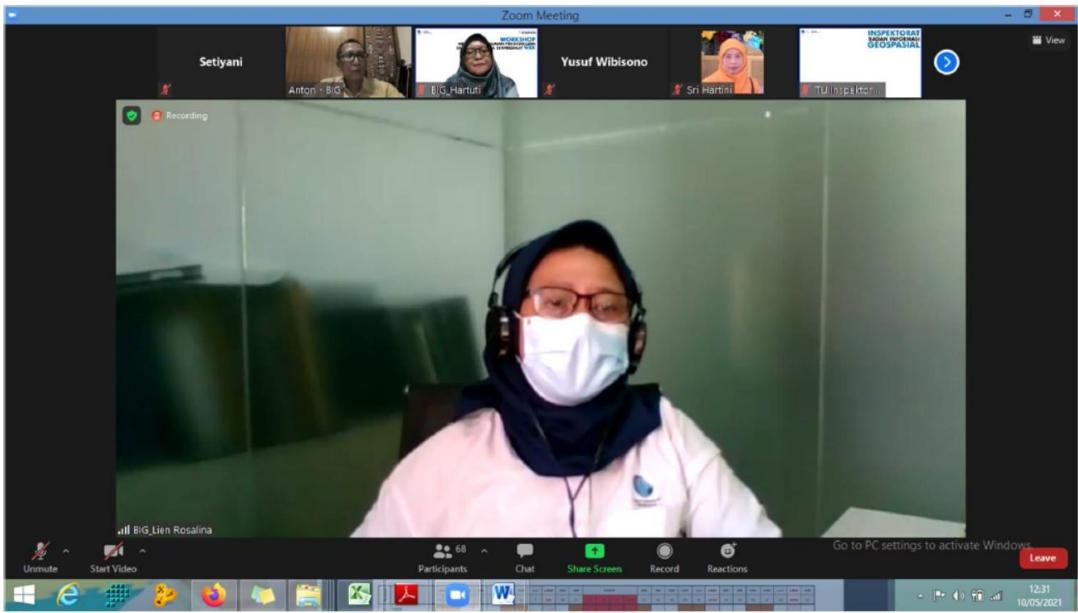
Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

12:16
10/09/2021



Dokumentasi







Tabel 14. Capaian Kinerja DIGT Triwulan I Tahun 2021

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
1	Meningkatnya ketersediaan tema informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	IKP01. Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibangun sesuai kebutuhan pembangunan nasional	8,36%	PPTRA	ABT.001	Bantuan Teknis Rekomendasi Peta Rencana Detil Tata Ruang	100 Rekomendasi Kebijakan	berkenaan dg pencabutan PP 8/2013 seluruh kegiatan di pokja Tata Ruang perlu dilakukan revisi/penyesuaian	2.00%
					ABT.002	Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang	20 Rekomendasi Kebijakan		berkenaan dg pencabutan PP 8/2013 seluruh kegiatan di pokja Tata Ruang perlu dilakukan revisi/penyesuaian
				PPIT	ABT.003	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> · Penyepakatan skema teknis pembinaan · Assesment bisnis proses penyelenggaraan IG KKP · Perencanaan penyusunan kajian · Rapat masukan kebutuhan data · Pembuatan Frame Outline Naskah Standard 	15.00%
					ABT.004	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> · Updating data dari kabupaten rokan hulu tanggal 18 Maret 2021 · Penyusunan rencana kerja untuk pengumpulan data serta pengolahan data 	10.40%
					ABT.005	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Ijin	2 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> · Koordinasi dengan Jaskel KKP · Rapat Persiapan Fullboard meeting 	12.00%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
					Lokasi Terbina			<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan SOP - Rapat Penyusunan Modul Metadata dan Modul Berbagi Pakai Data IG Lahan Garam dengan PPIG dan PSKIG - FGD SOP Penyelenggaraan IG Lahan Garam - Rapat finalisasi SOP Penyelenggaraan IG Lahan Garam pasca FGD 	
					ABT.006 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> - Menselaraskan kegiatan IGT Kawasan Konservasi Perairan antara BIG dan KKP (Koordinasi dengan KKHL dan KKP) - Mengumpulkan data citra penginderaan jauh - Mengumpulkan data geospasial tertentu di BKKPN Kupang 	19.50%
					ABT.007 Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> - Fiksasi penunjukan personil berdasarkan tahapan kegiatan - Koordinasi internal untuk penyusunan spesifikasi IG Karhutla - Koordinasi dg Walidata (KLHK) - Editing spesifikasi IG Karhutla pada substansi dan 	25.00%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								teknis pemetaan	
					ABT.008	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat dg IGD Pembahasan Kebutuhan Walidata terhadap IGD Format Raster - Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Standar IG Risiko Banjir - Penyusunan draf Spek IG Risiko Banjir - Kompilasi Data-Data pendukung - FGD Penyusunan Spesifikasi IG Risiko Banjir dg Walidata - Rapat internal dengan DIIG 	14.51%
					ABT.009	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dg K/L - Rapat pembahasan hasil koreksi LBS - Menyelesaikan QC di 111 kabupaten/kota (dari 257 kabupaten/kota) 	6.00%
					ABT.010	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Penepakatan skema teknis pembinaan - Assesment bisnis proses penyelenggaraan IG KKP - Perencanaan penyusunan kajian - Rapat masukan kebutuhan data - Pembuatan 	12.76%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								Frame Outline Naskah Standard	
		IKP02. Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan informasi geospasial tematik strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional		PPTRA	CBO.001	Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	17.185 Km2	<ul style="list-style-type: none"> Review KAK dan HPS dengan inspektorat Inventarisir data citra penginderaan jauh Sumatera bagian Utara 	5.00%
					CBO.002	Atlas Geospasial Indonesia	1.899.695 Km2	<ul style="list-style-type: none"> pembentukan tim kerja identifikasi kebutuhan data dan informasi koordinasi pembagian tugas tim kerja menyusun timeline kegiatan review KAK kontraktual pengembangan e-Atlas bersama PPIG survey awal ke Provinsi Jawa Tengah 	12.00%
					CBO.003	Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	205.217 Km2	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi pembagian tugas tim kerja & koordinasi dg Tim Integrasi Geospasial-Statistik Desa terkait identifikasi keberadaan data indikator TPB Review KAK & HPS dg APIP & ditandatangani PPK PPTRA FGD dengan Tim SMERU Research Institute identifikasi data 289 indikator TPB 	12.50%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
					CBO.004	Atlas Taktual Indonesia	37.197 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan peta awas administrasi provinsi dan kabupaten/kota Jawa Barat - Kontrol kualitas peta awas administrasi - Pengumpulan IG Dasar untuk penyusunan peta awas 	16.00%
					CBO.005	IGT Integrasi Spasial-Statistik	133.157 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dg Kemendesa terkait data statistik milik kemendesa yang akan digunakan sebagai bahan SDGs Desa - Kesepakatan dg Kemendesa untuk berkolaborasi menyusun SDGs Desa (rencana penyusunan PKS) - Akan dilaksanakan FGD untuk finalisasi Design Peta Geostatistik 	20.00%
					CBO.006	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup	1.899.695 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan Citra Satelit Sentinel Wilayah Nasional & Data Batas KKPN - Proses Pengumpulan CSRT utk Neraca KKPN, Peta Mangrove & Peta Terumbu Karang & Lamun - Simulasi Reklasifikasi Kelas PL SNI 	14.00%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								<ul style="list-style-type: none"> menjadi Kelas SEEA - FGD Ketersediaan Data SDAL utk Neraca KKPN - Pelatihan Identifikasi SDAL Menggunakan Citra Sentinel & Worldview 	
				PPIT	CBO.007	IGT Peringatan Dini Banjir	1.000 km2	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dg PPRT, PPIG, dan PJKGG terkait data-data IGD dan penggunaan HPC - Koordinasi dg ITB terkait kerjasama dalam pemodelan peringatan dini banjir - Pengecekan data IGD dan IGT 	9.00%
					CBO.008	Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000	119.752 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - TTD Kontrak Swakelola Tipe II dengan UGM - Pengecekan administrasi Kontrak Swakelola Tipe II ke DIY - Koordinasi bantuan personel dg ITB & UB - Pengumpulan Peta Geologi & data CH Prov. Bali - Pengolahan DEMNAS - Pra survei Bali & NTT 	12.20%
					CBO.009	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	30 km2	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terkumpulkan 6 data dari 8 data yang dibutuhkan - Pemotretan udara di 	16.60%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								wilayah gumuk pasir Yogyakarta - Pembuatan rencana kerja terkait penyelenggaraan IG Tahunan	

2. Rabu, 25 Agustus 2021. Rapat monitoring dan evaluasi Triwulan 2, yang membahas:

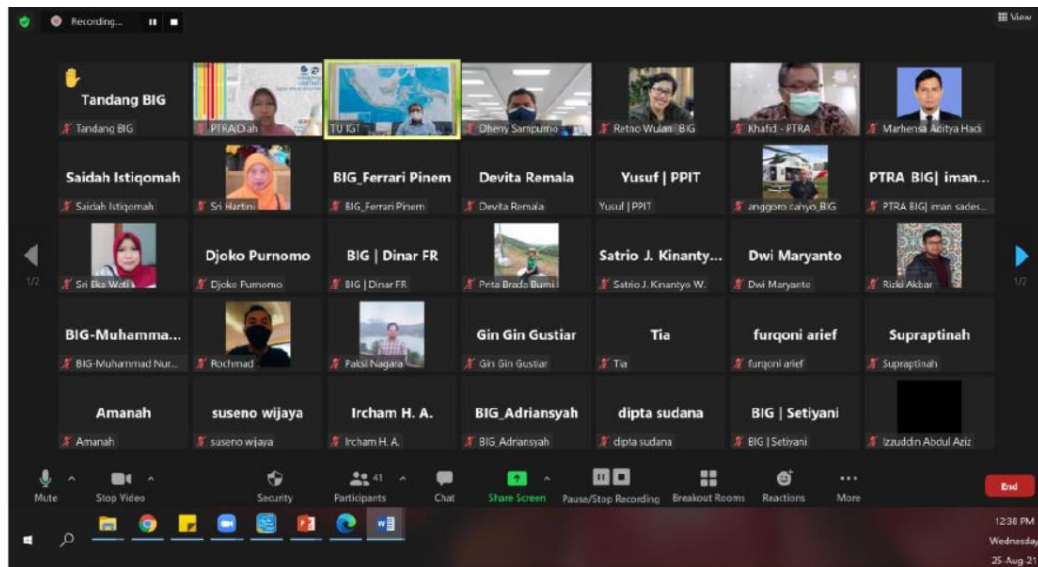
- Realisasi sampai dengan pertengahan Agustus anggaran PTRA sebesar 16,45%, dengan realisasi fisik 43 – 59%.
- Realisasi sampai dengan pertengahan Agustus anggaran PPIT sebesar 16,45%, dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 50,5%.
- Capaian kinerja DIGT untuk triwulan 2, disajikan dalam lampiran.
- Dengan diturunkannya PPKM ke level 3, maka perjalanan dinas diharapkan sudah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- Dashboard IGT perlu diperjelas klasifikasinya antara terstandar dan terbina.
- Implementasi dari standar yang telah diterapkan juga perlu diperjelas detailnya.
- Saat ini dashboard IGT sudah open akses dari luar jaringan BIG, stress test dan vulnerability test sudah lolos dari Pusat PPIG.
- Untuk penganggaran dan maintenance Dashboard IGT tahun 2022 akan dikoordinasikan dengan PPIG, bila diperlukan akan disiapkan anggarannya.
- Dashboard RB juga perlu diperhatikan dan diisi.

No	Point Kesepakatan	Kesepakatan Teknis	Catatan
1	Pendekatan sistem/metode Klasifikasi		
	✓ Apriori atau Aposteriori	Apriori	Untuk melengkapi pendekatan sistem/metode pada kajian sebelumnya (2018), yaitu aposteriori
	✓ Hierarki atau non-Hierarki	Hierarki	Berdasarkan: ✓ kesamaan/kemiripan karakteristik object dan/atau atributnya (struktur geo-DB) ✓ skala
	✓ GIS-based vs Cartographic-based	GIS-based	✓ Pendekatan Kartografi sdh pernah dilakukan (2018)
2	Ruang lingkup		
	✓ Penutup Lahan (<i>Land Cover / LC</i>) dan/atau Penggunaan Lahan (<i>Land Use / LU</i>)	Kombinasi Q: Geo-DB nya dikelola gabungan atau terpisah?	✓ LU dan LC walaupun bisa dibedakan namun cenderung sulit dipisahkan ✓ layer PL di data Peta RBI yang ada saat ini sudah kombinasi LULC
3	Referensi atau acuan standar		
	✓ INSPIRE/RSNI2016/FAO/ISO19131	INSPIRE/ISO19131	✓ Format INSPIRE, utamakan yang <i>mandatory</i>
4	Pemutakhiran		
	✓ Periodik atau sewaktu-waktu	Kombinasi	Skala Kecil/Menengah: periodik, Skala Besar: sewaktu-waktu
	✓ Menyeluruh atau parsial	Kombinasi	Skala Kecil/Menengah: menyeluruh, Skala Besar: parsial
	✓ <i>Countrywide</i> atau <i>region-based</i>	Kombinasi	TBD (kesepakatan dengan K/L/P sebagai user)
	✓ Format: raster atau vektor	Kombinasi	TBD (kesepakatan dengan K/L/P sebagai user)

- Peta dasar diharapkan dapat menyediakan IG unsur penutup lahan mutakhir yang dapat langsung digunakan oleh penyelenggara IGT sesuai dengan keperluannya pada skala yang dibutuhkan, dengan minimal effort tambahan.
- Perlu dicermati apakah pelatihan teknis dan yang sifatnya lebih umum apakah bisa dianggarkan unit teknis atau hanya bisa di Biro PKH.
- Akan dilaksanakan plenary meeting UNGGIM. Dari IGT akan menyiapkan progress dari Working Group 3 mengenai Integrasi Spasial – Statistik.
- **HASIL KONFIRMASI WALIDATA IGT**
 1. 24 Kementerian/Lembaga sebagai K/L Penanggungjawab pada Renaksi PERPRES 23/2021
 2. 6 Kementerian/Lembaga pengusul IGT di luar Renaksi PERPRES 23/2021
 3. 158 IGT pada Renaksi PERPRES 23/2021
 4. 122 IGT diluar Renaksi PERPRES 23/2021
- **HASIL KONFIRMASI POKJANAS IGT**
 - ❖ 38 Kementerian/Lembaga sebagai Anggota Pokjanas IGT
 - ❖ 19 K/L menyampaikan masukan, antara lain tentang :
 - Perubahan nomenklatur unit
 - Pengusulan perubahan unit pada K/L sebagai anggota gugus tugas
 - Persetujuan terhadap struktur Pokjanas IGT
- **TINDAK LANJUT RAKORNAS IG 2021 :**
 - ❖ Penetapan Surat Keputusan Kepala BIG tentang Walidata IGT Tahun 2021

- ❖ Penetapan Surat Keputusan Kepala BIG tentang Kelompok Kerja Nasional IGT Tahun 2021
- ❖ Penyusunan Dokumen Rencana Induk Penyelenggaraan IG Nasional
- ❖ Monitoring tahunan implementasi dari Rencana Aksi Penyelenggaraan IG (Rakornas tahunan)
- ❖ Pelaporan implementasi hasil RAKORNAS IG ke Kepala BIG dan Menteri PPN/BAPPENAS

Dokumentasi:



- Capaian Kinerja Deputy IGT untuk Sasaran Program 1 masih nol karena belum ada output yang dihasilkan pada SP ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja DIGT Triwulan II

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
1	Meningkatnya ketersediaan tema informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	IKP01. Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibangun sesuai kebutuhan pembangunan nasional	8,36%	PPTRA	ABT.001	Bantuan Teknis Rekomendasi Peta Rencana Detil Tata Ruang	100 Rekomendasi Kebijakan	· berkenaan dg pencabutan PP 8/2013 kegiatan Bantek Peta RDTR tidak dilanjutkan	2.00%
					ABT.002	Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang	20 Rekomendasi Kebijakan	· Pemilihan 20 Lokasi Pembinaan · Konfirmasi kepada Pemda · Koordinasi internal BIG (PTRA-PPRT-PKLP-PPBW)	25.00%
				PPIT	ABT.003	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	· Penyusunan Draft SOP IGT Pemetaan Kelapa Sawit; Pengumpulan Data; Pengolahan Citra; Geodatabase, Interpretasi dan Dealineasi; Survei Lapangan; & Reinpretasi · Koordinasi teknis terkait sawit dalam kawasan hutan · Uji coba form QC dealinieasi	32.00%
				ABT.004	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	· Koordinasi prasurvei · Prasurvei utk identifikasi kebutuhan standar · Penyempurnaan dokumen atas input masukan spesifikasi	42.00%	
				ABT.005	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Ijin Lokasi Terbina	2 Rekomendasi Kebijakan	· Klinik Verifikasi Data IGT IUP dan ILOK Kab Pelalawan; Bengkalis; Kuantan	33.00%	

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								Singingi;Kampar;Rokan Hulu;Indragiri Hilir;Nabire;&Mimika	
					ABT.006	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Workshop QC sumber data, basisdata geosp & deliniasi awl Perbaikan dok QC sumber data, basisdata geosp & deliniasi awl Supervisi sumber data IG Lahan Garam wil Jawa 	41.50%
					ABT.007	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Koord pelaksanaan workshop dg Dit KKHL Dirjen PRL KKP Asistensi penyusunan peta kawasan konservasi perairan di TWP Pieh 	48.00%
					ABT.008	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan toolbox agr dpt dimasukkan dlm modul Pengumpulan data dsr utk uji coba implementasi kbth penulisan modul Pengolahan data utk uji coba implementasi di Riau, Kalteng, & NTT 	29.71%
					ABT.009	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Koord Penyusunan Petunjuk Teknis IGT Risiko Banjir Asistensi Pengumpulan 	44.00%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								Data & Survei Lapangan Kab. Gorontalo	
					ABT.010	Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan utk 6 prov & 8 prov Implementasi QC utk 8 Provinsi 	25.46%
		IKP02. Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan informasi geospasial tematik strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional		PPTRA	CBO.001	Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	17.185 Km2	<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan Kontrak tgl 9 Juni 2021 menyusun form QC pengumpulan data, pengolahan data, kartografi, & QC produk atlas Kick Off Meeting tgl 14 Juni 2021 melakukan supervisi pengumpulan & pengolahan data Atlas Gunungapi 	35.00%
					CBO.002	Atlas Geospasial Indonesia		1.899.695 Km2	<ul style="list-style-type: none"> FGD Pematangan Konsep & Penyusunan Kerangka Atlas Survey Lapangan di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, & Sumsel pengumpulan data sekunder dari K/L terkait penyusunan Peta tematik sejarah Paket Pengadaan pengembangan e-Atlas sudah masuk tahap seleksi

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	cascading	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
					CBO.003	Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	205.217 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - Acara penandatanganan kontrak kegiatan pada tgl 9 Juni 2021 - Kickoff meeting dengan konsultan pemenang kontrak pada tgl 15 Juni 2021 - Pengumpulan data IGD (Peta RBI) - Pengumpulan data capaian & target indikator TPB (nasional/prov/kab/kota) - Melakukan supervisi pengumpulan dan pengolahan data TPB sebanyak 2 kali secara daring, pada tgl 22 dan 29 Juni 2021 	37.50%
					CBO.004	Atlas Taktual Indonesia	37.197 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Tim Dria Manunggal secara daring - Pembuatan Peta Braille - Kontrol Kualitas Peta Braille 	43.00%
					CBO.005	IGT Integrasi Spasial-Statistik	133.157 Km2	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan metode perolehan output kegiatan - Penyusunan Draft MoU dengan Kemendesa PDTT - Revisi anggaran kegiatan - Pembuatan Aplikasi SDGs Desa 	40.00%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	casca ding	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								· Penyusunan RAB dan KAK Pembuatan Aplikasi SDGs Desa	
					CBO.006	IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup	1.899.695 Km2	· -Proses Penyusunan Draft Juknis Neraca Penutup Lahan · Proses Penyusunan Draft Juknis Neraca Sumberdaya Alam Laut · Rapat Pembahasan Juknis Neraca Penutup Lahan · Pra Survei Lapangan NSDAL di Gili Matra · Survei Lapangan NSDAL di Gili Matra · Rapat Pembahasan Hasil Survei Lapangan NSDAL · Penyusunan Peta Pasiva Penutup Lahan Nasional	34.00%
				PPIT	CBO.007	IGT Peringatan Dini Banjir	1.000 km2	· Pengolahan data · Pengecekan data IGD dan IGT · Permintaan akun VPN · Profiling Risiko Banjir (Profiling DAS, Skenario banjir, Analisis pola hujan, Pemodelan hujan probabilistik)	40.00%
					CBO.008	Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000	119.752 Km2	· Peta Tentatif untuk survei lapangan	39.10%

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	Target	casca ding	Keterangan		Capaian kinerja SP	Keterangan	Progres Capaian fisik rekap
					Rincian Output	Target Volume			
								Provinsi Jatim dan Bali · Survei lapangan Provinsi Jatim · Survei lapangan Provinsi Bali	
					CBO.009	Peta Reaksi Cepat Kebencanaan	30 km2	· Sudah dilakukan survey analisis potensi bencana longsor di sebagian desa di sukabumi, untuk cakupan wilayah yang di survey berada pada kisaran 1km	69.89%

KINERJA LAIN-LAIN

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terus melakukan upaya kinerja untuk mendukung sasaran strategis, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa kinerja lain-lain yang mendukung kinerja utama sebagai berikut:

1. Inovasi Pelayanan Publik: "Geoliterasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra Melalui Atlas Taktual".

Atlas Taktual yang diproduksi oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas meraih penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada saat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Semangat yang diusung dalam menyelenggarakan Atlas Taktual ini adalah memberikan layanan sebagai dukungan terkait hak untuk memperoleh informasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan lingkungannya bagi para penyandang disabilitas netra. Hal ini juga sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dengan semangat *no one left behind* - tidak ada satu orang pun yang tertinggal.

Selama ini penyandang disabilitas netra hanya mendapatkan informasi kewilayahan melalui buku pelajaran geografi atau IPS dan mendengarkan dari audio, sehingga tidak sepenuhnya memahami suatu wilayah secara komprehensif. Melalui Atlas Taktual, penyandang disabilitas netra bisa meraba bentuk, sebaran, posisi relatif antara satu lokasi dengan lokasi lain, dan ukuran relatif suatu objek, sehingga informasi kewilayahan dapat dipahami lebih komprehensif. Atlas Taktual terus dikembangkan dalam berbagai tema, antara lain wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, transportasi, sebaran gunung dan sungai, bangunan bersejarah, pariwisata, dan industri. Selain itu, juga telah membuat Peta Dunia Taktual yang menggambarkan lima benua, empat samudera, dan negara-negara di seluruh dunia dalam satu lembar peta taktual berukuran 85 cm x 60 cm.



Gambar 62. Piagam Penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

2. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP)

Penyelenggaraan informasi geospasial diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, baik Informasi Geospasial Dasar (IGD) maupun Informasi Geospasial Tematik (IGT). Untuk mewujudkannya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendukung yaitu program percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi berbagai konflik dan permasalahan pemanfaatan

ruang yang tumpang tindih. Kebijakan tersebut mulai diatur pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 (Perpres No. 9/2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang kemudian diperpanjang pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Perpres No. 23/2021) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perpres No. 23/2021 ini bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Perpres No. 23/2021 memuat target pemenuhan terhadap 158 IGT (85 Pemutakhiran IGT dan 73 Perwujudan IGT) yang diselenggarakan oleh 24 K/L dan melibatkan 34 Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan KSP periode 2021-2024 terdiri atas 4 kegiatan utama, yaitu: Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Berbagi Data dan IG, yang merupakan tambahan kegiatan dari pelaksanaan KSP periode sebelumnya. Berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 23/2021 Ketua Tim Pelaksana KSP dijabat oleh Kepala BIG dan secara administratif berkedudukan di BIG. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Sekretariat Kebijakan Satu Peta, dimana menegaskan bahwa Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG menjabat sebagai ketua tim Satuan Tugas 1 yang menangani tahapan kompilasi dan integrasi. Peran Ketua Satuan Tugas 1 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT nasional yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemda;
- b. melakukan Kompilasi dan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
- c. melakukan Integrasi bersama Walidata IGT sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan KSP dengan K/L, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemda terutama dalam kegiatan Kompilasi dan Integrasi IGT; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi data IGT hasil Kompilasi dan Integrasi.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan amanat Perpres No. 23/2021, sejumlah kegiatan telah diselenggarakan dalam pemenuhan target Satuan Tugas 1 dalam penyelenggaraan IGT Terintegrasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Salah satu target rencana aksi yang harus dipenuhi oleh BIG dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 adalah penetapan Walidata Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) IGT. Kepala BIG telah menerbitkan SK Nomor: 38 Tahun 2021 tentang Walidata IGT dan SK Nomor: 40 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional IGT. Tindak lanjut dari terbitnya surat keputusan tersebut diadakannya Rapat Koordinasi Walidata IGT dan Pokjanas IGT pada Bulan Oktober 2021 untuk menyusun strategi penyelenggaraan IGT nasional dan renaksi Pokjanas IGT, diantaranya percepatan penyusunan standar IGT.

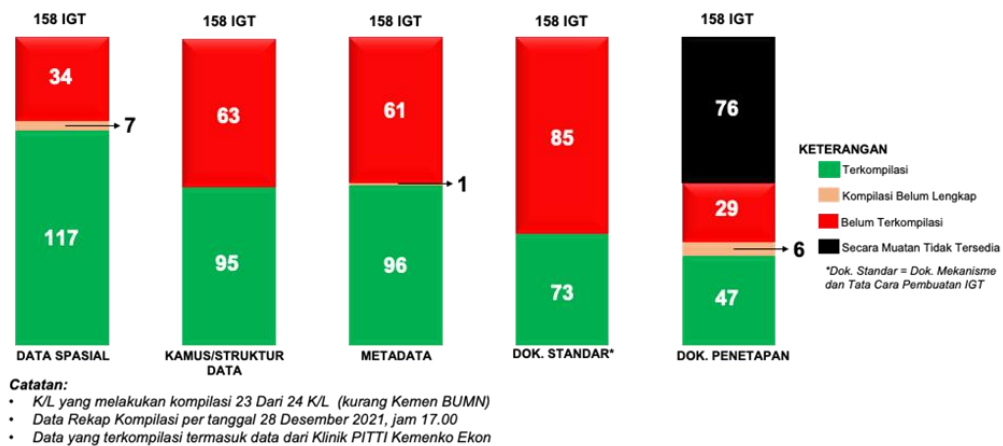
Salah satu prasyarat pemenuhan standar IGT adalah terselenggaranya metadata dalam penyelenggaraan IGT. Metadata merupakan salah satu komponen pendukung yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sesuai kaidah Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan, metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

Sebagai pembina data geospasial, Badan Informasi Geospasial (BIG) menerbitkan Surat Edaran Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Format Baku Metadata Spasial. Surat tersebut mengatur bahwa penyusunan metadata geospasial mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia. Guna mensosialisasikan aturan di atas, BIG menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan metadata IGT kepada 24 kementerian/lembaga penanggungjawab rencana aksi (renaksi) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang diselenggarakan secara *hybrid* pada 6-9 Desember 2021. Ada dua materi yang disampaikan dalam bimtek. Pertama, penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) dalam Satu Data Indonesia yang disampaikan Sekretariat Satu Data Indonesia. Kedua, metadata IGT sesuai prinsip Satu Data Indonesia serta implementasi penyusunan metadata IGT oleh BIG.

Seluruh peserta bimtek diharapkan dapat memenuhi target renaksi Perpres 23 Tahun 2021 pada Bulan Desember 2021 dengan IGT dan metadata yang sesuai

dengan standar. Komponen metadata yang harus dipenuhi dalam standar metadata terdiri atas identitas, cakupan, kualitas, sistem referensi, acuan ruang dan waktu, serta pendistribusiannya. Selanjutnya, Sekretariat Kebijakan Satu Peta akan memverifikasi IGT dan metadata dengan melihat kelengkapan isian. Kriteria evaluasi kelengkapan metadata dinilai dari kelengkapan isian komponen metadata.

Pencapaian target renaksi Perpres 23/2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 ditampilkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 63. Capaian target renaksi Perpres 23/2021 sampai dengan Bulan Desember 2021

3. Kajian Pemetaan Cepat dan Analisis Neraca Lahan Kawasan Lindung Gunung Merapi

Pada tahun 2021 ini juga telah dilaksanakan kegiatan berdasarkan permohonan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 660/7745 tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan untuk Pemetaan Cepat dan Analisis Neraca Kawasan Lindung Gunung Merapi (DIY dan Jateng).



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦶꦩꦼꦮꦏꦠ

Yogyakarta, 19 April 2021

Nomor : 660/7745
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan untuk Pemetaan
Cepat dan Analisis Neraca
Kawasan Lindung Gunung
Merapi (DIY dan Jateng)

Kepada
Yth. Kepala Badan Informasi
Geospasial
Di
JAKARTA

Dalam rangka mendukung informasi guna pengambilan kebijakan demi pembangunan berkelanjutan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan untuk dapat dilakukan Pemetaan Cepat dan Analisa Neraca Kawasan Lindung Gunung Merapi (DIY dan Jawa Tengah).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kajian ini telah diserahkan langsung oleh Kepala BIG Muh Aris Marfai kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur, Kota Yogyakarta pada Senin, 20 Desember 2021.



Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa perubahan penutup lahan terbesar di Kawasan Lindung Gunung Merapi adalah perubahan semak menjadi penggalian pasir, tanah, dan batu yang telah melampaui batas serta perubahan dari sawah menjadi bangunan permukiman.



Selain itu juga terjadi ketidaksesuaian penutup lahan dengan Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Merapi yang didominasi oleh kegiatan penambangan yang tersebar di sepanjang sungai.



4. Dukungan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Laut

Berdasarkan Surat Permohonan Dukungan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Laut yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan No 1520/DJPRL/XIII/2020 tanggal 23 Desember 2020, BIG diminta untuk dukungan pemetaan neraca spasial pesisir dan laut pada 10 (sepuluh) wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang akan diselenggarakan sampai dengan tahun 2024. Peran BIG pada kegiatan bersama *Ocean Account* yaitu pada penyusunan *Ocean Assets* melalui penyusunan

pemetaan neraca sumberdaya laut dan pesisir dengan objek terumbu karang, lamun dan mangrove. BIG pada tahun 2021 ini melakukan penyusunan Prototipe Neraca Spasial Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut untuk kawasan konservasi perairan nasional wilayah TWP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan serta menyusun pedoman pemetaan neraca spasial SDA Pesisir dan Laut.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130, KCP 10041 TELEPON (021) 3513300, FAKSIMILE (021) 3520357 LAMARAN www.kkp.go.id EMAIL: persuratan.djpr@kkp.go.id</p> <hr/> <p>Nomor : IS/0/DJPR/LXII/2020 23 Desember 2020 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Dukungannya Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Laut</p> <p>Yth. Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Bogor Km. 46</p> <p>Berkenaan dengan rencana neraca sumberdaya alam laut dalam rangka mendukung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan khususnya di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sampai dengan Desember tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat telah membentuk dan mengelola secara efektif setidaknya 201 Kawasan Konservasi Perairan dengan luasan total sebesar 24,1 juta hektar. Pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan dilakukan dengan tujuan melindungi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya dan keanekaragaman hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat memberikan manfaat kepada ekonomi lokal dan nasional. Terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi, tatacaranya diatur dalam Permen KP No. 47 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Inisiasi penyusunan neraca sumber daya alam laut KKPN telah didiskusikan dalam rapat pembahasan tanggal 28 Agustus 2020 dan 25 November 2020 yang mengundang perwakilan unit kerja dari Kementerian/Lembaga terkait seperti BIG (Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, dan Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama), Ditjen Kekayaan Negara – Kemenkeu, BPS, Ditjen Bangsa – Kemendagri, LAPAN, P2O-LIPI, dan Kemenkomarves, serta unit kerja eselon 2 lingkup KKP. Rapat-rapat pembahasan menghasilkan rekomendasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> DJPRL pada tahun 2016 telah melakukan evaluasi ekonomi sumberdaya laut (ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun, dan perairan) KKPN Taman Wisata Perairan Gili Meno, Ayer, dan Trawangan yang menghasilkan perhitungan nilai valuasi total sumberdaya sebesar Rp. 26,86 triliun. Valuasi ekonomi yang telah dilakukan masih pada tataran kajian/riset akademis dan belum dapat diaplikasikan menjadi kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Untuk itu terdapat kebutuhan untuk menyusun neraca sumber daya alam laut KKPN. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan neraca sumber daya alam laut KKPN akan dimanfaatkan antara lain untuk: <ul style="list-style-type: none"> evaluasi kawasan konservasi (indikator kinerja pengelolaan kawasan); analisis biaya dan manfaat dari kegiatan konservasi dan/atau rehabilitasi; dan penerapan insentif keuangan. Mengingat BIG memiliki pengalaman dan kapasitas teknis dalam penyusunan NSPK Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Laut dan selama ini melakukan pembinaan teknis penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah, kami mengharapkan dukungan Saudara untuk penyusunan <i>prototype</i> neraca SDA laut dengan mengambil <i>pilot project</i> di Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Adapun saat ini terdapat 10 KKPN yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh</td> <td>f. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Tenggara</td> </tr> <tr> <td>b. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas</td> <td>g. Taman Wisata Perairan Taman Laut Banda</td> </tr> <tr> <td>c. Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan</td> <td>h. Taman Wisata Perairan Pulau Padaido</td> </tr> <tr> <td>d. Taman Nasional Perairan Laut Sawu</td> <td>i. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat</td> </tr> <tr> <td>e. Taman Wisata Perairan Kapposang</td> <td>j. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat</td> </tr> </table> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Pjt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu</p> </div> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Informasi Geospasial Sekretaris Jenderal KKP 	a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh	f. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Tenggara	b. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas	g. Taman Wisata Perairan Taman Laut Banda	c. Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	h. Taman Wisata Perairan Pulau Padaido	d. Taman Nasional Perairan Laut Sawu	i. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat	e. Taman Wisata Perairan Kapposang	j. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh	f. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Tenggara										
b. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas	g. Taman Wisata Perairan Taman Laut Banda										
c. Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	h. Taman Wisata Perairan Pulau Padaido										
d. Taman Nasional Perairan Laut Sawu	i. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat										
e. Taman Wisata Perairan Kapposang	j. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat										

Surat Permohonan Dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

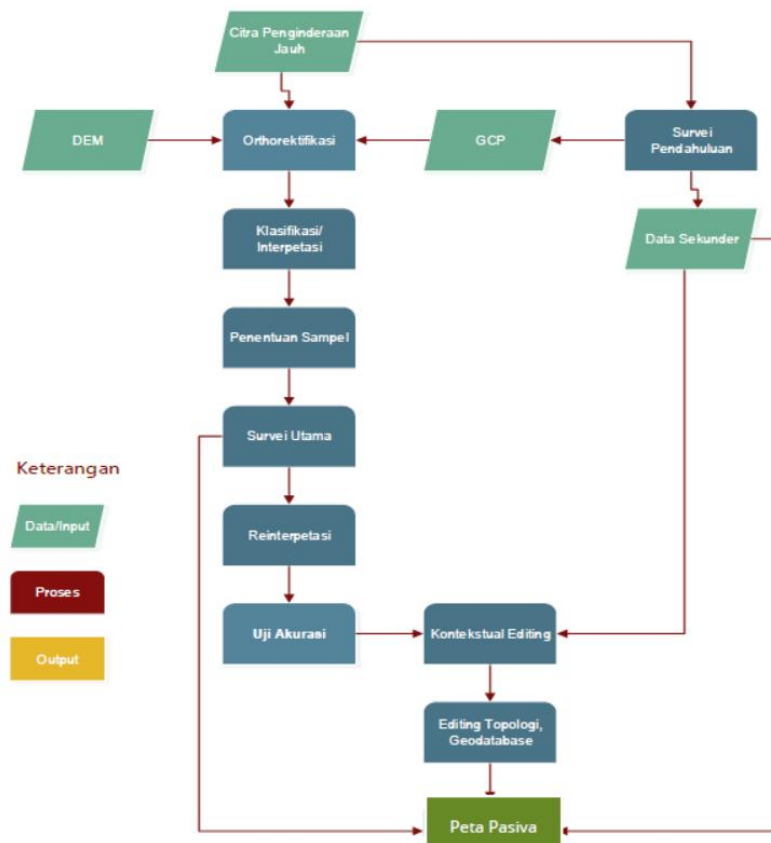
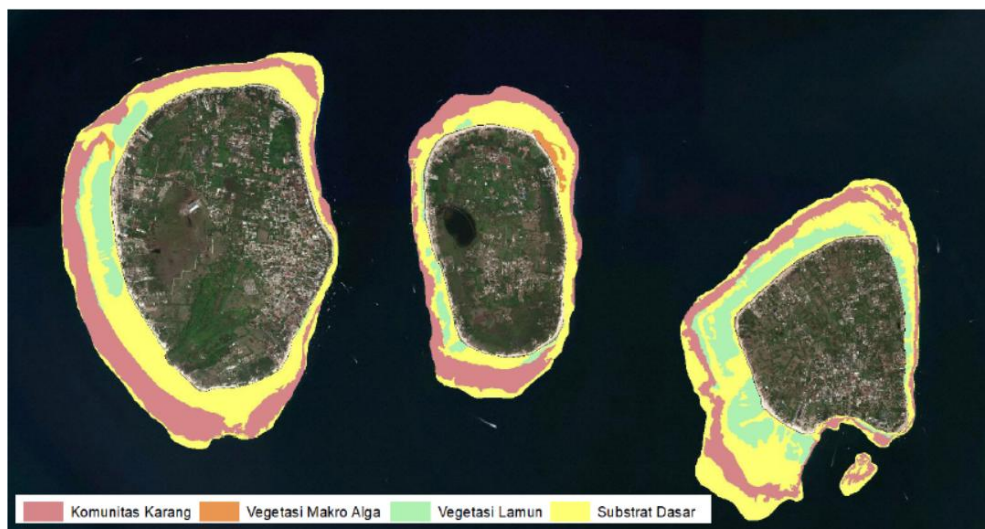
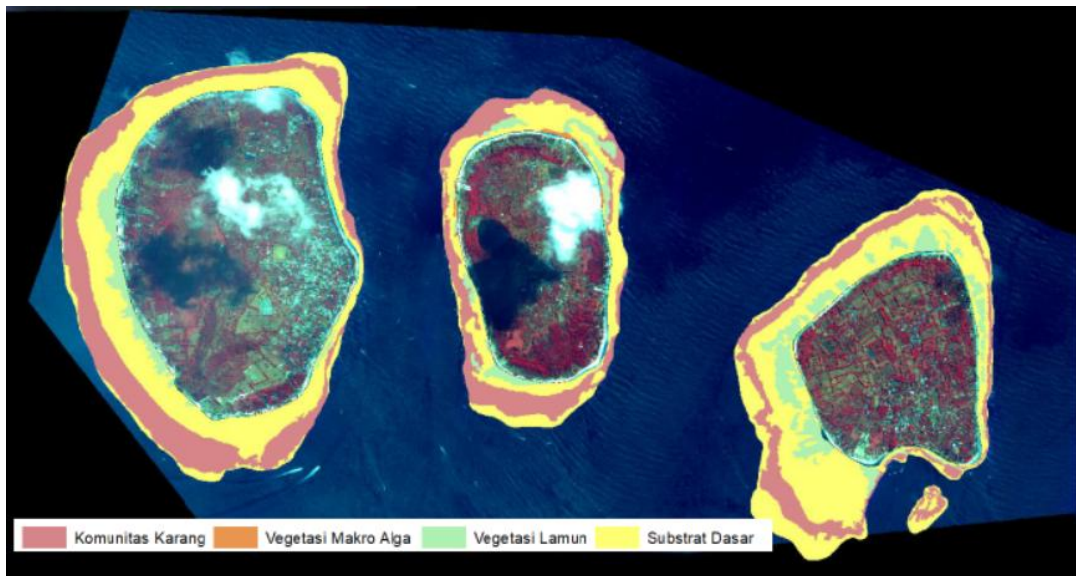


Diagram alir proses penyusunan peta pasiva sumberdaya alam laut dan pesisir



Peta Pasiva IG Terumbu Karang



Peta Aktiva IG Terumbu Karang

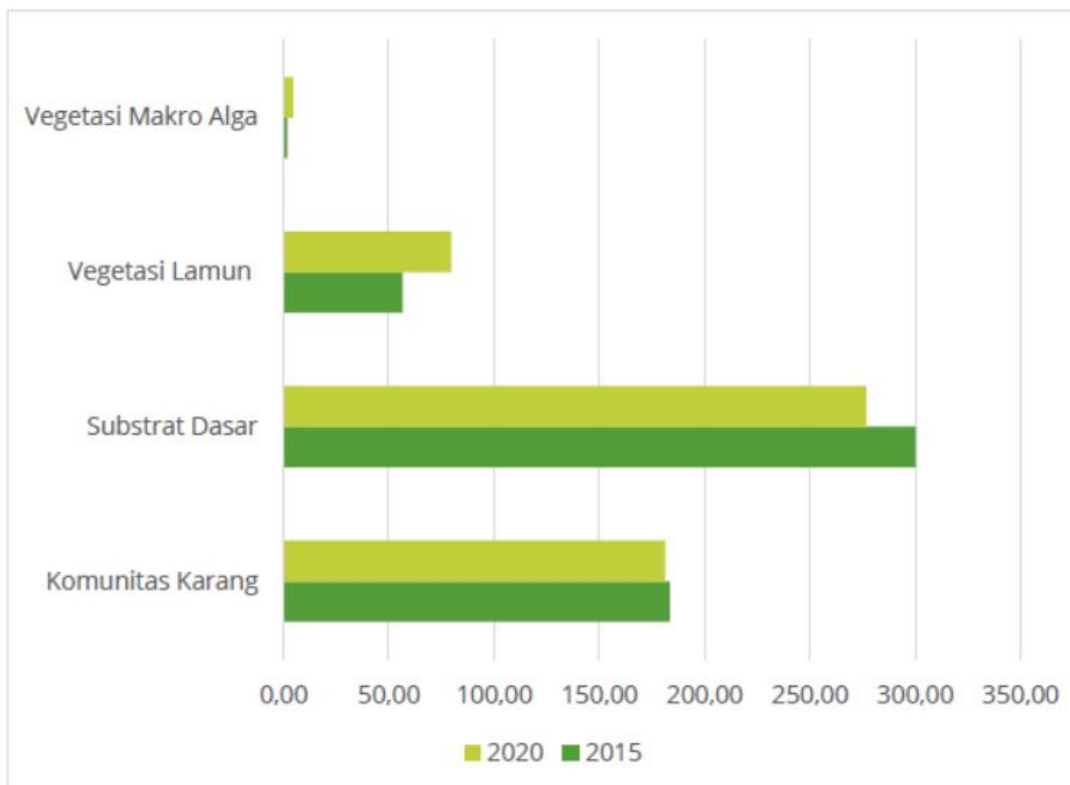


Peta Neraca IG Terumbu Karang Tahun 2015-2020

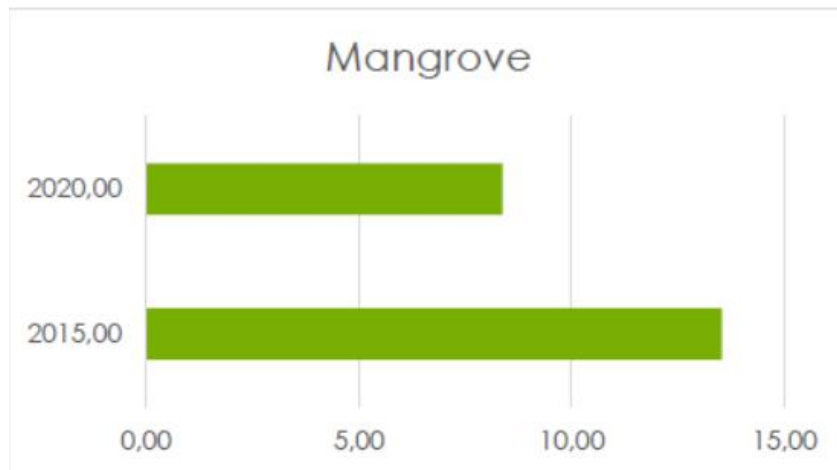
Tabel Perubahan Luas IG Terumbu Karang

Tutupan IG Terumbu Karang Tahun 2015	Tutupan IG Terumbu Karang Tahun 2020	Luas (hektar)
Komunitas Karang	Substrat Dasar	11,485
Komunitas Karang	Vegetasi Lamun	0,978
Komunitas Karang	Vegetasi Makro Alga	0,164
Substrat Dasar	Komunitas Karang	9,518
Substrat Dasar	Vegetasi Lamun	48,460
Substrat Dasar	Vegetasi Makro Alga	1,996
Vegetasi Lamun	Komunitas Karang	0,999
Vegetasi Lamun	Substrat Dasar	23,847
Vegetasi Lamun	Vegetasi Makro Alga	1,871
Vegetasi Makro Alga	Substrat Dasar	1,060
Vegetasi Makro Alga	Vegetasi Lamun	0,366

(Sumber : Analisis data, 2021)



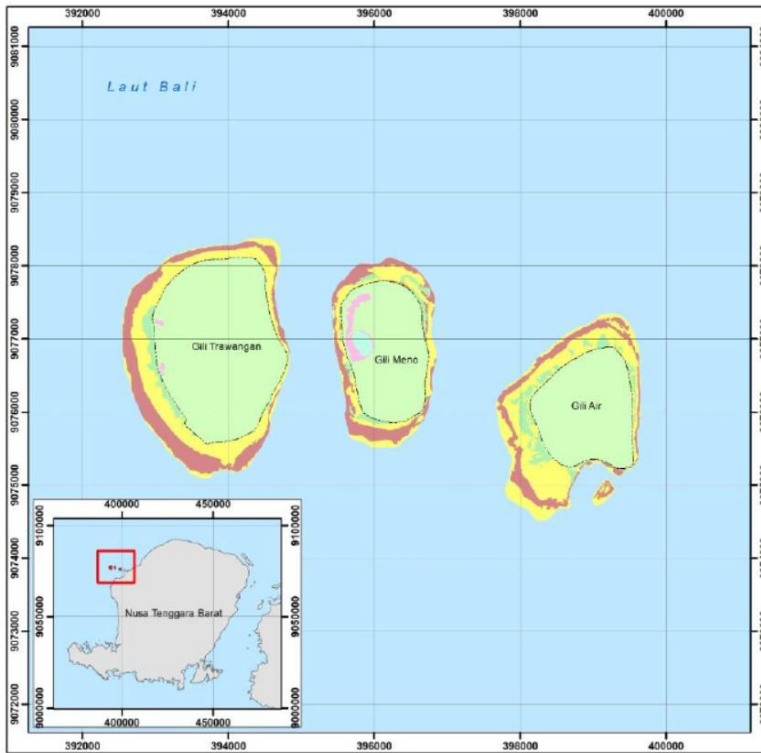
Grafik Penurunan IG Terumbu Karang



Grafik perubahan tutupan mangrove di TWP Gili Matra

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Objek mangrove memiliki luasan opening stock sebesar 13,53 hektar, dan mengalami penambahan luas sebesar 0,10 hektar dan pengurangan luas sebesar 5,24 hektar. Sehingga closing stock untuk mangrove sebesar 8,38 hektar atau mengalami penurunan sebesar 38,04 %.
2. Objek komunitas karang memiliki luasan opening stock sebesar 183,33 hektar, dan mengalami penambahan luas sebesar 10,52 hektar dan pengurangan luas sebesar 12,63 hektar. Sehingga closing stock untuk komunitas karang sebesar 181,22 hektar atau mengalami penurunan sebesar 1,15 %.
3. Objek lamun memiliki luasan opening stock sebesar 56,50 hektar, dan mengalami penambahan luas sebesar 49,80 hektar dan pengurangan luas sebesar 26,72 hektar. Sehingga closing stock untuk lamun sebesar 181,22 hektar atau mengalami peningkatan sebesar 220,74 %.



**PETA AKTIVA
SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR
TWP GILI MATRA
TAHUN 2015**

Skala 1 : 50.000

Keterangan:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Administrasi Desa
- Danau
- Pulau

Penutup Lahan

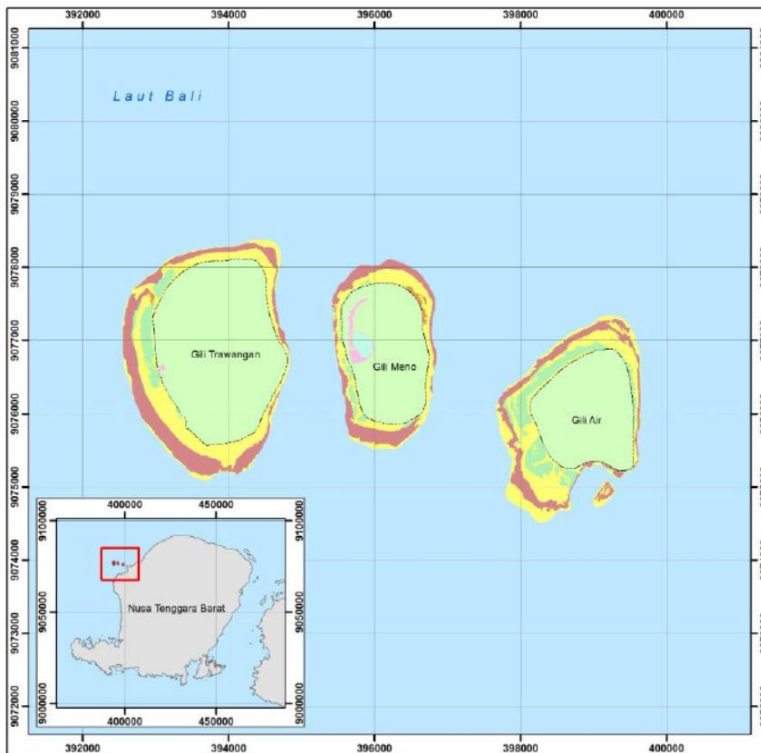
- Mangrove
- Komunitas Karang
- Substrat Dasar
- Vegetasi Lamun
- Vegetasi Makro Alga

Sumber Data:

1. Interpretasi Citra Pleiades Tahun 2015
2. Interpretasi Citra Worldview Tahun 2015
3. Peta Rupa bumi Indonesia Skala 1:25.000
4. Peta Batas Wilayah Administrasi Skala 1:50.000
5. Peta Terumbu Karang dan Lamun LIPI Tahun 2015

Peta ini disusun dan dipublikasi oleh:
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 46 Cibinong, 16911
Website: <http://www.big.go.id>

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



**PETA PASIVA
SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR
TWP GILI MATRA
TAHUN 2020**

Skala 1 : 50.000

Keterangan:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Administrasi Desa
- Danau
- Pulau

Penutup Lahan

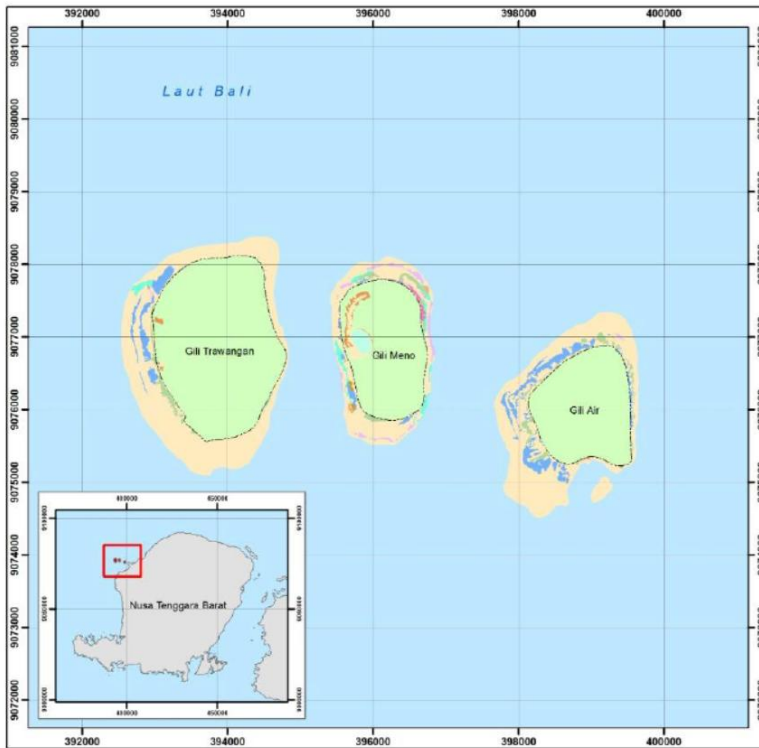
- Mangrove
- Komunitas Karang
- Substrat Dasar
- Vegetasi Lamun
- Vegetasi Makro Alga

Sumber Data:

1. Interpretasi Citra Pleiades Tahun 2020
2. Interpretasi Citra Worldview Tahun 2020
3. Peta Rupa bumi Indonesia Skala 1:25.000
4. Peta Batas Wilayah Administrasi Skala 1:50.000
5. Hasil Survei Lapangan Tahun 2021

Peta ini disusun dan dipublikasi oleh:
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 46 Cibinong, 16911
Website: <http://www.big.go.id>

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



**PETA NERACA
SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR
TWP GILI MATRA
2015 - 2020**

N
W E
S

Skala 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 Km

Keterangan:

Batas Wilayah Administrasi

- Batas Administrasi Desa
- Danau
- Pulau

Perubahan Penutup Lahan

- Tetap
- Bukan Mangrove menjadi Mangrove
- Mangrove menjadi Bukan Mangrove
- Komunitas Karang menjadi Substrat Dasar
- Komunitas Karang menjadi Vegetasi Lamun
- Komunitas Karang menjadi Vegetasi Makro Alga
- Substrat Dasar menjadi Komunitas Karang
- Substrat Dasar menjadi Vegetasi Lamun
- Substrat Dasar menjadi Vegetasi Makro Alga
- Vegetasi Lamun menjadi Komunitas Karang
- Vegetasi Lamun menjadi Substrat Dasar
- Vegetasi Lamun menjadi Vegetasi Makro Alga
- Vegetasi Makro Alga menjadi Substrat Dasar
- Vegetasi Makro Alga menjadi Vegetasi Lamun

Sumber Data:

1. Peta Aktiva Sumberdaya Laut dan Pesisir Tahun 2015
2. Peta Pasiva Sumberdaya Laut dan Pesisir Tahun 2020
3. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
4. Peta Batas Wilayah Administrasi Skala 1:50.000
5. Hasil Survei Lapangan Tahun 2021

Peta ini disusun dan dipublikasi oleh:
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 48 Cibinong, 16911
Website: <http://www.big.go.id>

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



Malaka, Nusa Tenggara Timur (Foto: DB IGT)

Bab 4 Penutup

A decorative graphic consisting of several colorful triangles (red, blue, green) arranged in a cluster on the right side of the page, next to the chapter title.

Penyusunan LAKIN Deputi Bidang IGT tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang IGT. LAKIN ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang IGT dalam mengemban tugas dan fungsinya sehingga dapat terukur apakah kinerja Deputi Bidang IGT sesuai dengan yang diharapkan atau tidak agar dapat terus dilakukan usaha perbaikan di masa mendatang. Secara garis besar sasaran program dan capaian kinerja tahun 2019 berhasil dicapai dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian target indikator kinerja yang secara keseluruhan dapat direalisasikan. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan di beberapa sasaran program melebihi target.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang IGT perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Keberhasilan atau tidak optimalnya pelaksanaan program 2021 merupakan dasar Deputi Bidang IGT untuk menyempurnakan program dan kegiatannya, sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024 dapat tercapai. Kedepannya, Deputi Bidang IGT akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan program dan anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan antara lain adalah:

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara IGT agar mampu menghasilkan IGT yang memenuhi kriteria penyelenggaraan IGT yang terstandar dan dapat berbagi pakai;
2. Meningkatkan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan IGT yang berdaya guna dan berhasil guna untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan pelayanan prima dalam kerangka pelaksanaan capaian reformasi birokrasi.

Semoga LAKIN Deputi Bidang IGT Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran kepada pihak terkait perihal kinerja Deputi Bidang IGT berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021. Hasil pelaporan akhir ini juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

1. **SK Revisi Rencana Strategis Deputi Bidang IGT 2020-2024 (Dokumen Terpisah)**
2. **Rencana Strategis Deputi Bidang IGT 2020-2024 (Dokumen Terpisah)**
3. **Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT Tahun 2021 (15 Desember 2020 dan revisi 16 Agustus 2021)**
4. **Manual Indikator Kinerja tahun 2021**
5. **Rencana Kerja (Renja) BIG Tahun 2021 (RKT)**
6. **Nota Dinas Tim Penyusun LAKIN Deputi Bidang IGT Tahun 2021**

**Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT Tahun 2021
15 Desember 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Bambang Wijanarto
Jabatan : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhtadi Ganda Sutrisna
Jabatan : Plt. Kepala Badan Informasi Geospasial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 15 Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Muhtadi Ganda Sutrisna

Antonius Bambang Wijanarto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	8,36 %
		Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	45,10 %

Kegiatan	Anggaran
1 Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp. 36.802.000.000,-

Cibinong, 15 Desember 2020

Plt. Kepala BIG,

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,



Muhtadi Ganda Sutrisna



Antonius Bambang Wijanarto

Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IGT Tahun 2021 16 Agustus 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Bambang Wijanarto
Jabatan : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Arif Marfai
Jabatan : Kepala Badan Informasi Geospasial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 16 Agustus 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ditandatangani secara elektronik

ditandatangani secara elektronik

Muh Arif Marfai

Antonius Bambang Wijanarto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	52,49 %
		Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan IGT strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	50,01 %

Kegiatan	Anggaran
1 Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp. 22.432.323.000,-

Cibinong, 16 Agustus 2021

Kepala BIG,

Deputi Bidang
Informasi Geospasial Tematik,

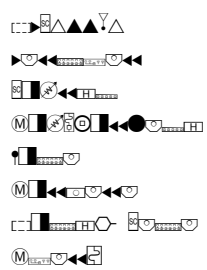
ditandatangani secara elektronik

ditandatangani secara elektronik

Muh Aris Marfai

Antonius Bambang Wijanarto

**Rencana Kinerja Tahunan
Deputi Bidang IGT Tahun 2021**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Keterangan	
					Rincian Output	Target Volume
1	Meningkatnya kontribusi IGT dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan masyarakat	IKP01 - Persentase (%) jumlah tema ketersediaan IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	52.49%	PPTRA		0
					ABT.002. Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang	20 Rekomendasi Kebijakan
				PPIT	ABT.003. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Tutupan Kelapa Sawit Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan
				ABT.004. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Sebaran Potensi Perikanan Budidaya Terstandar	1 Rekomendasi Kebijakan	
				ABT.005. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Izin Usaha Perkebunan dan Ijin Lokasi Terbina	2 Rekomendasi Kebijakan	
				ABT.006. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Garam Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	
				ABT.007. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Kawasan Konservasi Perairan Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan	
				ABT.008. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Rawan	1 Rekomendasi Kebijakan	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Cascading	Keterangan	
					Rincian Output	Target Volume
					Kebakaran Hutan dan Lahan Terbina	
					ABT.009. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Risiko Banjir Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan
					ABT.010. Rekomendasi Penyelenggaraan IGT Lahan Sawah Dilindungi Terbina	1 Rekomendasi Kebijakan
		IKP02 - Persentase (%) cakupan wilayah ketersediaan informasi geospasial tematik strategis sesuai kebutuhan pembangunan nasional	50.01%	PPTRA	CBO.001. Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi	17.185 Km2
	CBO.002. Atlas Geospasial Indonesia				1.899.695 Km2	
	CBO.003. Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan				205.217 Km2	
	CBO.004. Atlas Taktual Indonesia				37.197 Km2	
	CBO.005. IGT Integrasi Spasial-Statistik				133.157 Km2	
	CBO.006. IGT Neraca Spasial Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup				1.899.695 Km2	
	PPIT					
	CBO.007. IGT Peringatan Dini Banjir				1.000 km2	
	CBO.008. Peta Sistem Lahan Skala 1:50.000			119.752 Km2		
	CBO.009. Peta Reaksi Cepat Kebencanaan			30 km2		

Nota Dinas Tim Penyusun Lakin Deputy Bidang IGT Tahun 2021



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong 16911
Telepon. (021) 8752062-63, Faksimile (021) 875 2064 PO. Box 46-CBI
Website : <http://www.big.go.id>

NOTA DINAS

NOMOR : B-10.1/DIGT/PR.02.01/1/2022

Yth : 1. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik
2. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
3. Staf Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik
4. Staf Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
Dari : Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik
Hal : Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang IGT Tahun 2021
Tanggal : 10 Januari 2022
Lampiran : Satu lembar

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 perlu dibentuk tim kerja dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir.

Tim kerja mempunyai tugas :

- Penanggungjawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIN Deputy Bidang IGT;
- Ketua bertugas melakukan koordinasi dan mengatur pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIN Deputy Bidang IGT;
- Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan LAKIN Deputy Bidang IGT;
- Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam penyusunan LAKIN Deputy Bidang IGT dan
- Anggota bertugas melakukan pekerjaan analisis dan penyusunan LAKIN Deputy Bidang IGT.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Deputy Bidang
Informasi Geospasial Tematik

ditandatangani secara elektronik

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan :

- Kepala Badan Informasi Geospasial;
- Sekretaris Utama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lampiran Nota Dinas
Nomor : B-10.1/DIGT/PR.02.01/1/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

No.	Nama/Jabatan	Penugasan
1.	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik	Penanggungjawab
2.	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik	Penanggungjawab LAKIN PPIT
3.	Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	Penanggungjawab LAKIN PPTRA
4.	Anggoro Cahyo Fitrianto	Ketua
5.	Ninuk Christina Anggraeni	Wakil Ketua
6.	Saidah Istiqomah	Sekretaris
7.	Devita Remala Sari	Anggota
8.	Diah Retno Minarni	Anggota
9.	Dwi Maryanto	Anggota
10.	Ferrari Pinem	Anggota
11.	Furqoni Arief	Anggota
12.	Iman Sadesmesli	Anggota
13.	Izzuddin Abdul Aziz	Anggota
14.	Niendyawati	Anggota
15.	Nita Maulia	Anggota
16.	Noor Adhi Sakti	Anggota
17.	Rahmat Nugroho Probonono	Anggota
18.	Ryan Pribadi	Anggota
19.	Setyani	Anggota
20.	Sri Hartini	Anggota
21.	Wahyu Lazuardi	Anggota
22.	Wulan Yustia Sahroni	Anggota
23.	Yusuf Wibisono	Anggota